

Menuju Perencana Profesional

SIMPUL PERENCANA

Volume 8 | Tahun 4 | Juli 2007

E-Mail : simpul@bappenas.go.id

PENGUATAN PERAN PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA DALAM PEMBANGUNAN BANGSA

Urgensi Tenaga Fungsional Perencana
Dalam Pembangunan Nasional

Sudah Saatnya Para Perencana Fungsional
Berkiprah Dibidang Pembangunan Secara Nyata

Re organisasi Bappeda,
Perkuat Peran JFP

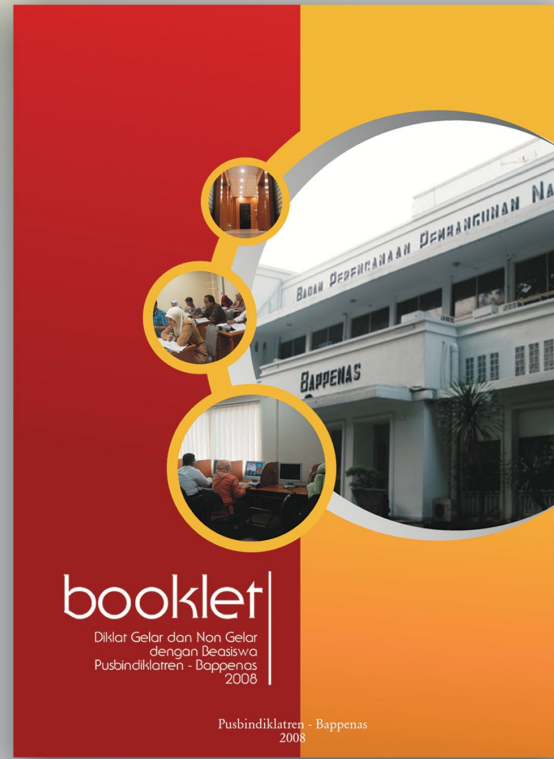
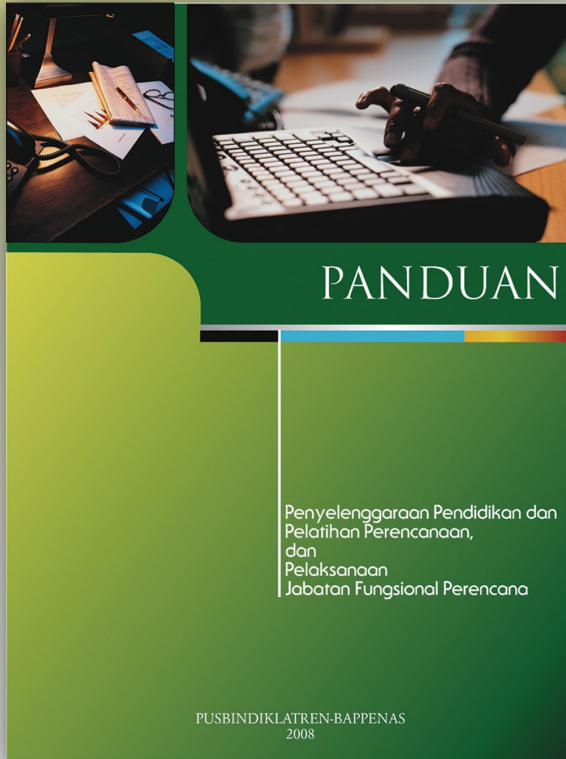
wawancara

DR. Avip Syaefullah, drg. M.Pd
Kapusbindiklatren-Bappenas

JABATAN FUNGSIONAL
PERENCANA
SANGAT STRATEGIS
DALAM PERSPEKTIF
POLITIK BANGSA



1696-4229



**Panduan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan,
dan Pelaksanaan Jabatan fungsional Perencana**

**Booklet Diklat Gelar dan Non Gelar
dengan Beasiswa Pusbindiklatren-Bappenas 2008**

Pusbindiklatren-Bappenas

Terbitan terbaru
Terbitan terbaru
Terbitan terbaru
Terbitan terbaru

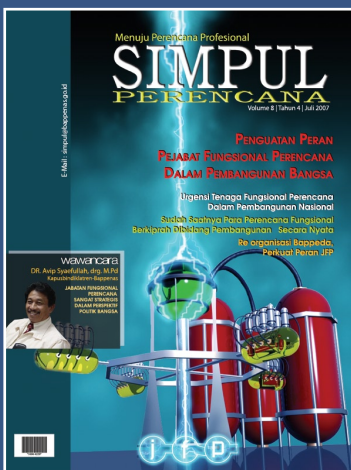
SEMANGAT DAN TENAGA BARU

Salam simpul, setelah mengalami perdebatan dan perjalanan panjang yang cukup menyita perhatian kami semua dalam tim redaksi, akhirnya Majalah Simpul Perencana Edisi 8 kali ini dapat kembali terbit dan diterima oleh para pembaca setia yang budiman. Tidak lupa pula kami sampaikan berkali-kali permohonan maaf atas keterlambatan terbit edisi ini. Pada Edisi 8 kali ini tim redaksi menambah dua orang personil baru, yang direkrut untuk lebih memfokuskan diri dan berharap dapat terbit tepat waktu tanpa harus lagi mengesampingkan pekerjaan lainnya yang sama pentingnya bagi kita semua.

Pembaca Simpul yang berbahagia, pada edisi kali ini redaksi mencoba menghadirkan pembahasan tentang Penguatan Peran Pejabat Fungsional Dalam Pembangunan Bangsa, telah 6 tahun perjalanan KEPMENPAN No. 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya hadir di hadapan kita dan sudah banyak pula produk-produk yang di hasilkan dari Para Pejabat Fungsional baik yang kita ketahui maupun yang tidak terinformasikan, oleh karena itu pada Simpul Edisi 8 kali ini kami mencoba mengurutkan dan memberikan informasi tentang penguatan peranan JFP itu sendiri dalam bentuk tulisan dan hasil karya yang sudah diberikan kepada instansi mereka. Dengan semangat dan tenaga baru kami mencoba menghadirkan tampilan kami yang baru yang menurut kami lebih menonjolkan kreativitas dan sedikit darah seni yang kami miliki dari masing-masing individu tim redaksi. Pada edisi kali ini kami juga berhasil melakukan wawancara atau berdiskusi dengan Bapak DR. Avip Saefullah, drg, M.Pd selaku Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas yang baru, ditengah kesibukan beliau yang sangat padat. Beliau masih menyempatkan diri untuk menerima tim redaksi Simpul Perencana guna menyampaikan pemikiran-pemikiran beliau tentang arah dan tujuan Pusbindiklatren kedepan selama kepemimpinannya beserta pandangan beliau tentang Jabatan Fungsional Perencana.

Selain dari tulisan dan artikel yang dimuat, pada edisi kali ini kami juga menghadirkan beberapa liputan dari kegiatan Pusbindiklatren dan agenda ke depan yang dapat kami informasikan. Juga tidak ketinggalan kami sampaikan produk unggulan dari pusbindiklatren berupa Info Beasiswa yang berlaku sepanjang masa bagi para PNS se Indonesia.

Akhir kata, ucapan terima kasih kepada para pembaca dan pemerhati dari Majalah Simpul Perencana yang senantiasa selalu memberikan masukan dan suport bagi kami Tim Redaksi untuk terus memberikan yang terbaik di setiap penerbitannya, dan juga tidak lupa atensi kami yang cukup besar bagi teman-teman para perencana di daerah dan instansi lain yang sudah meluangkan waktu untuk menulis artikel dan informasi lainnya. Maju terus Para Perencana Indonesia.....



susunan redaksi

Simpul Perencana, Majalah Caturwulanan
Diterbitkan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana
PUSBINDIKLATREN-BAPPENAS.

PELINDUNG : Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS | PENASEHAT : SESMENNEG PPN/SESTAMA BAPPENAS |

PENANGGUNG JAWAB : Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana |

PEMIMPIN UMUM : Meily Djohar | PEMIMPIN REDAKSI : Purwa Malaysianto |

WAKIL PIMPINAN REDAKSI : Wignyo Adiyoso | SEKRETARIS REDAKSI : Eko Suratman |

DEWAN REDAKSI : Guspika, Haryanto, Zamilah Chaerani, Edy Purwanto, Hari Nasiri |

REDAKTUR PELAKSANA : Inda Monita, Jusuf Arbi, Karyoto, Wahyu Pribadi |

EDITOR : Dwi Putro Aris |

GRAFIS : Hendra Yudianto |

ADMINISTRASI / KEUANGAN : Lina Indriawati, Dwi Yanto | DISTRIBUSI/SIRKULASI : Sugiyanti, Dodi Sulistio

ALAMAT REDAKSI : Gedung Diklat Pusbindiklatren-Bappenas, Jl. Proklamasi 70 Jakarta, 10320 |

Telp. (021) 3912612 | Fax. (021) 3912613

6 gerbang cakrawala :

8



....Kami sependapat bila perlu dihitung kembali jumlah dana yang dikorupsi oleh sebagian pegawai negeri dibandingkan dengan total dana yang akan digunakan untuk meningkatkan kesejateraan secara merata, sekaligus menegakan hukum yang berlaku....

14



...Masih banyak para JFP yang masih bingung dengan tugas kemandiriannya, bahkan lebih senang bergabung (nebang) dengan struktural karena khawatir akan tidak mendapatkan tugas karena biasa mendapat perintah atasannya dan juga khawatir tidak.....

20



Bila dilihat dari struktur organisasi, maka para pemangku jabatan fungsional perencana secara hierarkhi berada langsung dibawah " komando " kepala Bappeda, seperti yang terjadi di Jawa Timur, diawal nya pemangku jabatan fungsional perencana ditempatkan pada suatu tempat khusus, tetapi dengan kondisi seperti ini ternyata tidak dapat berjalan dengan baik karena terlalu kaku dan tidak fleksibel dan realitanya memang tidak mungkin dengan organisasi yang begitu besar tersebut kepala Bappeda mendisposisi suatu pekerjaan langsung kepada para pejabat fungsional perencana, lalu pertanyaannya, bagaimana dengan para kepala bidang yang notabene adalah pejabat eselon IIIa ?

wawancara

26



DR. Avip Syaefullah, drg. M.Pd
Kapusbindiklatren-Bappenas

Jabatan Fungsional Perencana
Yang Strategis
Dalam Perspektif Politik Bangsa

daftar isi

Daftar Isi

liputan :

Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Koordinasi Program Diklat Gelar & Non Gelar Pusbindiklatren-Bappenas T.a. 2007 30

info beasiswa

Beasiswa Gelar Pusbindiklatren - Bappenas Tahun 2008 40

sosok alumni 53

akademika 56

opini :

Pola Klaster Dalam Pengembangan Jaringan Usaha IKM



58

selingan 69



20

26

Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Koordinasi Program Diklat Gelar & Non Gelar Pusbindiklatren-Bappenas T.a. 2007

Krisis Perencanaan: Suatu Tantangan Bagi Perencana



Oleh : DR. Guspika, SE., MBA

Pada suatu kesempatan, seorang ahli perencanaan menyatakan bahwa setelah berbagai krisis di Indonesia yang selama ini dirasakan, sekarang kita sudah mulai merasakan timbulnya fenomena krisis yang lain, yaitu : krisis perencanaan (Bakti Setiawan, 30/07/07). Perencana sudah sejak awal krisis selalu disalahkan, karena dianggap tidak mampu memprediksi dan mengantisipasi secara akurat situasi dan permasalahan yang akan terjadi. Gambaran masa depan yang disajikan dianggap tidak tepat dalam hal rumusan masalah, asumsi ataupun pilihan alternatif rencana.

Instansi perencanaan beberapa waktu yang lalu hampir dibekukan. Saat ini di tengah kondisi yang sarat dibebani dengan dimensi politis sebgas apapun kualitas output perencanaan, ternyata belum benar-benar efektif digunakan di dalam proses pengambilan keputusan, perumusan kebijakan pembangunan atau memberikan sumbangan kepada kualitas penyusunan anggaran.

Perencana, sebagai satu profesi di dalam birokrasi ataupun sebagai lembaga yang mempunyai peran dan kewenangan profesional di dalam melaksanakan proses perencanaan yang berkualitas, tidak pernah diakui keberadaannya.

Di dalam konteks permasalahan di atas, pembinaan jabatan fungsional perencana (JFP) seharusnya memiliki kejelasan arah untuk menyelesaikan dulu beberapa hal yang selama ini telah diidentifikasi oleh Bappenas sebagai instansi pembina JFP, antara lain : (a) kurangnya diseminasi peran perencanaan dan lembaga perencanaan, dalam konteks implementasi sistem perencanaan pembangunan nasional, (b) kurang jelasnya sistem karir JFP sebagai perencana pemerintah, dan (c) kurangnya komitmen pimpinan instansi perencanaan. Kejelasan sistem karir JFP, kompetensi dan profesionalitas para perencana, dan pimpinan

instansi perencanaan yang mampu mengelola kegiatan perencanaan secara efektif dan berkualitas, adalah kunci utama yang dapat memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan multi-krisis tersebut di atas.

Meskipun beberapa permasalahan di atas bukan hanya merupakan hal yang menjadi pemikiran perencana, namun sampai saat ini masukan dan solusi yang muncul masih didominasi oleh para pemangku JFP. Hal ini bisa dilihat paling tidak pada forum tulisan dan pemikiran dalam majalah simpul ini.

Beberapa pemikiran yang ditulis pada edisi ini antara lain : (1) tentang besarnya peran fungsional perencana pada instansi pemerintah, sehingga digambarkan adanya pertimbangan mengapa JFP perlu memiliki batas usia pensiun (BUP) yang lebih lama dibandingkan PNS yang lain. Pemikiran ini ditulis oleh E Sugiono seorang perencana utama di Bappenas; (2) Mudjiono seorang perencana madya di provinsi Jawa Tengah menulis tentang pentingnya kiprah nyata dari seorang fungsional perencana di dalam konteks proses perencanaan pembangunan di daerah, setelah lebih dari 5 tahun terbitnya Surat Keputusan Menpan tentang jabatan fungsional perencana, dan (3) usulan pemikiran tentang perlunya re-organisasi Bappeda dalam rangka memperkuat peran para pemangku JFP, ditulis Danny Bastian, seorang perencana muda di provinsi Jawa Timur.

Artikel tentang usulan batas usia pensiun perencana yang ditulis kali ini semoga merupakan masukan yang menjadi perhatian Menpan, BKN atau bahkan Setneg, sebagai instansi yang memiliki kapasitas formal mengatur dan menentukan kebijakan jabatan fungsional PNS di Indonesia. Dalam hal ini, Bappenas sebagai instansi pembina JFP sudah sejak tahun 2003 mengusulkan BUP

perencana madya sampai 60 tahun dan bagi perencana utama sampai 65 tahun. Namun di dalam pembahasan usulan, justifikasi yang diajukan masih dianggap belum begitu kuat. Pertanyaan utama yang selalu diajukan misalnya, “seberapa langka dan seberapa besar kontribusi JFP itu, sehingga perlu dipertahankan sampai usia 60 tahun atau 65 tahun?” Nah, selanjutnya pemikiran tersebut perlu ditindak-lanjuti oleh Bappenas secara lebih formal. Tulisan Mudjiono tentang kiprah nyata perencana, mengungkapkan berbagai kemungkinan pemberdayaan JFP sebagai perencana profesional sesuai dengan keahlian, dan tugas pokok dan fungsi instansi dimana JFP tersebut ditugaskan. Sekarang adalah saat yang tepat bagi JFP untuk menunjukkan kualitas, produktivitas, dan profesionalitasnya yang lebih tinggi di bandingkan PNS yang lain.

Artikel Danny Bastian kali ini kembali mencoba untuk menyadarkan bahwa penerapan dan pelaksanaan kebijakan JFP harus disertai dengan upaya penyesuaian organisasi. Re-organisasi instansi pemerintah dalam bidang perencanaan pembangunan semacam Bappeda bukanlah hal yang mudah, namun apabila tidak segera dilakukan, jelas akan mempengaruhi efektifitas pelaksanaan JFP dan pada akhirnya membuat para pemangku JFP tetap berada dalam situasi yang tidak kondusif, misalnya : komitmen pimpinan lemah, persaingan di antara pejabat struktural-fungsional, alokasi dana operasional bagi fungsional tidak memadai, atau distribusi tugas perencanaan tidak merata. Beberapa tulisan tersebut ditulis memang oleh para pemangku JFP, namun tidak lantas diartikan sebagai keberpihakan yang tidak seimbang. Para JFP tetap perlu mengungkapkan pemikiran komprehensif berdasarkan objektivitas dan profesionalitas sebagai perencana.
SELAMAT MEMBACA.

Tenaga Fungsional Perencana Dalam



Perencanaan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan masa depan yang berdasarkan asumsi/fakta saat ini, pemilihan alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan yang mencakup antisipasi kemungkinan-kemungkinan hambatan yang akan terjadi, serta kebijakan untuk membuat keputusan pelaksanaannya. Sehingga perencanaan pembangunan merupakan proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana dan terus menerus. Sebagian besar tujuan pembangunan dapat dikatakan tercapai bila proses perencanaan telah dilakukan dengan baik.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas , sejak lahirnya mempunyai tugas utama untuk menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahunan beserta jadwal pelaksanaan pertahunnya dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang bersama-sama semua stakeholders terkait. Pada saat ini tugas utama tersebut telah dikukuhkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kedepan di era globalisasi, otonomi daerah, serta demokrasi, bagaimana proses penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaannya dapat dilakukan dengan benar. Hal ini menjadi tantangan Bappenas sebagai pemegang tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan nasional. Langkah perbaikan apa yang harus segera dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Sebab pada tahun 2009 harus tersusun konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang pelaksanaannya dapat diterima oleh masyarakat secara umum

Sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur ,Negara Nomor 16/Kep/MPAN/3/2001 tentang jabatan fungsional perencana, Bappenas ditetapkan sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana secara nasional. Sebagai dampak dari keputusan tersebut Bappenas bertanggung jawab terhadap kelangsungan dan optimalisasi tenaga fungsional perencana baik untuk program jangka panjang, menengah serta tahunan

abstarksi

Urgensi Pembangunan Nasional

Pendahuluan

Sebagai konsekuensi lebih lanjut terhadap tugas pokok dan fungsi Bappenas sebagai penyusun perencanaan pembangunan nasional, serta sebagai instansi pembina jabatan fungsional perencana, ketersediaan dan keandalan tenaga perencana menjadi penting, khususnya di era globalisasi dan demokrasi saat ini. Keberadaan tenaga perencana baik di tingkat pusat maupun daerah sangat menentukan keberhasilan dalam menyusun rencana pembangunan. Fungsi instansi perencanaan di daerah saat ini sering ditinggalkan, di dalam penyusunan rencana pembangunan lebih didominasi oleh unsur (legislatif dan pejabat setempat (Bupati/Walikota). Dominasi tersebut dapat diartikan sebagai fenomena meningkatnya aktivitas gerakan masa sebagai akibat ketidakpuasan terhadap berbagai kebijakan yang terjadi selama ini. Untuk itu perlu ditanggapi secara arif dengan merubah arah tatanan pemerintahan yang lebih profesional, berkeadilan dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat melalui sistem perencanaan yang selaras antara pusat dan daerah. Pada sisi yang lain keberhasilan penyusunan rencana pembangunan nasional sangat ditentukan dari kinerja perencana daerah, karena merekalah yang tahu persis kondisi wilayahnya.

Sumber daya manusia instansi perencana pembangunan meru-

upakan unsur pokok untuk mencapai tujuan pembangunan, baik pejabat strukturalnya maupun pejabat fungsional perencana. Sebab dalam proses penyusunan suatu rencana tidak akan terlepas dengan masalah birokrasi dan administrasi, dimana fungsi ini telah menjadi tugas dari pejabat struktural. Sehingga diharapkan para pejabat fungsional perencana dapat lebih konsentrasi kepada substansi perencanaan membantu para pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya.

Sebagai instansi pembina pejabat fungsional perencana ada beberapa langkah yang harus segera dipersiapkan. secara garis besar yaitu: 1) pengaturan mekanisme sistem kerja antara pejabat struktural dan fungsional; 2) kejelasan batas usia pensiun bagi tenaga fungsional; 3) kesenjangan kesejahteraan antara pejabat struktural dan fungsional.

1. Mekanisme Sistem Kerja Antara Pejabat Struktural Dan Fungsional.

Telah kita sadari bersama sejak ditetapkannya jabatan fungsional perencana sesuai Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 16/Kep/ M.PAN/3/2001 tentang jabatan fungsional perencana, belum ada ketentuan yang jelas mengenai hubungan



Oleh: Ir. Ferrerius Sugiono, MSc
Perencana Utama Bappenas

URGENT

kerja antara pejabat struktural dengan fungsional. Kita semua tahu bahwa tidak ada pekerjaan sekecil apapun yang dapat diselesaikan dengan baik secara individu, kebersamaan adalah kata kuncinya.

Pada saat ini perlu diperjelas tanggung jawab masing-masing jabatan dalam rangka menyusun program kerja sektor, antar sektor, antar daerah. Sehingga dapat dihindari tidak sinkronnya langkah-langkah yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja. Bila hal ini dilakukan akan mempermudah pimpinan dalam memantau pelaksanaan kerja dan memberikan arahan serta teguran kepada masing-masing unit kerja, serta menghindari inefisiensi sumber daya.

Koordinasi dan kebersamaan masing-masing unit kerja ini akan sangat bermanfaat saat kita menetapkan strategi dan kebijakan pembangunan baik secara kewilayahan maupun secara nasional. Stimulus APBN akan dicapai secara optimal karena prioritas kegiatan disusun bersama yang selanjutnya akan dibawa dalam forum yang lebih luas dengan mitra (stake holders). Pada saat ini yang kurang diperhatikan adalah sumber daya pihak swasta baik nasional maupun asing, serta kontribusi Badan Usaha Milik Negara dalam pembangunan, dimana masalah ini dalam waktu seberapa perlu ditangani lebih intensif menjelang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2015.

Penyusunan mekanisme sistem kerja antara pejabat struktural dengan pejabat fungsional perencana tidak memerlukan proses yang panjang, sebab menyangkut masalah ini telah diberikan sepenuhnya wewenang kepada Bappenas untuk menyusun sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/Kep/M.PAN/2001 pasal 29 tentang jabatan fungsional perencana.

2. Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional Perencana.

Batas usia pensiun seorang pegawai negeri sipil merupakan batasan waktu pengabdian terhadap nusa dan bangsa, dimana pada dasarnya telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil pada usia 56 tahun. Pada sisi yang lain terdapat kebijakan untuk jenjang tertentu memberikan batasan usia pensiun lebih dari ketentuan dalam PP No.32 Tahun 1979. Kebijakan tersebut pada prinsipnya didasari oleh kompetensi, kelangkaan, kaderisasi dan kesehatan.

A. Kompetensi

Kompetensi perencana pembangunan harus menyeluruh, mencakup manajemen pembangunan yaitu:

1. identifikasi masalah, pengkajian dan perumusan alternatif, serta menyusun rencana;

2. pengendalian pelaksanaan;
3. pengawasan dan penilaian hasil pelaksanaan sebagai masukan proses perencanaan berikutnya. Selain itu faktor dominan dalam perencanaan pembangunan khususnya pada saat ini adalah sumberdaya baik mencakup sumber daya manusia maupun finansial

Organisasi perencanaan di masa kini dan mendatang harus mampu menghasilkan inovasi-inovasi kebijakan yang dituangkan dalam rencana dan mampu mengevaluasi hasil dari rencana tersebut. Untuk itu lembaga perencanaan harus mempunyai sumberdaya manusia yang handal dengan jumlah dan tingkat pendidikan yang memadai sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Handal dalam arti perencana baik struktural maupun fungsional, mempunyai pengetahuan yang luas di bidang yang direncanakan dan dapat melihat keterkaitan antar bidang. Kondisi saat ini pejabat struktural perencana banyak dibebani tugas yang bersifat birokratis dan administratif, sehingga kegiatan yang bersifat analisis yang mendalam seharusnya dilakukan oleh pejabat fungsional perencana.

Pada saat sekarang koordinasi dan integrasi antar pemangku kepentingan menuntut kearifan yang tinggi dari masing-masing yang terkait. Disisi pemerintah antar instansi pemerintah

pusat, antar pemerintah daerah (baik antar DATI I maupun antar DATI II), serta antar pemerintah pusat - daerah, sekali lagi memerlukan kearifan tentang pengertian bahwa kita merupakan satu kesatuan yaitu pemerintah Indonesia. Jangan lagi membicarakan batas-batas administratif dalam melaksanakan pembangunan, karena semuanya itu merupakan suatu sistem yang harus saling menunjang.

Dalam penyusunan rencana pembangunan nasional menciptakan koordinasi dan integrasi dengan para pemangku kepentingan ini merupakan pekerjaan Bappenas yang berat dan sudah harus dipersiapkan sejak sekarang. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah memberdayakan semua unsur perencana baik di pusat maupun di daerah untuk memetakan data potensi, pemilihan alternatif berkaitan dengan prediksi kendala, serta mempersiapkan kebijakan untuk diputuskan. Perlu diingat bahwa tujuan koordinasi adalah untuk mengoptimalkan sumber daya pembangunan di daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun budaya masyarakat setempat.

Untuk jajaran tingkat pusat Bappenas harus mampu berperan sebagai penghimpun visi dan misi sektoral dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dalam hal ini lobi pimpinan sangat dibutuhkan sebelum ditindaklanjuti oleh jajaran dibawahnya. Sedang koordinasi

dan integrasi dengan institusi diluar eksekutif khususnya di bidang perencanaan pembangunan perlu dibicarakan ditingkat Kabinet di bawah pimpinan Presiden.

Pada sisi Yang lain untuk dapat meningkatkan peran serta usaha swasta dalam proses pembangunan nasional perlu segera diupayakan adanya kepastian hukum yang saat ini selalu dipertanyakan oleh para investor. baik investor nasional maupun asing.

Berkaitan dengan banyaknya faktor dominan dalam proses penyusunan rencana pembangunan nasional, maka dituntut adanya sumber daya manusia yang memadai kualitasnya sesuai bidang keahlian bukan ketrampilan. Perencana tidak dimungkinkan mengetahui semua bidang keahlian, tetapi bagi seseorang pada jenjang jabatan yang tinggi tentunya dituntut penguasaan masalah secara makro.

B. Kelangkaan

Sampai dengan saat ini belum ada institusi pendidikan formal untuk tenaga perencana pembangunan, sehingga mempunyai dampak terhadap penyiapan tenaga perencana yang siap pakai. Semua bidang/jurusan pada dunia pendidikan sekarang secara umum sudah memberikan pelajaran tentang perencanaan kegiatan, tetapi kemampuan tersebut belum cukup untuk menyelesaikan tugas-tugas sebagai perencana pembangunan, khususnya di

era demokrasi seperti sekarang. Sebagai perencana yang handal sangat diperlukan pengalaman kerja untuk menumbuhkan kearifan dalam menyusun kebijakan.

Jenjang jabatan fungsional perencana adalah perencana pertama pangkat Penata Muda/IIIa sampai dengan Penata Muda Tingkat 1/IIIb, perencana muda pangkat Penata/IIIc sampai dengan Penata Tingkat 1/IIId, perencana madya pangkat Pembina/IVa sampai dengan Pembina Utama Muda/IVc, serta perencana utama pangkat Pembina Utama Madya/IVd dan Pembina Utama/IVe. Sehingga untuk jabatan Perencana Madya paling tidak yang bersangkutan telah mempunyai masa kerja sebagai pegawai negeri paling sedikit selama 16 tahun. Dimana tentunya telah mempunyai banyak pengalaman di birokrasi dan tidak jarang telah menjalani pendidikan S2 dan S3. Dari data yang ada sampai tahun 2006 untuk seluruh Indonesia tenaga fungsional perencana berjumlah 1.378 orang hanya 173 % tenaga fungsional perencana yang menduduki jabatan Perencana Madya, serta tinggal 1 orang (0,07 %) yang menduduki jabatan Perencana Utama, 8 orang lainnya telah pensiun pada usia 56 tahun.

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa kelangkaan tenaga perencana masih sangat besar, sehingga diperlukan kebijakan untuk mengatasi kelangkaan tersebut.

Pada kesempatan lain Kantor Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara berpendapat bahwa perencana bukan merupakan tenaga yang langka, karena mereka hanya melihat pada persyaratan minimal menjadi fungsional perencana pertama yaitu Sebelum memperhatikan pengalaman yang dibutuhkan sebagai syarat untuk mencapai jenjang yang lebih tinggi.

C. Kaderisasi

Proses kaderisasi memerlukan waktu cukup lama, karena tidak cukup dengan pelatihan (Diklat) kedinasan, harus melalui semacam " on the job training " mata rantai proses penyusunan perencanaan pembangunan. Khusus di Indonesia latar belakang kondisi politik, social, budaya dan ekonomi masing-masing wilayah sangat beragam, sehingga memerlukan kiat tersendiri dalam menyusun rencana pembangunan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Sehubungan dengan proses kaderisasi saat ini keberadaan tenaga perencana senior masih sangat diperlukan sebagai pembimbing bagi perencana junior. Untuk itu keberadaan perencana senior (perencana madya dan perencana utama)

perlu masih dipertahankan mengingat jumlahnya saat ini masih terbatas.

D. kesehatan

Tidak dapat dipungkiri lagi korelasi antara umur seseorang dengan tingkat kesehatan, semakin tua semakin menurun kekuatan fisiknya. Dari buku proyeksi penduduk Indonesia 2000-2025 umur produktif/usia kerja antara 15 sampai dengan 64 tahun, dan pada tahun 2007 jumlah penduduk yang telah mencapai umur produktif sebesar 67,5% dari jumlah penduduk yang ada. Ditinjau dari umur produktif dan beban kerja tenaga fungsional perencana yang lebih difokuskan kepada keahlian berolah pikir, bukan ketrampilan yang menuntut kondisi fisik yang kuat, maka kebijakan untuk mengoptimalkan batas waktu pengabdian tidak terlalu bertentangan.

Pada saat ini negara Indonesia sedang menghadapi tantangan yang sangat besar untuk dapat menjadi negara kesatuan yang utuh dan maju, sejajar dengan negara-negara besar lain seperti China, India dan Brazil. Tantangan yang besar tersebut memerlukan peran pemerintah yang semakin nyata walau pemerintah tidak harus melaksanakan sendiri berbagai hal yang menjadi tanggung jawabnya. Agar pemerintah dapat menjalankan perannya secara tepat, maka diperlukan ahli-ahli perencana pembangunan dalam jumlah dan kualitas yang memadai.

Berbicara masalah sumber daya manusia khususnya di Bappenas, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka koalitas keahlian di masing-masing bidang sangat diperlukan baik tenaga struktural maupun tenaga fungsional.

Di Bappenas tidak mengenal ranking keahlian, karena semua disiplin ilmu sangat diperlukan dalam proses perencanaan pembangunan nasional. Demikian pula di tingkat daerah baik Bappeda Tingkat I maupun Bappeda Tingkat II, Semarang yang menjadi masalah bagaimana mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada sesuai dengan tupoksinya, serta menarik pegawai negeri sipil yang lain untuk melakukan pengabdiannya melalui tenaga fungsional perencana. Sehingga dapat dihindarkan oleh sementara para pegawai negeri sipil untuk mencapai jenjang jabatan struktural dengan segala cara.

Untuk itu saat ini perlu di usulkan kebijakan tentang batas usia pensiun jabatan fungsional perencana sebagai berikut :

1. Perencana Pertama batas usia pensiunnya sampai dengan 56 tahun
2. Perencana Muda batas usia pensiunnya sampai dengan 56 tahun
3. Perencana Madya batas pensiunnya sampai dengan 60 tahun
4. Perencana Utama batas

Selamat dan Sukses !!!



Atas Diangkatnya
Ir. Ferrerius Sugiono, MSc
Sebagai
Satu-satunya

“PERENCANA UTAMA” DI INDONESIA SAAT INI

pensiunnya sampai dengan 65 tahun

Usulan ini berdasarkan kompetensi, kelangkaan, kaderisasi dan kesehatan seperti dijelaskan di atas, serta memperhatikan kebijakan yang sudah diberlakukan kepada tenaga fungsional lainnya yang berdasarkan keahlian. Adalah merupakan pemborosan potensi riil negara jika para pejabat fungsional perencana ini dibatasi usia pengabdian hanya sampai usia 56 tahun. Pada saat negara sedang menghadapi tantangan besar, maka potensi bangsa ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan memperpanjang batas usia pensiun.

3. Kesenjangan Kesejahteraan Antara Pejabat Struktural Dengan Fungsional

Membicarakan tingkat kesejahteraan pegawai negeri sipil sangat sulit dari mana kita memulainya, apakah dari ketersediaan dana, prioritas ranking berdasarkan resiko tanggung jawab, atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan penegakan hukum yang tentunya diikuti dengan pemberian imbalan kesejahteraan yang memadai. Sehubungan dengan masalah kesejahteraan ini kami sependapat bila perlu dihitung kembali jumlah dana yang dikorupsi oleh sebagian pegawai negeri dibandingkan dengan total dana yang akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan secara merata, sekaligus menegakan hukum yang berlaku. Sehingga pada sisi yang lain kita tidak perlu lagi mempunyai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebelum kepada tujuan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil seperti tersebut di atas mungkin langkah mudah yang dapat dicapai sebagai awal program peningkatan kesejahteraan adalah menghilangkan perbedaan penerimaan imbalan berdasarkan resiko tanggung jawab. Sebab apapun jabatannya kesempatan korupsi sama besarnya, sehingga perbedaan penerimaan sebaiknya berdasarkan jenjang jabatan dan masa kerja, bukan berdasarkan tupoksi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP / PEKERJAAN

1. NAMA LENGKAP
Ir. Ferrerius Sugiono, MSc
2. NIP : 350000323
3. AGAMA
Katholik
4. TEMPAT DAN TGL. LAHIR
Blitar, 05 April 1952
5. NOMOR KARPEG
C 0365831
6. JABATAN
Perencana Utama
7. PANGKAT/GOL. RUANG
Pembina Utama Madya, gol. IV/d
8. PENDIDIKAN
- Sarjana Teknik
Jurusan Bangunan Kapal, Institut Teknologi 10 November Surabaya, tgl. 08-11-1979
- Master of Science in General Maritim Adm.,
World Maritim University Swedia, tgl. 07-12-1987
9. RIWAYAT KEPANGKATAN
- 12-03-1980: Pegawai honorer
- 01-11-1980: Calon PNS, gol. III/a
- 01-01-1982: Penata Muda, gol III/a
- 01-04-1985: Penata Muda Tk.I, gol. III/b
- 01-04-1989: Penata, gol. III/c
- 01-04-1993: Penata Tk.I, gol. III/d
- 01-10-1995: Pembina, gol. IV/a
- 01-04-2001: Pembina Tk.I, gol. IV/b
- 01-10-2001: Pembina Utama Muda, gol. IV/c
- 01-10-2006: Pembina Utama Madya, gol. IV/d
10. RIWAYAT JABATAN
- 12-03-1980 : Staf Perencana
- 01-08-1989 : Kasubbag Prasarana Angkutan Laut pada Bagian Perhubungan Laut pada Biro Perhubungan dan Pariwisata
- 10-08-1994 : Kabag Transportasi Laut s.d.13-10-1998
- 01-09-1998 : Banas Urusan Perhubungan pada Asmenko Ekuin Bidang Industri dan Jasa
- 03-05-2002 : Direktur Transportasi
- 01-10-2005 : Tenaga Ahli Bidang Koordinasi Prasarana
- 01-10-2005 : Perencana Madya
- 01-12-2006 : Perencana Utama s.d. sekarang
11. LATIHAN JABATAN/TUGAS BELAJAR/KURSUS DALAM DAN LUAR NEGERI
- Penataran P. 4 Eselon III dan IV, Ang I, pd Kantor MENPPN/Bappenas, 10 s.d. 18 Juni 1996
- Penataran WASKAT Angk. I, tgl. 29 – 30 Des.1997
- Diklat SPAMA, Bappenas-LAN, Th. 1997-Diklatpim Tk. II, Bappenas – LAN, Th. 2004
- Diklat Perencana Utama, Th.2006
12. TANDA JASA DAN PENGHARGAAN
- Satyalancana Karya Satya X Tahun, Th. 1996
- Satyalancana Karya Satya XX Tahun, Th. 2001
- Satyalancana Wira Karya, Th. 2003

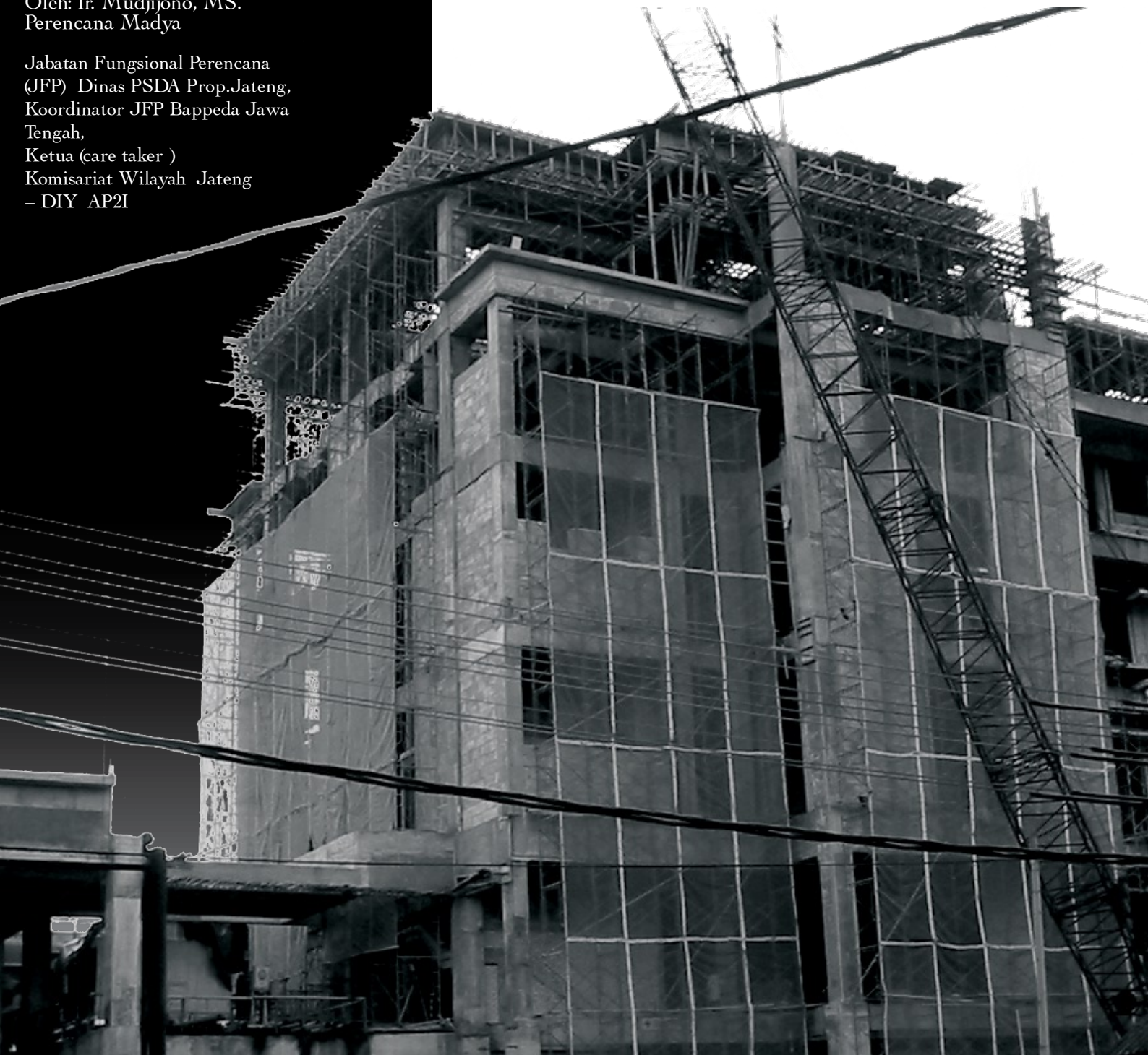


Oleh: Ir. Mudijiono, MS.
Perencana Madya

Jabatan Fungsional Perencana
(JFP) Dinas PSDA Prop. Jateng,
Koordinator JFP Bappeda Jawa
Tengah,
Ketua (care taker)
Komisariat Wilayah Jateng
– DIY AP21

Sudah Saatnya

Para Perencana Fungsional Berkiprah Dibidang Pembangunan Secara Nyata



“
 Mengidentifikasi permasalahan; pengendalian pelaksanaan; dan penilaian hasil pelaksanaan , yang merupakan kontrol/ pengendalian terhadap kegiatan yang dilaksanakan struktural merupakan tugas pokok perencanaan fungsional
 ”

Pendahuluan

Sudah 5 tahun lebih sejak dikeluarkan KepMen PAN 2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana (JFP) yang diikuti dengan Juknisnya, selanjutnya dibuka formasi JFP melalui inpassing (di Jateng tahun 2002) dan diikuti dengan pembentukan Koordinator JFP. Kemudian pada tahun 2005 dibentuk dan dideklarasikan wadah JFP dengan nama AP2I (Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia), kemudian diikuti Munas pertama 2006, dan selanjutnya didaftarkan organisasi AP2I menjadi organisasi legal dengan akte pendirian organisasi 2007. Namun jalannya JFP tetap belum eksis dimata masyarakat struktural dalam institusi pemerintahan.

Beberapa hal yang menjadi penyebab belum eksisnya JFP yakni antara lain adalah:

- a. Kurangnya pemahaman dan kurangnya perhatian institusi terhadap para JFP, karena dianggap "ngrecohi / nregoni/ tidak membuat lancar" dan dianggap para JFP sebagai "orang luar institusi", sehingga para struktural khawatir akan menjadi kendala jalannya penyelenggaraan pembangunan di institusinya.
- b. Kurangnya pemahaman para JFP akan tugas dan kewajibannya bahwa dia selain bekerja untuk dirinya sendiri dengan mengejar AK, tetapi juga wajib menyumbangkan pemikirannya untuk pembangunan dilingkungan instansi, pemerintah dan pemda. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya produk JFP yang hingga saat ini bermanfaat bagi institusinya.
- c. Masih banyak para JFP yang masih bingung dengan tugas kemandiriannya, bahkan lebih senang bergabung (nebeng) dengan struktural karena khawatir akan tidak mendapatkan tugas karena biasa mendapat perintah atasannya dan juga khawatir tidak mendapat fasilitas tambahan (perjalanan dinas, undangan rapat, dll).

Untuk itu di bawah ini diuraikan beberapa isu yang terkait dengan upaya-upaya untuk meluruskan peran pejabat FP dalam memberikan kontribusinya dalam pembangunan.

Pertama adalah pengertian penting yang berkaitan dengan pelaksanaan JFP sehingga didapatkan persepsi yang sama terhadap pelaksanaan JFP.



A. Perencanaan (KepMen PAN 16/2001)

adalah kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang dilaksanakan di masa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan, serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan (tinjauan meliputi : jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, regional, sektor tunggal, multi-sektoral, makro, dan kawasan); Sedangkan Perencanaan (sesuai UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional), adalah : suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

B. Rencana

adalah produk kegiatan perencanaan, berupa : rencana kebijaksanaan, rencana program dan rencana proyek baik dalam lingkup makro, sektor ataupun daerah.

C. Unit Perencanaan Instansi Pemerintah

adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan perencanaan, yaitu : Bappenas, Unit/ Lembaga Perencanaan lain di Departemen/LPND di pusat, propinsi dan kabupaten/ kota , Unit Perencanaan Kantor Meneg, Bappeda Propinsi, Bappeda Kabupaten/ Kota, Unit/ Lembaga Perencanaan Lain di Pemerintah Propinsi, Unit/ Lembaga Perencanaan Lain di Pemerintah Kabupaten/ Kota yang saat ini dilaksanakan oleh pejabat strukturalnya.

D. Tugas Pokok Perencana

adalah menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan seluruh kegiatan teknis perencanaan dilingkungan unit perencanaan instansi pemerintah dengan lingkup .kegiatan terdiri atas sub unsur: Identifikasi permasalahan; Perumusan alternatif kebijaksanaan perencanaan; Pengkajian alternatif; Penentuan alternatif dan Rencana Pelaksanaan; Pengendalian Pelaksanaan dan Penilaian Hasil Pelaksanaan.

Wacana Pemisahan Tugas Pokok Perencanaan dan JFP ambil bagian

“ Katakanlah dilakukan pemisahan tugas pokok perencanaan antara struktural dan fungsional. Struktural melaksanakan : Identifikasi permasalahan; Perumusan alternatif kebijaksanaan perencanaan; Pengkajian alternatif; Penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan, yang selama ini sudah berjalan Kemudian untuk Fungsional melakukan tugas : Identifikasi permasalahan; Pengendalian pelaksanaan; dan Penilaian hasil pelaksanaan , yang merupakan kontrol/ pengendalian terhadap kegiatan yang dilaksanakan struktural. ”



Opini pembagian ini adalah transisi semata selama JFP belum mendapat tempat di hati para pimpinan struktural instansi. Nantinya setelah situasi memungkinkan, maka semua aspek perencanaan akan diambil alih oleh JFP dan bahkan pimpinan institusi perencanaan harus dari JFP.

Top Isue Pembangunan dan Partisipasi Aktif JFP.

Top issue adalah isu-isu pembangunan yang sedang berkembang di masyarakat. Untuk tingkat nasional, misalnya : Bio Energi dan kemiskinan. Untuk Propinsi Jawa Tengah top issue saat ini , misalnya : Pembangunan Waduk Jatibarang di Semarang, Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo, Penyelamatan Pantai Utara Jawa Tengah, Blok Cepu, Penanganan banjir, longsor dan kekeringan, PLTN Muria, Efisiensi Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana Irigasi, Segara Anakan, dll.

Para JFP harus berpartisipasi aktif dalam mengidentifikasi masalah top issue di daerahnya, kemudian mengambil peran, katakanan : kegiatan identifikasi, pengendalian pelaksanaan, dan

penilaian hasil pelaksanaan. Sebagai implementasi di ambil contoh Pembangunan Waduk Jatibarang di Semarang: Identifikasi permasalahan terkait pembangunan Waduk Jatibarang, antara lain masalah social, teknis , lingkungan hidup dan ekonomi.

- a. Sosial; antara lain : berapa luas daerah yang akan tergenang, menggenangi berapa KK, direlokasi kemana, bagaimana pembebasan tanahnya, ganti ruginya memadai, kapan mulai pengukurannya dsb nya.
- b. Teknis ; antara lain : berapa timbunan tanahnya, diambilkan dari mana, dimana letak intake air baku, letak power house, bagaimana stabilitas bangunan terhadap kegempaan dll.
- c. Lingkungan Hidup: bagaimana Amdalnya, kapan dilakukan Amdal, sudah kadaluwarsa belum; bagaimana meminimais dampak dll.
- d. Ekonomi, antara lain : bagaimana nasib penduduk yang dipindah, Berapa BCR , IRR, Apakah ada peluang investor masuk dan dimana , berapa umur ekonomisn bangunan , dll.

Para JFP Harus menguasai Peraturan Perundangan.

Untuk itu semua para JFP harus betul-betul menguasai peraturan perundangan terkait, misalnya UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 7/ 2004 tentang SDA, UU Jalan, UU Permukiman , Perpres 36/2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Keppres 80/2003 tentang Pengadaan Barang/ Jasa di Instansi Pemerintah dll.

Monitoring dan Evaluasi.

Untuk pengendalian pelaksanaan (monitoring) diperlukan formulir-formulir yang merupakan item – item pembangunan , yang berfungsi sebagai checklist apakah item – item tersebut sudah dilaksanakan, sesuai volume, sesuai kualitas, sesuai waktu, sesuai fungsi, sesuai sasaran, sesuai manfaat dan sebagainya. Dari ceklist ini akan dievaluasi apakah pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan para struktural beserta mitranya sudah sesuai kontrak kerja dan kriteria.

Rekomendasi dan Tindak lanjut.

Apabila terjadi ketidaksamaan atau penyimpangan, penyimpangan tersebut di informasikan kepada kepala SKPD atau Lembaga/Departemen, agar ditindak lanjuti. Tindak lanjut bisa berupa: akselerasi pelaksanaan pembangunan, seperti : kerja lembur, penambahan dana, personil maupun peralatan. Atau kebijakan dan strategi yang harus diubah.

Kerja Sama dengan AP2I.

AP2I adalah wadah para JFP secara nasional dengan pembinaanya Bappenas. Disana terkumpul para ahli dibidangnya secara lintas sektoral, lintas disiplin ilmu dan pengalaman. Apabila diperlukan pemerintah bisa melakukan kerjasama dengan AP2I.

Kurang Apa Lagi Bagi JFP?

Jadi kurang apa lagi bagi JFP?. Tupoksi/ " job description " ada, profesionalisme/ kompetensi ada, metodenya ada, kerja samanya bisa diadakan, semuanya sudah tersedia , tinggal kemauan kita saja yang belum alias ragu-ragu. Oleh karena itu sekarang inilah sudah tiba saatnya bagi para perencana JFP untuk unjuk diri, unjuk performa bahwa ia mampu menunjukkan kepada kalayak, bahwa JFP sudah eksis. Tidak hanya untuk karier diri sendiri, tapi sumbangan nyata kepada Pemerintah tentang perencanaan pembangunan yang sedang berjalan dan top issue.

Para JFP jangan hanya memikirkan karier diri sendiri (berkutat dengan angka kredit / AK), tetapi sudah saatnya berikan ide-ide perencanaan pembangunan yang bermanfaat bagi Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Silahkan para JFP memberikan " sharing " pemikirannya.

Bukan berarti mencampuri urusan struktural yang sekarang masih rancu. Tetapi para JFP setidaknya bisa menjadi kontrol dan menambah wacana terhadap/ bagi apa yang dihasilkan para struktural.

Wacana Baru Jenjang Jabatan JFP

Sesuai Kepmen PAN 16/2001, jenjang jabatan JFP meliputi 4 tingkatan, yakni : Perencana Pertama, Perencana Muda, Perencana Madya dan Perencana Utama. Namun dengan asumsi pemikiran bahwa para JFP adalah berjenjang S1 atau Sarjana Strata 1 yang secara formal sudah bisa dianggap mempunyai keahlian dibidangnya sesuai program studi dan judul skripsi/ tugas akhirnya, maka ada wacana baru bahwa untuk jenjang jabatan JFP dipisahkan menjadi 4 jenjang jabatan , yakni : Perencana Pertama menjadi Perencana Lokal Junior (Junior Local Planner), Perencana Muda menjadi Perencana Lokal Senior (Senior Local Planner), Perencana Madya menjadi Perencana Nasional (National Planner), dan Perencana Utama menjadi Perencana Internasional (International National Planner).

Ambil Peran Dalam Pembangunan Waduk Jatibarang Semarang Jawa Tengah.

Para JFP tingkat Nasional atau Perencana Madya (National Planner) misalnya silahkan ambil peran dalam pelaksanaan pembangunan Waduk Jatibarang di Semarang Jawa Tengah dengan cara membuat tulisan-tulisan tentang Program Pelaksanaan Pembangunan Bendungan Serba Guna Jatibarang itu sejak dari Identifikasi Permasalahan (survey and investigation), Perencanaan (Desain), Pembebasan Tanah (land aquisition), Pelaksanaan Konstruksi (Construction) yang meliputi: Pelelangan, Pembuatan Kontrak, Pelaksanaan Kontrak , sampai Operasi dan Pemeliharaan (Operation and Maintenance).





Fokuskan kegiatan anda pada pemisahan tugas seperti tersebut di atas tadi, yakni : Identifikasi permasalahan; Pengendalian pelaksanaan; dan Penilaian hasil perencanaan.

Hasil Monitoring (pengendalian pelaksanaan) dan Evaluasi (penilaian hasil pelaksanaan) selama pembangunan berjalan, akan dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi dan saran kepada para pimpinan Departemen/ Lembaga serta SKPD, yang nantinya dapat menjadi feed back untuk perbaikan sistem pembangunan. Untuk itu laporan hasil monitoring dan evaluasi serta rekomendasi harus disampaikan kepada pimpinan departemen/ lembaga/ kepala SKPD terkait.

DAFTAR BACAAN

1. Deklarasi AP2I Oleh Pemangku JFP Jakarta, 6 Desember 2005.
2. Hasil Lokakarya Nasional "Prospek JFP Sebagai Alternatif Karir PNS"; Bappenas: Jakarta, 2005.
3. Hasil Munas AP2I Tanggal 29 Agustus 2006 ; Bappenas; Jakarta, 2006.
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan angka kreditnya; Bappenas; Jakarta 2001.
5. Keputusan Bersama Kepala Bappenas dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : Kep 1106/ 2001 dan Nomor 34 A Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan JFP; Bappenas; Jakarta, 2001.



Oleh
DANNY BASTIAN
Perencana Muda

”

Memberikan alternatif agar pemangku jabatan fungsional dapat lebih berperan sesuai dengan tujuan dibentuknya jabatan fungsional perencana dan dapat meningkatkan kontribusi bagi organisasi yaitu melalui “ penyederhanaan ” struktur organisasi, alternatif penyederhanaan

”

Re organisasi BAPPED

Maksud dan Tujuan Dari Diberlakukannya Keputusan Menteri Tentang JFP

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimaksudkan sebagai pembinaan PNS yang menduduki jabatan fungsional yang didasarkan pada profesi dan sistem penghargaan prestasi PNS sesuai dengan bidang tugasnya. Hinggasaat ini, telah diberlakukan sebanyak 96 jenis jabatan fungsional. Berbeda dengan jabatan struktural, dimana tugas, tanggung jawab, dan wewenang seorang PNS lebih didasarkan pada kemampuan seseorang dalam memimpin suatu satuan organisasi negara, maka dalam jabatan fungsional pelaksanaan tugasnya lebih didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri. Dengan demikian, dalam jabatan fungsional, peningkatan keahlian dan keterampilan menjadi fokus utama dalam program pengembangan PNS yang memangku jabatan fungsional. Sementara itu ketentuan yang mengatur jabatan fungsional perencana yaitu Surat Keputusan

Menteri PAN Nomor : 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya berupaya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya manusia pada aparatur negara yang bertugas melakukan kegiatan pekerjaan perencanaan pembangunan, karena dianggap strategis maka diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai perencana; dengan menjamin pembinaan karier, kepangkatan dan jabatan serta profesi di bidang perencanaan pembangunan, sehingga pada KepMen ini “ juga mengatur Job discription ” Jabatan Fungsional Perencana.

Tugas pokok Perencana (*Baca: PNS Pemangku Jabatan Fungsional Perencana) adalah menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan perencanaan dengan Unsur dan sub unsur kegiatan Perencana terdiri atas :

A, Perkuat Peran JFP

- a. Pendidikan, meliputi Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/jasah, Mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan di bidang perencanaan dan mendapat sertifikat dan/atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPI).
- b. Kegiatan perencanaan meliputi : Identifikasi Permasalahan; Perumusan Alternatif Kebijakan Perencanaan; Pengkajian Alternatif; Penentuan Alternatif dan Rencana Pelaksanaan; Pengendalian Pelaksanaan; Penilaian Hasil Pelaksanaan.
- c. Pengembangan profesi meliputi : Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perencanaan; Menterjemahkan/menyadur buku di bidang perencanaan; Berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan buku di bidang perencanaan; Berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan (ekspose) draft/pedoman/modul di bidang perencanaan; Melakukan studi banding di bidang perencanaan; Melakukan kegiatan pengembangan di bidang perencanaan.
- d. Mengikuti seminar / lokakarya dibidang perencanaan; Menjadi pengurus organisasi

profesi; Menjadi anggota delegasi dalam pertemuan internasional; Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Perencana; Memperoleh gelar keserjanaan lainnya; Memperoleh penghargaan/ tanda jasa di bidang perencanaan.

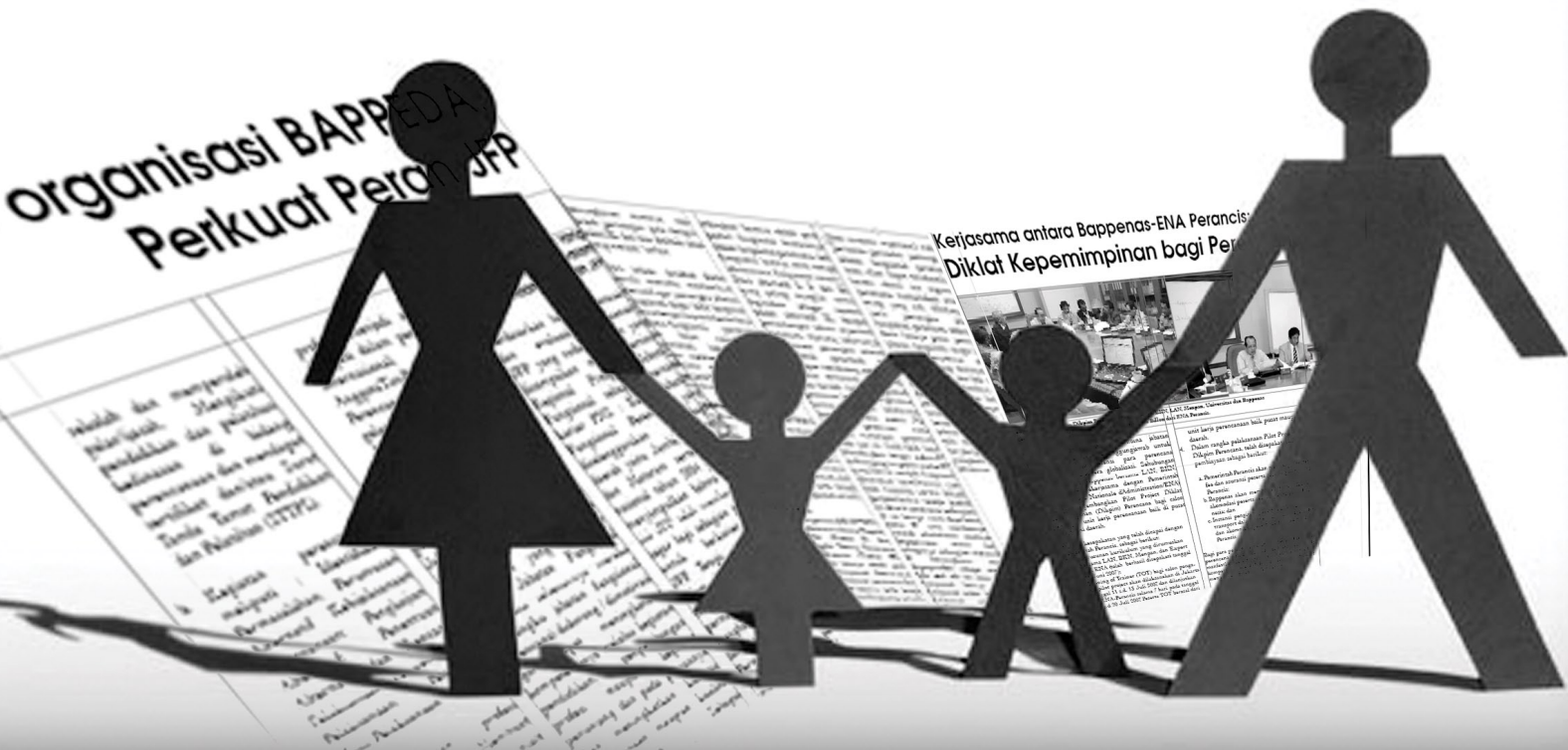
Bila kita cermati bahwa seorang perencana (*Baca : Pemangku Jabatan Fungsional Perencana*) dengan diberlakukannya KepMenPan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Perencana sebenarnya mereka (pemangku jabatan fungsional perencana) didorong / dimotivasi agar dapat meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan pendidikan, pengembangan profesi maupun kegiatan penunjang dan pada gilirannya akan meningkatkan kualitas perencanaan maupun kualitas organisasinya.

Sebagai pejabat fungsional, perencana pemerintah dituntut untuk bekerja lebih produktif. Hal ini dapat dipahami karena kenaikan pangkat dan jabatan para perencana tidak lagi ditentukan oleh lamanya bekerja, melainkan ditentukan oleh tingkat produktivitasnya. Tingkat produktivitas akan diukur oleh besar kecilnya angka kredit yang dikumpulkan, dan besarnya angka kredit ini didasarkan atas kegiatan perencanaan yang dilakukannya.

Masalah Dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Peraturan JFP

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan JFP yang sudah berjalan yang disampaikan melalui seminar Regional Prospek Jabatan Fungsional sebagai alternatif karier PNS : Kasus Jabatan Fungsional Perencana yang diselenggarakan diberbagai daerah yaitu Jambi, Semarang dan Mataram serta seminar nasional tahun 2004 yang lalu menyimpulkan bahwa : disatu sisi JFP telah membawa angin segar bagi sebagian perencana untuk berkarier melalui JFP. Tetapi, pada sisi lain dalam implementasinya, JFP ternyata masih banyak ditemui permasalahan yang dapat menghambat tercapainya maksud dan tujuan dilaksanakannya JFP.

Permasalahan-permasalahan yang menonjol dalam pelaksanaan JFP selama ini antara lain adalah belum dipahaminya secara benar peraturan-peraturan JFP, masih adanya pendapat-pendapat " minor " terhadap jabatan fungsional, rasa " minder " yang dialami oleh pejabat fungsional perencana dan mekanisme serta hubungan kerja antara pejabat struktural dan pejabat fungsional. Masalah penting lainnya yang dihadapi dan dirasakan oleh sebagian besar perencana adalah masih



kurangnya komitmen pimpinan dan sedikitnya alokasi biaya untuk mendukung kegiatan para pejabat fungsional perencana. Hasil seminar tersebut juga merekomendasikan dibentuknya Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) yang telah dideklarasikan pada tanggal 6 Desember 2005 yang lalu di Jakarta yang bertujuan meningkatkan kemampuan, profesionalitas dan produktivitas perencana, Meningkatkan kapasitas dan produktivitas instansi / unit perencana, menerapkan kode etik perencana dan mengembangkan jaring kerjasama antar anggota AP2I. Aktifitas pemangku jabatan fungsional perencana akan sangat terkait dengan organisasi dan sarana prasarana yang memadai di setiap instansi masing-masing. Oleh karena itu kinerja pejabat fungsional perencana akan dapat optimal

bila didukung

- (1) Komitmen pimpinan untuk mengembangkan JFP sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas perencana dan output perencanaan,
- (2) wadah atau forum yang jelas dalam struktur organisasi dalam unit kerja,
- (3) dukungan sarana dan prasarana yang memadai, dan
- (4) alokasi pembiayaan yang cukup.

Dengan dukungan dan kerjasama semua pihak, dimasa yang akan datang, jabatan fungsional khususnya JFP diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan karir dan dapat mendorong reformasi birokrasi di Indonesia menuju birokrasi yang efisien, efektif, demokratis, terbuka, dan terpercaya.

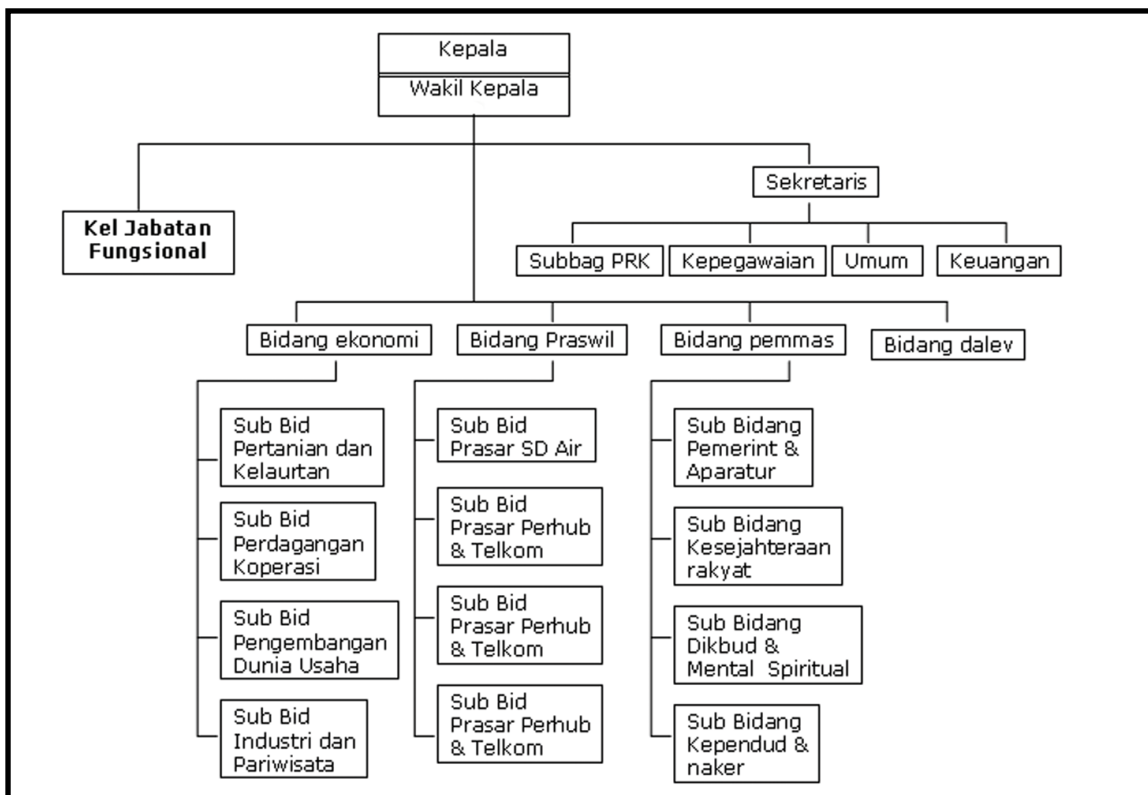
Re organisasi BAPPEDA, Perkuat peran JFP

Sebagaimana telah disinggung tulisan kami terdahulu bahwa Peraturan – peraturan yang ada sudah lebih dari cukup untuk eksistensi seorang Pemangku Jabatan Fungsional Perencana, namun dalam konteks Jabatan Fungsional Perencana kaitannya dengan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan di daerah akan menarik untuk disimak. Dulu, sebelum adanya Jabatan Fungsional Perencana kita mengenal struktur organisasi di BAPPEDA ada Kepala dan wakil kepala (eselon IIa dan IIb) para Kepala bidang dan sekretaris (eselon IIIa) pada kepala sub bidang dan Kepala Subbag (eselon IVa) dan staf, lihat struktur organisasi Bappeda terlampir. Namun setelah jabatan fungsional perencana

mulai tampak ada sedikit "distorsi" walaupun beberapa statemen telah menjelaskan bahwa "Berbeda dengan jabatan struktural, dimana tugas, tanggung jawab, dan wewenang seorang PNS lebih didasarkan pada kemampuan seseorang dalam memimpin suatu satuan organisasi negara, maka dalam jabatan fungsional pelaksanaan tugasnya lebih didasarkan pada keahlian dan / atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri" 'Distorsi' dimaksud sebagaimana awal-awal adanya jabatan fungsional perencana, bila dilihat dari struktur organisasi, maka para pemangku jabatan fungsional perencana secara hierarkhi berada langsung dibawah " komando " kepala Bappeda, seperti yang terjadi

di Jawa Timur; diawalnya pemangku jabatan fungsional perencana ditempatkan pada suatu tempat khusus, tetapi dengan kondisi seperti ini ternyata tidak dapat berjalan dengan baik karena terlalu kaku dan tidak fleksibel dan realitanya memang tidak mungkin dengan organisasi yang begitu besar tersebut kepala Bappeda mendisposisi suatu pekerjaan langsung kepada para pejabat fungsional perencana, lalu pertanyaannya terus bagaimana dengan para kepala bidang yang notabene adalah pejabat eselon IIIa ? demikian juga dengan para kepala sub bidang yang notabene juga pejabat dengan eselon IVa ? sedangkan para pejabat fungsional perencana yang sebagian besar adalah

mantan staf yang notabene juga bawahan dari para kepala bidang dan para kepala sub bidang. Sebagai suatu dinamika perkembangan suatu organisasi, hal ini adalah hal yang wajar – wajar saja. Lalu selanjutnya bagaimana ? diambil jalan tengah para pejabat fungsional perencana pun kembali ke posisi semula dan disposisi pekerjaan melalui pejabat struktural dari eselon II sampai ke eselon IV a dan kemudian ke pejabat fungsional perencana, namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa pekerjaan yang langsung dari kepala bappeda kepada para pemangku jabatan fungsional.



Struktur Organisasi BAPPEDA Jawa Timur

“ Agar pemangku jabatan fungsional dapat lebih berperan sesuai dengan tujuan dibentuknya jabatan fungsional perencana dan dapat meningkatkan kontribusi bagi organisasi yaitu melalui penyederhanaan dengan tiga alternatif. ”

Dengan berjalannya waktu, maka para pemangku jabatan fungsional telah menikmati tunjangan jabatan, ada yang bisa menikmati kenaikan pangkat lebih cepat dan bagi mereka yang terlena yang 'berperilaku' tidak selayaknya JFP maka ada teguran karena belum menyusun DUPAK (daftar usulan penilaian angka kredit) karena sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa kenaikan pangkat dan jabatan para perencana tidak lagi ditentukan oleh lamanya bekerja, melainkan ditentukan oleh tingkat produktivitasnya. Tingkat produktivitas akan diukur oleh besar kecilnya angka kredit yang dikumpulkan, dan besarnya angka kredit ini didasarkan atas kegiatan perencanaan yang dilakukannya.

Dalam perjalanannya para pemangku jabatan fungsional tidak menutup kemungkinan terjadi persaingan dengan pejabat eselon IV karena pemangku jabatan fungsional perencana dengan kenaikan pangkat yang

tidak terbatas karena diukur oleh besar kecilnya angka kredit sedangkan eselon IV akan berhenti di kepangkatan III/d dan bisa mencapai IV/a bagi yang memiliki pendidikan strata dua sementara pemangku jabatan fungsional perencana dengan tanpa pendidikan strata dua pun bisa menduduki kepangkatan golongan IV, tidak menutup kemungkinan nantinya juga terjadi persaingan pula dengan eselon III, dan bisa ditebak siapa yang menjadi 'korban'

Dari uraian tersebut diatas penulis mencoba memberikan alternatif agar pemangku jabatan fungsional dapat lebih berperan sesuai dengan tujuan dibentuknya jabatan fungsional perencana dan dapat meningkatkan kontribusi bagi organisasi yaitu melalui " penyederhanaan " struktur organisasi, alternatif penyederhanaan organisasi dimaksud adalah sebagai berikut :

Alternatif I.

Struktur organisasi di BAPPEDA dengan jabatan struktural Kepala BAPPEDA (Eselon II) dan Sekretaris (Eselon III) sedangkan lainnya adalah para pejabat fungsional diantaranya adalah fungsional perencana, dan fungsional lainnya serta tenaga administrasi (fungsional umum).

Alternatif II.

Struktur organisasi di BAPPEDA dengan jabatan struktural Kepala BAPPEDA (Eselon II) dan para Kepala Bidang Perencana dan Sekretaris (Eselon III) sedangkan lainnya adalah para pejabat fungsional diantaranya adalah fungsional perencana dan fungsional lainnya serta tenaga administrasi (fungsional umum)

Alternatif III.

Struktur organisasi di BAPPEDA dengan jabatan struktural Kepala BAPPEDA (Eselon II) dan para Kepala Bidang dan Sekretaris (Eselon III) dan Kepala Sub bagian (maks 2 ka.subbag) sedangkan lainnya adalah para pejabat fungsional diantaranya adalah fungsional perencana, dan fungsional lainnya serta tenaga

administrasi (fungsional umum). Dari alternatif I, II dan III, yang paling mungkin untuk digunakan sebagai rujukan adalah alternatif III, dengan pertimbangan bahwa organisasi perencana memang seharusnya didominasi pemangku jabatan fungsional perencana dan sekaligus mendorong eselon IVa (jabatan struktural perencana) akan beralih menjadi fungsional perencana, hal ini memungkinkan karena tunjangan jabatannya akan naik dari eselon IVa menjadi perencana muda (karena tunjangan perencana muda saat ini masih lebih besar dibandingkan dengan eselon IV a) disamping itu pejabat eselon IV yang beralih menjadi fungsional diharapkan kontribusinya akan lebih maksimal karena dengan pengalamannya sebagai pejabat struktural perencana, sedangkan di sisi lainnya masih diperlukan eselon IV yang membidangi masalah administrasi misalnya kepegawaian, umum dan sebagainya, sedangkan alternatif II, kemungkinan dapat dipergunakan sebagai rujukan bila telah ada dan eksis jabatan fungsional lainnya misalnya fungsional analis kepegawaian, fungsional arsiparis dan sebagainya. Sedangkan alternatif I untuk kurun waktu yang dekat, sulit dilakukan selain akan menimbulkan permasalahan baru seperti banyaknya 'korban' yang kehilangan jabatan. Namun dengan kondisi seperti saat ini (lihat struktur organisasi) maka persoalan-persoalan pemangku jabatan fungsional perencana tidak akan dapat terselesaikan,

karena di satu sisi organisasi perencana memerlukan orang-orang yang ahli dibidangnya yaitu pemangku jabatan fungsional perencana sedangkan disisi lainnya posisi pemangku jabatan fungsional sangat lemah karena banyaknya jabatan struktural yang tentunya akan lebih dominan, dan bila hal ini tidak segera diselesaikan, tujuan dibentuknya jabatan fungsional perencana yang sangat mulia tersebut tidak akan berjalan sesuai harapan. Dan saat ini jabatan fungsional perencana telah mulai diminati, terbukti banyaknya pendaftar untuk mengikuti diklat penjenjangan perencana.



Jabatan Fungsional Perencana Sangat Strategis Dalam Perspektif Politik Bangsa

DR. Avip Syaefullah, drg. M.Pd
Kapusbindiklatren

Profil

Sejak masuk dunia mahasiswa tahun 70 an di Unpad, terseret menjadi aktivis intra universitas, menjadi ketua Senat Mahasiswa, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Unpad, aktivis Dewan Mahasiswa, dan memimpin gabungan senat mahasiswa se-Unpad untuk tetap independen dan menolak organisasi ekstra Universitas merusak Kampus dan tidak setuju gerakan malari

Tahun tujuh puluh delapan diangkat Capeg sebagai asisten ahli di bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat FKG Unpad

Pendidikan non degree di Bangkok tentang Community Based Development and Family Planning

Pendidikan Non Gelar di Turin Italia tentang training material on Labor & Occupational health

Ditugaskan rektor untuk ngambil studi management pendidikan sampai lulus menjadi Doctor di IKIP Bandung

Tahun 1987 diangkat menjadi anggota DPRD Provinsi Jabar; dan menjadi anggota DPR MPR RI

Tahun 1999 ikut Gerakan Reformasi keluar dari DPR/MPR dan milih menjadi pegawai negeri, back to campus menjadi sekretaris Pasca Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat Kedokteran Unpad sampai mendapatkan penghargaan Bintang Satia Lencana pegawai negeri 10 th dan 20 th

Ketua Badan Pengawas Management Rumah Sakit Al ihsan

Wakil Sekjen ICMI se Indonesia sampai sekarang

Hobby berubah total dari permainan rakyat Badminton, Tenis, sekarang jadi Golfer anggota AGN, jadi elitis.

Jabatan Fungsional Perencana dalam sebuah Unit perencanaan di semua instansi sudah di atur oleh KEPMENPAN No. 16 /KEP/M.PAN/3/2001 dan sudah berjalan kurang lebih sekitar 6 tahun berada dalam proses pembangunan bangsa.

Pada awal peraturan tersebut dibuat, mungkin banyak sekali ide-ide atau harapan-harapan terhadap para pegawai negeri sipil untuk memilih jalur karir sebagai pejabat fungsional bagi peningkatan karier PNS di luar jalur struktural. pelaksanaan peraturan tersebut banyak mengalami kendala yang kompleks, Sehingga memerlukan dukungan semua pihak yang terlibat untuk lebih serius memikirkan persoalan ini.

Selama ini, Pusbindiklatren-Bappenas sebagai instansi pembina jabatan fungsional perencana, telah melakukan langkah-langkah strategis guna mendukung terlaksananya peraturan tentang jabatan fungsional tersebut.

Pada edisi kali ini kami dari Tim Simpul Perencana yang diwakili oleh sdr. Dwiputro dan sdr. Hendra Yudiyanto telah melakukan wawancara dengan Kapusbindiklatren yang baru Bapak DR. Avif Saefullah. drg., M.Pd untuk mengetahui lebih jauh tentang komitmen dan pandangan beliau terhadap Jabatan Fungsional Perencana, serta Visi dan Misi beliau terhadap Pusbindiklatren yang sekarang di pimpinnya. dalam suasana sore yang santai. Berikut petikan wawancara dengan beliau :





Wartawan Simpul Perencana sedang mewawancarai Bpk. Aviv

Sebagai Kepala Pusbindiklatren yang baru, apa kesan Bapak tentang Jabatan Fungsional Perencana yang sudah berjalan sekitar 6 tahun ini

Saya merasa kaget dan prihatin setelah menyimpulkan keluhan keluhan para JFP (perencana), baik dari level nasional maupun dari berbagai daerah yang merasa tidak mendapatkan apresiasi yang setimpal dari para pimpinan pemerintahan, terutama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan pengalaman demikian, terlihat suatu fenomena terbalik peranan strategis perencana disisi rendahnya apresiasi pejabat struktural dan anggota legislatif terhadap mereka. Dengan demikian wajarlah kalau mayoritas PNS memilih jabatan struktural dari pada JFP (perencana). Tidak terlihat adanya kharisma dan kebanggaan aparatur pemerintah yang menjadi JFP apalagi aparatur yang menjabat jabatan struktural.

Menurut bapak, apa kiranya hasil yang telah diberikan para Pejabat Fungsional, dan apa kendala yang mereka hadapi dalam merealisasikan ide-idenya tentang sebuah Perencanaan bila mengacu kepada kebijakan pemerintah yang ada.

Pada dasarnya telah banyak perencanaan yang mereka hasilkan untuk pembangunan bangsa, minimal melalui unit kerjanya masing-masing. Disisi lain banyak kendala yang mereka hadapi dalam merealisasikan ide-ide tersebut, dan yang paling memprihatinkan adanya keluhan perencana yang merasa hasil perencanaan yang diproses secara sistimatis dan evidencebased diacak acak anggota legislatif yang kolusi dengan beberapa pegawai negeri oportunist pada saat proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang kurang maksimal dari pimpinan mereka. Secara

politis, ada beberapa peraturan perundangan yang memposisikan peranan JFP sangat strategis dan politis. Dalam UU RI No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di tetapkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup perencanaan makro yang meliputi semua bidang kehidupan masyarakat maupun pemerintahan dan politik secara terpadu dalam wilayah Republik Indonesia.

Dalam perspektif politik, proses tersebut merupakan langkah politik bangsa karena mendisain fungsi pemerintahan, yang mengikat kegiatan kemasyarakatan dan kehidupan warga negara di wilayah negara. Secara politis, realita ini merupakan legitimasi politik terhadap langkah politis perencana yang sangat strategis, karena berimplikasi lahirnya tatanan kebijakan kebijakan publik yang akan mengikat pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan untuk hajat hidup rakyat banyak.

Dari pandangan Bapak yang seperti itu, langkah-langkah apa yang harus di ambil oleh PUSBINDIKLATREN sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, maka perlu disusun langkah langkah edukatif dan strategis dari Pusbindiklatren guna mengembangkan potensi JFP dengan paradigma baru JFP yang professional dan kharismatis, baik dalam pemerintahan maupun dalam perspektif politik pembangunan. Paradigma baru JFP ini penting dibangun sebagai wujud dari profesionalisasi JFP menjadi perencana yang handal, kompeten dan mempunyai kepemimpinan true professional yang tangguh terhadap infiltrasi politik sempit dan oportunistis

Mungkin bisa Bapak jelaskan secara detail Langkah Strategis dari PUSBINDIKLATREN tersebut

Guna mengembangkan paradigma JFP ke arah true professional dan kharismatis seperti yang diharapkan tersebut, ada dua agenda strategis yang harus dilaksanakan oleh Pusbindiklatren.

a. Professionalisasi JFP

Merupakan proses pembinaan dan pengembangan kompetensi JFP dalam perspektif; (1) cognitive domain dengan memperkaya ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi; (2) Psycho motor main untuk meningkatkan keterampilan manajemen perencanaan; dan (3) affective domain untuk meningkatkan leadership yang dilandasi oleh nilai sosial, agama, dan etika profesi.

Secara manajerial, proses profesionalisasi tersebut dilaksanakan melalui program pendidikan gelar maupun non gelar, program diklat substantif dan program diklat penjurusan.

b. Pembinaan carrier planning

Merupakan program pengembangan kompetensi JFP yang bersifat vertikal melalui proses penjurusan jabatan dalam escalasi JFP pertama, muda, madya dan utama

Dari Dua agenda besar Pusbindiklatren tersebut kemungkinan permasalahan apa yang akan muncul

Dari dua agenda utama Pusbindiklatren, dirasakan adanya masalah dalam proses pembinaan carrier planning. Walaupun proses pembinaan berjalan sangat normatif, melalui proses pendidikan, program diklat substantif maupun diklat penjurusan, kenyataannya dari balik proses edukatif tersebut lahir predisposing faktor yang bersifat anomali .

Secara biologis, predisposing factor merupakan faktor yang alami (inherent) yang bersifat pemicu (trigger) dan bersifat escalatif (inclined). Ternyata dalam proses pembinaan alur carrier planning JFP yang bersifat vertikal sifat ini menjadi anomali.

Mengapa bisa bapak katakan permasalahan tersebut bersifat anomali

Saya anggap anomali karena tidak ada apresiasi yang eskalatif dan bermakna dari kepala pemerintahan, maupun dari para pejabat yang ada di dewan jabatan terhadap alur carrier planning JFP. Menurut saya, tunjangan fungsional yang diatur keppres relatif kurang apresiatif, karena tidak bermakna terhadap daya beli pegawai negeri.

Dengan demikian insentif dalam bentuk uang bukan penawar untuk menghilangkan sifat anomali tersebut. Malahan sifat anomali tersebut makin kentara, bila dilihat dari indikator makin kuatnya orientasi para pegawai negeri kepada jabatan struktural, dan meremehkan carrier planning jabatan fungsional.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, langkah apa sekiranya yang harus di ambil oleh Pusbindiklatren itu sendiri.

Kondisi demikian sulit untuk bisa dipertanggung jawabkan secara moral. Oleh karena itu perlu dipersiapkan agenda ketiga yaitu agenda untuk meningkatkan eksistensi JFP secara integratif melalui ; (1) kegiatan sosialisasi eksistensi JFP; (2) Pilot Project Leadership Training For Planner; (3) upaya perlindungan profesi perencana.

Agenda ketiga ini penting untuk dilaksanakan secara integratif guna menyadarkan semua pihak bahwa JFP strategis, karena akan memproses tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan aspirasi dan kebijakan politik yang diperhitungkan berdasarkan sumber daya yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, maka target agenda ketiga tersebut harus melahirkan kebijakan yang berdampak compulsory terhadap para pemegang kebijakan publik untuk menjadikan JFP sebagai salah satu syarat pokok (requirement) untuk kenaikan jabatan struktural.

(simpul)



foto-foto dok.PROGRAM DIKLAT GELAR & NON GELAR
PUSBINDKLATREN-BAPPENAS T.A. 2007

A. Latar Belakang

Sesuai Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. KEP. 050/M.PPN/03/2002, Pusbindiklatren Bappenas memiliki tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), dan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan bagi Kantor Kementerian Negara PPN/Bappenas dan perencana pusat dan daerah dalam meningkatkan kompetensi perencana dan kapasitas institusi perencana di pusat dan daerah. Ruang lingkup tugas utama Pusbindiklatren adalah (1) pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), dan (2) pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana. Sedangkan dari sasaran yang dituju dari kegiatan ini adalah PNS perencana yang berada di Pusat dan Daerah serta lembaga perencanaan di pusat dan di daerah, termasuk para perencana yang berada di lingkungan Bappenas, dan Bappenas sendiri sebagai institusi perencanaan pusat. Dalam melaksanakan tupoksinya ini, Pusbindiklatren telah mengembangkan berbagai bentuk dan jenis kegiatan, antara lain program pendidikan dan

pelatihan, yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi dan institusi/ lembaga di bidang pendidikan baik nasional maupun internasional.

Penyelenggaraan program pendidikan ini telah dilaksanakan sejak tahun 1984, baik untuk program gelar maupun non-gelar di luar maupun di dalam negeri. Sampai dengan tahun 2005, jumlah peserta program pendidikan dan pelatihan Bappenas adalah 9474 orang, yang meliputi 259 alumni program Doktor luar negeri, 1.504 alumni program Master luar negeri, 284 alumni program Master dalam negeri, dan 2.776 alumni program non-gelar luar negeri, serta 4.367 alumni program non-gelar dalam negeri. Dalam penyelenggaraan program pendidikan gelar di dalam negeri bagi PNS khususnya para perencana pemerintah ini, Pusbindiklatren Bappenas telah bekerjasama dengan 18 (delapan belas) program studi dari 11 (sebelas) universitas negeri, sedangkan untuk program diklat non-gelar, kerjasama yang telah dibangun meliputi lebih dari 20 institusi pendidikan

Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Koordinasi Program Diklat Gelar & Non Gelar Pusbindiklatren-Bappenas T.a. 2007



dari berbagai daerah di tanah air.

Mengingat besarnya tugas dan tanggung jawab Pusbindiklatren yang sedemikian besar, maka untuk dapat melaksanakan program/kegiatan Pusbindiklatren tahun anggaran 2007 yang terintegrasi, terkoordinasi, dan terfokus, maka perlu dilakukan kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Diklat Gelar dan Non-gelar Pusbindiklatren Tahun Anggaran 2007.

B. Tujuan

Tujuan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Diklat Gelar dan Non-gelar Pusbindiklatren tahun anggaran 2007 adalah untuk:

1. Menyamakan persepsi para penyelenggara diklat;
2. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan serta mencari pemecahan masalah terhadap pelaksanaan program/kegiatan diklat yang akan dilaksanakan oleh Pusbindiklatren maupun para Pengelola Diklat;

3. Mengkoordinasikan program / kegiatan-kegiatan agar terfokus dan tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan yang lain;
4. Merumuskan jadwal dan rencana tindak lanjut.

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Rapat Koordinasi ini adalah:

1. Penyampaian rencana program/kegiatan diklat gelar dan non-gelar untuk tahun anggaran 2007;
2. Pembahasan mekanisme pelaksanaan diklat gelar dan non-gelar serta mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul;
3. Koordinasi program/kegiatan-kegiatan agar terfokus dan tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan yang lain;
4. Perumusan jadwal dan rencana tindak lanjut.

D. Keluaran Yang Diharapkan

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

1. Adanya persamaan persepsi tentang mekanisme dan program/ kegiatan diklat diantara para penyelenggara diklat;
2. Teridentifikasi permasalahan dan hambatan guna mengantisipasi masalah terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan;
3. Adanya format koordinasi program/ kegiatan-kegiatan agar terfokus dan tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan yang lain;
4. Jadwal dan rencana tindak lanjut.

E. Acara Rakor

Rakor Program Diklat Gelar dan Non Gelar dilaksanakan mulai pukul 09.30 WIB sampai dengan pukul 1700 WIB, pada hari Kamis, 29 Maret 2007 di Ruang Rapat Subadra dan Utari, Hotel Bidakara Jakarta. Acara kegiatan Rakor adalah sebagai berikut :

09.00 – 09.30	Registrasi
09.30 – 09.45	Pembukaan Program Gelar dan Non-Gelar
09.45 – 11.45	Penjelasan Proses dan Jadwal Diklat Gelar dan Non Gelar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleksi, penempatan, interview (DD Belanda, Perancis, Jepang, Kelas Internasional UNSYIAH, & S2 13 bulan); 2. Jadwal Diklat, Pelaksanaan EAP dan maintenance bahasa; 3. Mekanisme Pembiayaan untuk Prodi dan peserta (ketentuan, jadwal dan kelengkapan dokumen); 4. Fungsi EEO dan PFM serta pelaksanaannya;
11.45 - 12:30	Penandatanganan MoU
12:30 - 13:30	ISHOMA

13.30 - 16.30 Pisah Ruangan:

I. Ruang Subadra untuk Diklat Gelar DD:

1. Pembahasan peserta DD;
2. Tandatangani surat pernyataan bermaterai;
3. Tandatangani surat serah terima dan daftar peserta DD;

II. Ruang Utari untuk Diklat Non Gelar:

1. Surat konfirmasi pelaksanaan diklat non gelar;
2. Konfirmasi/serah terima peserta diklat JFP;

16.30 - 1700 Penutup

F. Peserta Rakor

I. Pengelola Program Studi S2 13 Bulan:

1. MIESP UNSYIAH
2. MPP UNAND
3. MAP UNSRI
4. MPKP UI
5. PPIE UI
6. MSIPW IPB
7. MEPP UNPAD
8. MILH UNPAD
9. MSP ITB
10. MPWK ITB
11. MPKD UGM
12. MEP UGM
13. MAP UGM
14. MPWK UNDIP
15. MIL UNDIP
16. MIA UNIBRAW
17. MSKMP UNHAS
18. MIE UNSRI (Cost Sharing IV)
19. MAP UNSRI (Cost Sharing IV)
20. FH UNPAD (Cost Sharing IV)

II. Pengelola Program Studi S2 Double Degree:

1. UNSRI –Belanda
2. PPIE UI – Belanda dan Jepang

3. MPWK ITB - Belanda dan Jepang
4. MPKD UGM – Belanda dan Jepang
5. Geography UGM - Belanda
6. MEP UGM – Jepang
7. MPWK UNDIP - Perancis
8. MAP UNIBRAW – Jepang

III. Pengelola Diklat Non Gelar Substantive dan JFP:

1. PPS UNSYIAH;
2. FE UNSYIAH;
3. FE UNAND;
4. PPS UNSRI;
5. LPEM FE-UI;
6. P3WI ITB;
7. MPKD UGM;
8. MAP UGM;
9. RCCP UNIBRAW;
10. PSKMP UNHAS
11. MEPP UNPAD
12. PSKK UGM
13. TAHTA UNDIP
14. Planologi JFP ITB
15. UNIV. TADULAKO
16. UNIV. TANJUNG PURA
17. UNIV. LAMBUNG MANGKURAT
18. UNIV. CENDRAWASIH
19. UNIV. RIAU
20. LEMTEK UI

IV. Pengelola Pusat Bahasa:

1. UNSYIAH
2. UNSRI
3. ITB
4. UGM
5. UNIBRAW
6. ELS

G. Narasumber

Nara Sumber dalam kegiatan ini adalah:

- a. Kapusbindiklatren Bappenas
- b. Kepala Bidang Pusbindiklatren
- c. Pejabat Fungsional Perencana Pusbindiklatren

H. Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan secara swakelola dengan bentuk dan tahapan sbb:

1. Penyampaian Kebijakan Umum Pusbindiklatren tahun anggaran 2007;
2. Penyampaian Rencana Kegiatan Diklat Gelar dan Non-gelar untuk TA 2007;
3. Pembahasan mekanisme pelaksanaan diklat dan antisipasi masalah melalui diskusi;
4. Perumusan hasil berupa saran dan masukan, penyempurnaan, dan pemecahan masalah yang tertuang dalam Rencana Tindak Lanjut;
5. Tersusunnya jadwal penyelenggaraan diklat gelar dan non-gelar TA 2007

I. Pembiayaan

Biaya kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Diklat Gelar dan Non-gelar bersumber dari DIPA Kantor Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Tahun Anggaran 2007 pada Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Diklat Penilaian Angka Kredit JFP Pemrov Jabar

Salah satu kegiatan penting dalam pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) adalah proses penilaian prestasi kerja ke dalam Angka Kredit yang dilakukan oleh Tim Penilai Angka Kredit. Angka Kredit adalah besaran yang digunakan untuk mengukur prestasi kerja perencana dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna para aparatur negara, khususnya yang bertugas melakukan kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan demikian fungsi Tim Penilai Angka Kredit adalah memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan perencana ke dalam angka kredit sangat penting. Tim Penilai juga membantu tugas-tugas pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit bagi pejabat Perencana.

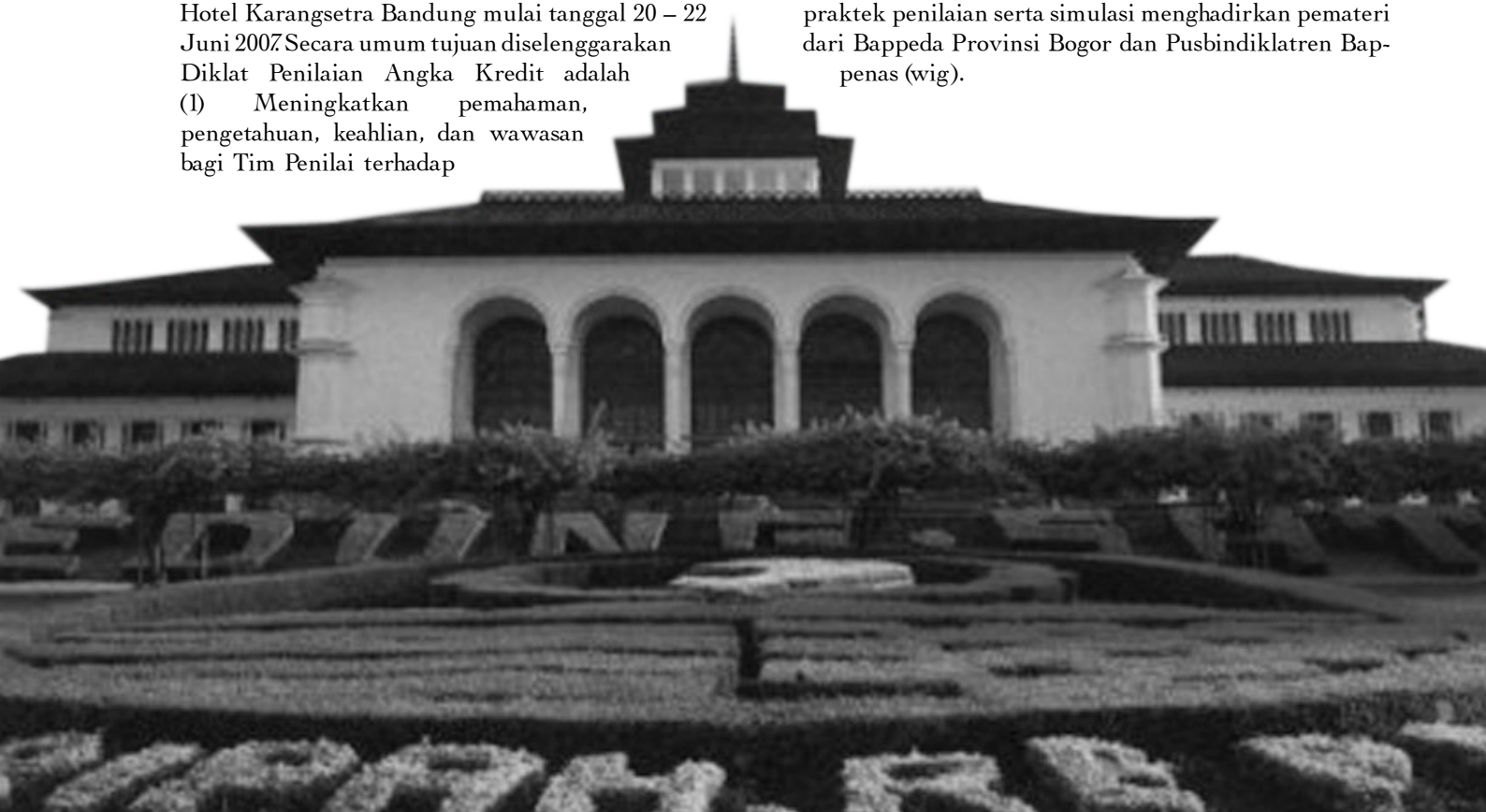
Menyadari pentingnya peran tersebut, pemerintah provinsi Jawa Barat untuk yang kedua kalinya melaksanakan Diklat Penilaian Angka Kredit Perencana untuk Tim Penilai Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota se Jawa Barat. Diklat ini dilaksanakan di Hotel Karangsetra Bandung mulai tanggal 20 – 22 Juni 2007. Secara umum tujuan diselenggarakan Diklat Penilaian Angka Kredit adalah

- (1) Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, keahlian, dan wawasan bagi Tim Penilai terhadap

unsur-unsur kegiatan perencanaan dan penilaian angka kredit, (2) Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir bagi Tim Penilai Pusat, Instansi, Propinsi, maupun Kabupaten/Kota dalam kegiatan penilaian angka kredit, dan (3) Meningkatkan pemahaman terhadap peraturan dan ketentuan JFP bagi Tim Penilai dalam rangka pelaksanaan JFP.

Beberapa materi penting yang diajarkan diantaranya adalah konsep JFP, konsep dasar perencanaan, organisasi dan tata kerja Tim Penilai Angka Kredit Perencana, etika penilaian angka kredit perencana, penilaian kegiatan pendidikan dan pengembangan profesi, kegiatan Perencanaan dan kegiatan penunjang. Materi penting lainnya adalah penyusunan laporan penilaian kegiatan angka kredit perencana dan praktek penilaian angka kredit perencana.

Diklat yang menggunakan metode pembelajaran melalui ceramah di kelas, pendalaman materi, diskusi dan praktek penilaian serta simulasi menghadirkan pemateri dari Bappeda Provinsi Bogor dan Pusbindiklatren Bappenas (wig).



Kerjasama antara Bappenas-ENA Perancis: Diklat Kepemimpinan bagi Perencana



Penyusunan kurikulum Dikpim Perencana: Para ahli dari BKN, LAN, Menpan, Universitas dan Bappenas membahas kurikulum Diklat yang dihadiri oleh Alain Billon dari ENA Perancis.

Bappenas sebagai instansi pembina jabatan fungsional perencana bertanggungjawab untuk meningkatkan kompetensi para perencana dalam menghadapi era globalisasi. Sehubungan dengan hal itu, Bappenas bersama LAN, BKN, dan Menpan bekerjasama dengan Pemerintah Perancis (Ecole Nationale d'Administration/ENA) sedang mengembangkan Pilot Project Diklat Kepemimpinan (Dikpim) Perencana bagi calon pemimpin unit kerja perencanaan baik di pusat maupun di daerah.

Adapun kesepakatan yang telah dicapai dengan pemerintah Perancis, sebagai berikut:

1. Penyusunan kurikulum yang dirumuskan bersama LAN, BKN, Menpan, dan Expert dari ENA (telah berhasil disepakati tanggal 11 Juni 2007);
2. Training of Trainer (TOT) bagi calon pengajar pilot project akan dilaksanakan di Jakarta tanggal 11 s.d. 13 Juli 2007 dan dilanjutkan di ENA-Perancis selama 7 hari pada tanggal 14 s.d. 20 Juli 2007. Peserta TOT berasal dari LAN, BKN, Bappenas, dan Para Penyelenggara Diklat FPP;
3. Pilot Project Dikpim Perencana disetujui untuk dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus s.d. 2 September 2007 dilanjutkan di ENA-Perancis, pada tanggal 3 s.d. 9 September 2007 dan di Jakarta lagi pada tanggal 10 s.d. 15 September 2007. Peserta

Pilot Project Dikpim Perencana adalah calon pemimpin di unit kerja perencanaan baik pusat maupun daerah.

4. Dalam rangka pelaksanaan Pilot Project Dikpim Perencana, telah disepakati skema pembiayaan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Perancis akan membiayai tuition fee dan asuransi peserta selama pelatihan di Perancis;
 - b. Bappenas akan membiayai tuition fee dan akomodasi peserta selama pelatihan di Indonesia; dan
 - c. Instansi pengirim peserta akan membiayai transport dalam negeri dan luar negeri (PP) dan akomodasi peserta selama pelatihan di Perancis.

Bagi para perencana, terutama pejabat fungsional perencana baik di pusat dan di daerah dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kompetensi mereka. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pusbindiklatren (wig).

TOT Dikpim Perencana

Sebagai rangkaian kegiatan pengembangan Pilot Project Dikpim Perencana, maka untuk mempersiapkan tenaga pengajar pada Diklat tersebut diselenggarakan Training of Trainer (TOT) yang dilaksanakan di Jakarta tanggal 11 s.d. 13 Juli 2007 dan dilanjutkan di ENA-Perancis selama 7 (tujuh) hari pada tanggal 14 s.d. 20 Juli 2007 Peserta TOT berasal dari LAN, BKN, Bappenas, beberapa Pemerintah Provinsi dan Perguruan Tinggi Negeri Penyelenggara Diklat FPP. Dibawah ini adalah nama-nama peserta TOT Dikpim Perencana:

1. Mustopadidjaja AR Bappenas
2. Hera Susanti, LPEM-UI
3. Guspika, Bappenas
4. Dida Heryadi Salya, Bappenas
5. Herry Darwanto, Bappenas
6. Binsar PHN, MPWK ITB
7. Mohammad Taufiq, LAN
8. Budiono, MEPPUNPAD
9. Agus Pramusinto, MAP UGM
10. Bakti Setiawan, MPKD UGM
11. Purwatiningsih Lisdiono LPEM-UI
12. Setiawan Wangsaatmaja, Pemprov Jabar
13. Yusuf Bacheudin, Pemprov DKI
14. Susy Setiawati Pemprov DKI

Para peserta TOT tersebut diharapkan menjadi tenaga pengajar tetap pada Pilot Project Dikpim Perencana yang akan dilaksanakan tanggal 2 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 15 September 2007 (wig).

Sekilas ENA: Sekolah untuk PNS



Ecole Nationale d'Administration (ENA) atau French National School of Administration didirikan oleh General de Gaulle pada Oktober 1945 (sumber website resmi ENA). Pada dasarnya tujuan didirikannya lembaga ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pegawai negeri dan memberikan pelatihan untuk mempersiapkan lulusannya dalam melaksanakan tugas pokoknya. Secara formal, ENA adalah lembaga pemerintah Perancis yang berpusat di Strasbourg. Namun demikian beberapa kegiatan pendidikan terutama yang terkait dengan kerjasama internasional dilaksanakan di kantor cabang di Paris.

Dalam melaksanakan program pendidikannya, lembaga ini menerapkan penanaman etika Pegawai negeri kepada lulusannya berdasarkan nilai-nilai tanggung jawab, netral pada politik dan pelayanan umum. Pada inti program pendidikannya, lembaga ini berpegang pada prinsip untuk selalu merespon secara effective terhadap perkembangan dan tantangan yang diinginkan oleh masyarakat Perancis terhadap kinerja pemerintahan yang lebih baik.

ENA adalah lembaga pendidikan yang dipersiapkan untuk mendidikan SDM pemerintah atau pelayanan umum baik di Perancis, Eropa dan negara-negara lainnya. Oleh karena itu program pendidikan di ENA adalah multidisipliner, karena pada dasarnya kurikulumnya selalu disesuaikan dengan perkembangan jaman dan berdasarkan

karakteristik wilayah-wilayah. Dua keahlian yang menjadi inti dari kurikulum di lembaga ini adalah keahlian secara umum tentang pemerintahan seperti hukum, keuangan negara, ekonomi terapan, perkembangan Eropa, administrasi pemerintahan dan E-government. Sedangkan keahlian yang kedua adalah public-sector management termasuk manajemen tim dan proyek, monitoring dan evaluasi, sumber daya manusia dan perkembangan lingkungan.

Karena ENA adalah lembaga pendidikan profesional yang bersifat terbuka terhadap dimensi-dimensi ilmu administrasi, metode pembelajaran yang dikembangkan adalah pedagogical approach yang telah diakui dan digunakan secara luas secara internasional. Beberapa metode pembelajaran seperti on-the job training, case studies, classroom work dan simulation exercises.

Setiap tahun ENA menerima kurang lebih 120 mahasiswa baru untuk program 27 bulan dan kurang lebih 2,500 pegawai negeri sipil dan eksekutif bisnis yang melanjutkan program pendidikan. Lebih dari 100 orang yang berasal dari berbagai negara yang melanjutkan pendidikan di lembaga ini (wig).

Kesempatan Diklat Ke Perancis

Sebagai bagian dari kegiatan Pilot Project Dikpim Perencana, sejak tanggal 25 Juni 2007 Pusbindiklatren Bappenas telah mengirimkan surat penawaran untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan bagi Perencana di Indonesia dan Perancis. Diklat ini akan dilaksanakan di Jakarta mulai tanggal 2 Agustus s/d 2 September 2007 yang dilanjutkan di Perancis tanggal 3- 9 September 2007 dan kembali dilaksanakan di Indonesia tanggal 10 s/d 15 September 2007. Informasi mengenai penawaran ini dapat dilihat di website Pusbindiklatren atau ke BKD atau Bappeda bagi pemerintah provinsi dan Kabutaen/Kota serta Kepala Biro Perencanaan bagi perencana di instansi pusat. Untuk lebih lengkapnya berikut ini disampaikan surat penawaran yang dimaksud.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
JALAN TAMAN SUROPATI NO.2, JAKARTA 10310
TELPON: (62-21) 31936207, 3905650

Nomor : 3617/P.01/06/2007 25 Juni 2007
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Pencalonan Peserta Pilot Project
Dikpim Perencana

LPND

Kepala Bappeda
dan BKD Propinsi/Kabupaten/Kota,

Kepada Yth.
1. Kepala Biro Perencanaan dan
Kepegawaian, Departemen/

2. Kepala Biro Perencanaan/

(terlampir)

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Bappenas sebagai instansi pembina jabatan fungsional perencana bertanggungjawab untuk meningkatkan kompetensi para perencana dalam menghadapi era globalisasi. Sehubungan dengan hal itu, Bappenas bersama LAN, BKN, dan Menpan bekerjasama dengan Pemerintah Perancis (Ecole Nationale d'Administration/ENA) sedang mengembangkan Pilot Project Diklat Kepemimpinan (Dikpim) Perencana bagi calon pemimpin unit kerja perencanaan baik di pusat maupun di daerah.

Pilot Project tersebut diselenggarakan melalui agenda kegiatan sebagai berikut:

1. Training di Indonesia, 2 Agustus s/d 2 September 2007 diselenggarakan di Jakarta;
2. Training di ENA, 3 s/d 9 September 2007 diselenggarakan di Perancis, dan;
3. Training di Indonesia, 10 s/d 15 September 2007 diselenggarakan di Jakarta.
4. Pilot project tersebut dibiayai melalui skema cost sharing dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Perancis akan membiayai tuition fee dan asuransi peserta selama pelatihan di Perancis;
 - b. Bappenas akan membiayai tuition fee dan akomodasi peserta selama pelatihan di Indonesia; dan
 - c. Instansi pengirim peserta akan membiayai transport dalam negeri dan luar negeri (PP) serta akomodasi peserta selama pelatihan di Perancis.
5. Syarat-syarat peserta sebagai berikut:
 - a. Latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya S-2/Master;
 - b. Perencana Muda golongan III/d atau pernah mengikuti Diklat JFP Madya, atau pejabat struktural eselon III yang pernah memangku jabatan Fungsional Perencana Muda;
 - c. Golongan sekurang-kurangnya III/d;
 - d. Mampu berbahasa Inggris (Institutional TOEFL minimal 450);
 - e. Bersedia menjadi peserta program pilot project dikpim perencana;
 - f. Bersedia menanggung biaya cost sharing berupa: tiket perjalanan domestik dan internasional, dan akomodasi selama di Perancis (tujuh hari).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami mohon kesediaan Saudara untuk mengusulkan 1 (satu) orang pegawai di unit kerja Saudara sebagai peserta program Pilot Project tersebut.

Surat pencalonan peserta dan dokumen pendukungnya mohon disampaikan ke Pusbindiklatren-Bappenas, Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat paling lambat tanggal 23 Juli 2007. Penjelasan lebih lanjut mengenai program pilot project Dikpim Perencana ini dapat menghubungi staf kami, Sdr. Haryanto/Guspika, telp: 021-31931234 / 319311447, faks. 021-31931392.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan,
Pendidikan dan Pelatihan
Perencana,

ttd

Dr. Avip Syaefullah, drg.
M.Pd
NIP. 130 779 421

Tembusan Yth.:
Bapak Sesmeneg PPN/Sestama BAPPENAS

Rakor Penguatan Eksistensi JFP se Jawa



Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana, Bappeda Provinsi Jawa Tengah mengambil inisiatif menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penguatan Eksistensi dan Pengembangan Kompetensi Fungsional Perencana. Hadir pada acara yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2007 adalah peserta dari provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan DIY Yogyakarta serta utusan dari pemerintah kabupaten/kota se Jawa Tengah. Masing-masing provinsi dan kabupaten/kota mengirimkan peserta yang berasal dari Kepegawaian dan Bappeda serta para pejabat fungsional perencana di masing-masing institusi. Narasumber yang hadir dalam acara tersebut adalah DR. Avip Syaefullah, drg, MPd, Kepala Pusbindiklatren Bappenas, dr. Hanung Sugihantono Wakil Kepala Bappeda Jawa Tengah dan Drs. Agus kepala BKD Jawa Tengah. Acara juga diisi dengan sharing pengalaman penanggungjawab JFP di Jawa Barat dan Jawa Timur yang disampaikan oleh Ibu Een dari Jawa Barat dan Bapak Dani Bastian dari Jawa Timur.

Beberapa isu yang muncul dari acara koordinasi tersebut sangat beragam mulai dari komitmen pimpinan sampai pada teknis administrative dalam pelaksanaan JFP. Beberapa peserta misalnya mengeluhkan rendahnya komitmen pimpinan yang terkait dengan pelaksanaan JFP. Contohnya beberapa pimpinan masih memandang sebelah mata keberadaan JFP, padahal JFP dikembangkan berdasarkan peraturan yang sah. Beberapa pejabat fungsional perencana mengeluhkan para pejabat

struktural tidak membagi pekerjaan kepada para pejabat fungsional, sehingga mereka tidak dapat mengumpulkan angka kredit. Tidak adanya anggaran secara khusus juga menjadi kendala pelaksanaan JFP.

Permasalahan lain yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan JFP adalah pemahaman para penanggungjawab JFP yang masih berbeda-beda, sehingga dalam pelaksanaannya mereka masih ragu-ragu untuk melaksanakan JFP di daerah masing-masing. Masalah struktur organisasi yang memayungi para pejabat fungsional perencana yang belum jelas juga masih membingungkan beberapa daerah. Masalah lain seperti keterbatasan Diklat JFP diharapkan ke depan dapat diatasi oleh Bappenas dan beberapa daerah, sehingga ada kemudahan untuk mengikuti Diklat yang menjadi prasyarat wajib bagi perencana sebelum menjabat sebagai fungsional perencana.

Secara keseluruhan, peserta menyambut antusias kegiatan sejenis ini karena sangat bermanfaat bagi daerah. Selain acara ini dapat dijadikan sebagai forum komunikasi antar satu daerah dengan daerah lain, acara ini juga dapat menjadi forum untuk menerima masukan dan saran serta usulan untuk penyempurnaan pelaksanaan JFP di masa yang akan datang (Wig).

Mahkamah Agung Tertarik Dengan JFP



Walaupun sampai dengan saat ini Jabatan Fungsional (Jafung) yang dikembangkan dalam sistem birkorasi kita lebih dari 100-an, Jabatan Fungsional Perencana (JFP) tampak menjadi daya tarik tersendiri bagi lembaga-lembaga tertentu. Seperti halnya lembaga Mahkamah Agung. Baru-baru ini biro kepegawaian MA menyelenggarakan diseminasi tentang efektifitas pengelolaan kepegawaian yang berada di lingkup peradilan beberapa wilayah di Indonesia dan salah satu materinya dalam acara tersebut adalah JFP. Dalam rangka itu maka beberapa staf Pusbindiklatren diundang untuk menjadi pemateri dalam acara tersebut yang dilaksanakan di Medan, Surabaya, Banda Aceh dan Mataram. JFP walaupun baru dikembangkan dalam lima tahun belakangan ini, sudah dianggap memiliki aturan yang jelas mengenai system dan mekanisme serta aturan ke-diklatannya. Selain peserta mengharapkan bagaimana tata cara pengelolaan JFP yang efektif, diharapkan ke depan di lingkungan MA juga akan dikembangkan jabatan fungsional untuk meningkatkan profesional pegawai di lingkungan MA di seluruh Indonesia. Seperti diketahui sampai dengan saat ini, JFP telah memiliki 14 jenis peraturan mulai dari Keputusan Presiden sampai dengan edaran dari Dirjen Keuangan. Namun demikian JFP sampai dengan saat ini masih belum dapat menyelesaikan peraturan tentang Batas Usia Pensiun (BUP) untuk JFP. Diharapkan tahun 2008 nanti BUP JFP sudah dapat diselesaikan (wig).

Beasiswa Gelar Pusbindiklatren - Bappenas Tahun 2008



REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
JALAN TAMAN SUROPATI 2, JAKARTA 10310
TELEPON : 31936207 - 3905650

Nomor : 3036/Ses/06/2007 4 Juni 2007
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : **Informasi Beasiswa Gelar
Pusbindiklatren Bappenas
Tahun 2008**

- Kepada Yth;
1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Departemen/LPND;
 2. Deputi Sumber Daya Manusia POLRI;
 3. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (daftar terlampir)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas institusi perencanaan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui peningkatan potensi SDM di dalamnya serta sejalan dengan fungsi Bappenas sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana, maka Bappenas pada Anggaran Tahun Dinas 2008 Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas kembali memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi staf perencana yang bekerja di Bappenas, Unit Perencanaan di Departemen/LPND, Bappeda atau nama lain, dan unit perencanaan di Dinas Teknis pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk memperoleh Beasiswa Gelar Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2008 untuk program : (a) S2 Dalam Negeri 13 Bulan; (b) S2 *Double Degree*, (c) S2 Luar Negeri, S3 Dalam Negeri dan (d) S3 *Linkage*.

Untuk seleksi beasiswa tahun 2008 dan seterusnya, Pusbindiklatren Bappenas membuka kesempatan menyampaikan usulan calon peserta melalui pendaftaran sepanjang tahun. Dengan demikian, dimulai dengan seleksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2007 ini, selanjutnya Pusbindiklatren Bappenas akan memiliki jadwal tetap, yaitu untuk pelaksanaan TPA setiap bulan Oktober-November dan pelaksanaan TOEFL setiap bulan November-Desember.

NO	KEGIATAN	JADWAL UNTUK PROGRAM S2 DD, S2 DN, S2 LN, S3 DN, S3 LINKAGE
1	Surat Edaran Sesmen	8 Juni 2007
2	Batas pengajuan usulan untuk TPA tahun 2007	28 September 2007
3	TPA Nasional	3 November 2007
4	TOEFL Nasional	1 Desember 2007
5	BEAP	Juli - Sept 2008 dan/atau Okt - Des 2008
6	EAP	M II Feb s.d. M II Agustus 2008

Dengan dikeluarkannya informasi jadwal pelaksanaan seleksi yang baru ini berarti jadwal pelaksanaan seleksi yang pernah diinformasikan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.

Sedangkan proses pengusulan peserta sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu secara resmi diusulkan oleh instansi asalnya melalui pejabat pengelola kepegawaian atau atasan langsung (minimal eselon II) dalam surat yang menyebutkan nama-nama pegawai yang diusulkan oleh instansi dan program beasiswa gelar yang diminati. Kriteria pelamar beasiswa program gelar Pusbindiklatren bappenas adalah PNS yang memenuhi syarat sesuai yang tercantum pada Buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan dan Pelaksanaan JFP 2007 dan belum pernah mengambil/memiliki gelar S2 untuk yang melamar beasiswa S2 serta belum pernah mengambil/memiliki gelar S3 untuk yang melamar beasiswa S3.

Mengingat terbatasnya dana, beasiswa Pusbindiklatren Bappenas ini dilaksanakan selain melalui mekanisme *cost sharing* tipe I (lampiran 3), mulai tahun 2006 yang lalu khusus untuk S2 13 Bulan Dalam Negeri juga dibuka kemungkinan melalui mekanisme *cost sharing* tipe IV dengan penjelasan rinci sebagaimana terlampir (lampiran 4). *Cost Sharing* tipe IV diberikan apabila peserta yang memenuhi syarat melampaui quota peserta per universitas (15-20 peserta per universitas).

Informasi mengenai persyaratan peserta, selain dapat dilihat dalam Buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana, yang secara singkat disajikan dalam lembar Informasi Program Beasiswa Pusbindiklatren Tahun 2008 (lampiran 1). Untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut silakan menghubungi (021) 31931465, 31931447, 31931234, 3103705, e-mail: pusbindiklatren@bappenas.go.id, atau melihat informasi pada situs Pusbindiklatren, Bappenas melalui situs: <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id>.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,


Ir. Syahril Loetan, MCP

Tembusan Yth.:

1. Bapak Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
2. Gubernur/Walikota/Bupati;
3. Biro/Bagian Kepegawaian Departemen/LPND/POLRI;
4. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. PPK PSDMA Bappenas.

Program Beasiswa Yang Ditawarkan

I. Program Pendidikan Gelar

1. Program S2 Double Degree
2. Program S2 13 Bulan Dalam Negeri
3. Program S2 Internasional, UNSYIAH, NAD
(Dosen berasal dari Belanda dan Jepang)
4. Program S2 Luar Negeri
5. Program S3 Linkage
6. Program S3 Dalam Negeri

II. Program Diklat Non-Gelar Substantif (Cost Sharing IV)

1. Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Pemantauan dan Evaluasi Program dan Proyek
3. Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
4. Perencanaan Tata Ruang
5. Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Daerah Pesisir
6. Pengelolaan Hibah dan Pinjaman Luar Negeri
7. Perencanaan Investasi Daerah
8. Perencanaan Transportasi
9. Perencanaan Sosial

III. Program Magang

Program Magang atau joint research, yaitu program diklat non konvensional dengan cara bekerja atau melakukan joint research di Bappenas atau instansi perencanaan lainnya selama 3 bulan

IV. Program Diklat Non Gelar JFP dan Penunjang JFP

1. Fungsional Penjenjangan Perencana Pertama
2. Fungsional Penjenjangan Perencana Muda
3. Fungsional Penjenjangan Perencana Madya
4. Fungsional Penjenjangan Perencana Utama
5. TOT Jabatan Fungsional Perencana
6. Administrasi Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Perencana
7. Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Perencana

Pilihan Program Studi

I. Program S2 Double Degree

- A. S-2 Double Degree Belanda
 1. Development Planning and Management MPKD, Universitas Gadjah Mada-Institute for Housing and Urban Development Studies, Rotterdam
 2. Development Planning and Infrastructure Management MPWK, Institut Teknologi Bandung-Rijks Universiteit Groningen
 3. Programme in Economics or Development Economics MIE, Universitas Indonesia - Vrije Universiteit Amsterdam
 4. Programme in Geoinformation for Spatial Planning and Risk Management, Geography, UGM-ITC, Entschede
 5. Integrated Lowland Management PSPL, UNSRI-UNESCO IHE, Delft

B. S-2 Double Degree Perancis:

1. Master of Urban and Regional Development and Urban Planning MPWK, UNDIP - Universite de Paris VIII
2. Master of Urban and Regional Development and Urban Planning MPWK, UNDIP - Universite de Paris X
3. Master of Urban and Regional Development and Coastal Development MPWK, UNDIP -Universite de la Rochelle
4. Master of Urban and Regional Development and Coastal Development MPWK, UNDIP - Universite de Bretagne Oxidentale
5. Master of Urban and Regional Development and Urban Infrastructure Management MPWK, UNDIP - ENTPE

C. S2 Double Degree Jepang:

1. Programme in Economics Universitas Indonesia dengan GRIPS, IUJ, Hiroshima University, Kobe University dan Yokohama University
2. Programme in Development Economics Universitas Gadjah Mada dengan GRIPS, IUJ, Hiroshima University, Kobe University, Takushoku University dan Yokohama University

3. Development Planning and Infrastructure Management Institut Teknologi Bandung dengan GRIPS, Kobe University, Ritsumeikan University dan Keio University
4. Development Planning and Management Universitas Gadjah Mada dengan GRIPS, Keio University, Kobe University, Ritsumeikan University dan Takushoku University
5. Master of Public Administration, Universitas Brawijaya dengan GRIPS, Ritsumeikan University dan Takushoku University

II. Program S-2 13 Bulan Dalam Negeri

1. Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Syiah Kuala
2. Magister Perencanaan Pembangunan, Universitas Andalas
3. Magister Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya
4. Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia
5. Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia
6. Magister Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, Institut Pertanian Bogor
7. Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung
8. Magister Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung
9. Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Universitas Padjadjaran
10. Magister Ilmu Lingkungan Bidang Perencanaan pengelolaan SDA, Universitas Padjadjaran
11. Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro
12. Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro
13. Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada
14. Magister Ekonomi Pembangunan, Universitas Gadjah Mada
15. Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada
16. Magister Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
17. Magister Konsentrasi Studi Manajemen

- Perencanaan, Universitas Hasanuddin
18. Magister Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Sriwijaya. Hanya diselenggarakan dengan mekanisme cost-sharing tipe IV
 19. Program Magister Perencanaan dan Pembangunan Hukum, Universitas Padjadjaran Hanya diselenggarakan dengan mekanisme cost-sharing tipe IV

III. Program S-2 International, UNSYIAH

Program S2 Dalam Negeri yang beberapa mata kuliahnya disampaikan dan disertifikasi oleh profesor dan/atau pengajar dari Belanda dan Jepang

IV. Program S2 Luar Negeri

Peserta akan diberikan Program Pelatihan Persiapan Bahasa English for Academic Purposes (EAP) sekurang-kurangnya selama 5,5 bulan, dan Persiapan Bahasa Perancis bagi yang akan ke Perancis. Setelah mengikuti program EAP dan TOEFL mencapai 550 peserta diberikan kesempatan untuk melamar ke Universitas pilihan di berbagai negara yang diminati, khususnya Belanda, Perancis dan Australia.

V. Program S-3 Linkage

Program S3 Linkage hanya tersedia antara universitas di Indonesia dengan Perancis dan Jepang. Program studi yang tersedia adalah sama dengan program S2 Double Degree Perancis; sedangkan program studi di Jepang juga sama dengan program S2 Double Degree Jepang, kecuali program yang bermitra dengan IUJ karena IUJ adalah universitas yang tidak menyediakan program S3 (Doktor). Skema perkuliahan adalah : tahap persiapan awal/ proposal, penulisan disertasi dan defensi di luar negeri, sementara tahap penulisan draf disertasi dilakukan di Indonesia.

VI. Program S3 Dalam Negeri

Universitas Diponegoro:
Ilmu Ekonomi

Universitas Padjadjaran:
Manajemen Bisnis
Institut Pertanian Bogor:
Ekonomi Pertanian, Penyuluhan Pembangunan,
Sosialisasi Pedesaan, Komunikasi Pembangunan
Pertanian dan Pedesaan

Universitas Gadjah Mada:
Ekonomi, Manajemen,
Kebijakan Publik, Perencanaan Kota dan Daerah

Institut Teknologi Bandung:
Planologi, Teknik dan Manajemen Industri,
Perencanaan Wilayah dan Kota

Universitas Brawijaya:
Ilmu Administrasi, Ilmu Ekonomi

Universitas Indonesia:
Ilmu Ekonomi

PROSEDUR LAMARAN

1. Mereka yang berhak melamar program beasiswa Pusbindiklatren adalah mereka yang memenuhi persyaratan seperti yang disebutkan di tabel, dan belum pernah mengambil/memiliki gelar S2 untuk yang melamar beasiswa S2, serta belum pernah mengambil/memiliki gelar S3 untuk yang melamar beasiswa S3, dengan mengisi formulir pendaftaran dan diusulkan resmi oleh instansi asalnya melalui pejabat pembina kepegawaian atau atasan langsung (minimal eselon II). Surat usulan yang dimaksud harus menyebutkan nama-nama pegawai yang diusulkan oleh instansi, dan program/topik beasiswa yang diminati.
2. Pusbindiklatren mengirimkan formulir pendaftaran ke seluruh pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota melalui Sekda, BKD, dan Ketua Bappeda. Untuk mendapatkan formulir tersebut dapat menghubungi pejabat yang bersangkutan, atau dapat di download pada situs kami: [Http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id](http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id)
3. Pusbindiklatren hanya akan menindaklanjuti formulir pendaftaran yang bermaterai dan bertanda tangan asli dengan persetujuan dari atasan langsung (minimal eselon II). Pusbindiklatren tidak memproses usulan dan formulir yang disampaikan melalui faksimili.
4. Formulir pendaftaran harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu: -Jasah dan transkrip S1/S2 yang telah dilegalisir -Fotokopi SK Pengangkatan PNS 100% pada golongan III/ A, atau SK pengangkatan terakhir yang telah dilegalisir-Khusus bagi para pejabat fungsional perencana harus melampirkan SK jabatan terakhir yang dilegalisir -Pernyataan Rencana Studi (dalam bentuk esai)
5. Formulir dapat disampaikan langsung kepada Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Bappenas ke alamat:

Jl. Taman Suropati No.2 Jakarta 10310
atau dapat dikirimkan melalui pos ke alamat:
Jl. Proklamasi No.70 Jakarta 10320



Persyaratan Calon Peserta

	DIKLAT GELAR								NON - GELAR (termasuk JFP dan Magang)
	S3 DN / S3 LINKAGE	S2 DN	S2 DD	S2 LN				S2 INTERNATIONAL UNSYIAH/ACEH	
				BLD	AUST	JPN	P'CIS		
SYARAT ADMINISTRATIF									
a . Pengusulan dari Instansi	Min UKE II Perencanaan	Min UKE II Perencanaan	Min UKE II Perencanaan	Min UKE II Perencanaan				Min UKE II Perencanaan	Min UKE II Perencanaan
b . Unit Kerja									
c . PNS 100% Gol III / A Minimal	2 thn	2 thn	2 thn	2 thn				2 thn	2 thn
d . Strata Pendidikan Minimal	S2	S1	S1	S1				S1	S1, Gol III / A
e . Minimal Tahun Lulus S1/S2	2 thn	2 thn	2 thn	2 thn				2 thn	2 thn
f . Umur maksimal	40 thn	40 thn	38 thn	42 thn	35 thn	35 thn	35 thn	38 thn	- substantif : 50 thn
g . IPK minimal	3,25	2,50	2,75	2,75	2,90	2,75	3,00	2,75	- JFP : 49 thn
									- Magang : 45 thn
SELEKSI NASIONAL									
a . Test Potensi Akademik (TPA)									Keterangan lebih lengkap dapat dilihat pada Formulir Pendaftaran Calon Peserta Beasiswa Diklat Non-Gelar
- Pusat	565	565	565	565				565	
- Pemda Jawa	565	525	525	525				525	
- Pemda Luar Jawa	565	500	500	500				500	
b . TOEFL Seleksi Minimal	500 / 550	400	450	450				450	
TOEFL Setelah EAP			550	550				500	
c . Wawancara	Menunjukkan Komitmen	Menunjukkan Komitmen	Menunjukkan Komitmen	Menunjukkan Komitmen				Menunjukkan Komitmen	



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310
Telp : (62) (21) 31936207 - 3905650

Nomor : 3004/P.01/05/2007
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Seleksi Program S2 Dalam Negeri
13 Bulan, S3 Dalam Negeri dan Pengembalian
Peserta Tahun 2007

31 Mei 2007

Kepada Yth.
1. Badan/Biro/Bagian Kepegawaian
Provinsi/Kabupaten/Kota,
Departemen/LPND;
2. Badan/Biro/Bagian Kepegawaian
POLRI;
3. Pusdiklat Departemen/LPND;
di tempat

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan seleksi tahap kedua atau tes Bahasa Inggris TOEFL dan wawancara tertulis pada 17 Maret 2007 yang lalu, berikut kami sampaikan hasil seleksi program S2 Dalam Negeri 13 Bulan, S3 Dalam Negeri dan Pengembalian Peserta tahun 2007.

Mereka yang namanya tercantum pada tabel daftar peserta lulus seleksi penempatan adalah yang berhak mengikuti kuliah S2 Dalam Negeri 13 Bulan terhitung mulai bulan Agustus 2007.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mereka diminta untuk :

1. Menghubungi atau menunggu dihubungi oleh masing-masing kontak person dari program studi sesuai daftar terlampir;
2. Mengkonfirmasi kesediaan ataupun keberatan mengikuti program studi yang ditandatangani oleh serendah-rendahnya Pejabat Eselon II;
3. Bagi yang bersedia menerima, menyiapkan 6 (enam) surat sesuai format terlampir paling lambat tanggal 29 Juni 2007;
4. Bersedia menerima sanksi apabila Pusbindiklatren dan/atau Program Studi menemukan informasi yang berbeda tentang: a) status kepegawaian, IPK, masa kerja, pangkat/golongan ruang, tahun lulus, serta b) status pendidikan terakhir baik yang telah selesai maupun yang sedang dijalani; misalnya calon penerima beasiswa Pusbindiklatren sudah berpendidikan S2 dan atau sedang mengikuti program S2 di tempat lain;
5. Mengingat jadwal perkuliahan yang sangat padat, para karyawan tidak diperbolehkan mengambil cuti akademis dengan alasan apapun;
6. Mengikuti semua prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing program studi;
7. Khusus untuk penerima beasiswa S3 Dalam Negeri Tahun 2007, dengan telah keluarnya pengumuman ini, mereka diberi kesempatan selama 1 (satu) tahun s.d. Agustus 2008 untuk melamar pada perguruan tinggi yang telah bekerjasama dengan Pusbindiklatren Bappenas. Selanjutnya, apabila telah memiliki bukti penerimaan pada salah satu perguruan tinggi tersebut, harap segera disampaikan ke Pusbindiklatren Bappenas.

Perlu kami sampaikan kembali, bahwa selama mengikuti program beasiswa Pusbindiklatren Bappenas, kami hanya akan menanggung biaya-biaya sesuai standar Harga Satuan Umum. Sementara biaya yang menjadi tanggungan instansi asal peserta adalah: 1) tiket pp dari tempat asal peserta ke tempat program studi S2/S3, dan 2) tunjangan penempatan awal minimal setara dengan 5 hari perdiem; dan 3) uang saku peserta.

Selanjutnya, kami mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan informasi ini kepada calon peserta yang namanya tercantum dalam lampiran, serta membantu pengurusan administrasi bagi ybs. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pusbindiklatren Bappenas, Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat 10310, telpon: (021) 3103705, 31931234, 31931447, 31931465 dan fax: (021) 3149187 dan 31931392.

Selain daripada itu, mereka yang namanya tercantum pada daftar peserta pengembalian program beasiswa gelar Pusbindiklatren Bappenas adalah mereka yang berstatus :

1. Cadangan 2008

adalah peserta yang telah lulus seleksi pada tahun 2007, tetapi belum mendapatkan kesempatan untuk ditempatkan pada program studi S2/S3 yang kami tawarkan. Namun demikian, sewaktu-waktu mereka dapat dipanggil kembali apabila ada peserta yang mengundurkan diri di salah satu program studi; batas pemanggilan cadangan tersebut sampai dengan Akhir Juni 2007. Jika sampai batas akhir Juni tersebut, peserta cadangan tersebut tidak dipanggil, maka mereka dapat diusulkan kembali untuk program seleksi tahun 2008 tanpa melalui seleksi TPA dan TOEFL, jika; a). diusulkan kembali oleh instansi asalnya; b). nilai TPAnya masih di bawah 2 tahun pada tanggal 1 Agustus 2008; dan c). masih memenuhi syarat administrasi Pusbindiklatren Bappenas.

2. TMS TOEFL

adalah peserta yang telah lulus TPA, tetapi tidak lulus TOEFL tahun 2007. Mereka dapat diundang untuk mengikuti TOEFL tahun 2007 untuk menjadi calon penerima beasiswa Pusbindiklatren Bappenas tahun 2008, jika; a). diusulkan kembali oleh instansi asalnya; b). nilai TPAnya masih di bawah 2 tahun pada tanggal 1 Agustus 2008; dan c). masih memenuhi syarat administrasi Pusbindiklatren Bappenas.

3. TMS TPA

adalah peserta yang telah lulus Administrasi, tetapi tidak lulus TPA di tahun 2007. Mereka dengan status TMS TPA, dapat menjadi calon penerima beasiswa Pusbindiklatren Bappenas tahun 2008, jika diusulkan kembali oleh instansi asalnya serta masih memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Pusbindiklatren Bappenas;

4. TMS Administrasi

a. adalah peserta yang tidak memenuhi persyaratan administrasi beasiswa Pusbindiklatren, antara lain; (1) usia lebih dari 40 tahun pada tanggal 1 Agustus 2007 untuk S2/S3 Dalam Negeri dan 38 tahun untuk S2 Double Degree/Luar Negeri; (2) IPK kurang dari 2,50 untuk S2 Dalam Negeri, 2,75 untuk Double Degree/Luar Negeri dan 3,25 untuk S3; (3) lulusan D4 bukan S1 untuk pelamar S2 dan bukan S2 untuk pelamar S3; (4) tahun kelulusan S1/S2 minimal 2 tahun; (5) masa kerja PNS 100% pada golongan III/a minimal 2 tahun; (6) untuk pelamar S2 nilai TPA minimal 565 (Pusat), 525 (Pemda Jawa), 500 (Pemda Luar Jawa), atau 565 untuk pelamar S3 dari semua daerah dan (7) nilai TOEFL;

b. telah mengundurkan diri, dan sedang atau sudah S2/S3 lainnya;

Selain daripada hal-hal tersebut di atas, maka:


1. Apabila pada lampiran hasil seleksi Program S2 Dalam Negeri 13 Bulan dan lampiran pengembalian, peserta tidak mendapatkan namanya tercantum, maka peserta tersebut adalah peserta yang telah lulus TPA serta akan diberi kesempatan untuk mengikuti program peningkatan bahasa BEAP (*Basic English of Academic Purposes*); surat pemanggilan BEAP akan menyusul kemudian;
2. Kepada para pelamar Program Studi S3 Linkage, akan ada pengumuman lebih lanjut.

Untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut silakan menghubungi (021) 31931465, 31931447, 31931234, 3103705, e-mail: pusbindiklatren@bappenas.go.id, atau membuka situs: <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id>.

Jika terdapat kekeliruan yang ditemukan kemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan dan atas partisipasi dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan,
Pendidikan & Pelatihan Perencana


Dr. Avip Syaefullah, drg., M.Pd
NIP. 130 779 421

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas;
2. Bapak Sekjen/Sestama Departemen/LPND;
3. Bapak Deputi Sumber Daya Manusia POLRI;
4. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. PPK PSDMA Bappenas.



REPUBLIK INDONESIA
 KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
 JALAN TAMAN SUROPATI 2, JAKARTA 10310
 TELEPON : 31936207 – 3905650

Nomor: 1720/P.01/04/2007

2 April 2007

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal: Calon Penerima Beasiswa
 Program Gelar S2 Double Degree
 Indonesia - Jepang Tahun 2007

Kepada Yth.:

1. Para Kepala Biro Kepegawaian
Departemen/LPND
2. Para Kepala Pusdiklat
Departemen/LPND
3. Para Kepala BKD/Biro Kepegawaian
Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Para Kepala Bappeda
Provinsi/Kabupaten/Kota

di

Tempat

Sehubungan dengan fungsi Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Bappenas dan pelaksanaan PHRDP III JBIC Loan, dengan ini kami sampaikan bahwa staf Bapak/Ibu/Saudara telah terseleksi menjadi calon peserta program *S2 Double Degree* yang dilaksanakan di lima Program Studi pada empat universitas di Indonesia dan delapan universitas di Jepang. Program *S2 Double Degree* dirancang sedemikian rupa sehingga kuliah tahun pertama dapat dilaksanakan di Indonesia (di salah satu dari empat universitas tersebut di bawah) sedangkan kuliah tahun ke dua dilaksanakan di Jepang (di salah satu dari delapan universitas di bawah); dan di akhir perkuliahan, pesertanya berhak mendapat dua gelar dari masing-masing universitas tersebut.

Bidang-bidang studi yang ditawarkan pada program *S2 Double Degree* ini adalah sebagai berikut:

Bidang studi yang terdapat pada universitas-universitas di Indonesia adalah:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Magister Ilmu Ekonomi - UI | : Ilmu Ekonomi; |
| 2. Magister Ekonomika Pembangunan - UGM | : Ekonomi Pembangunan; |
| 3. Perencanaan Wilayah Kota - ITB | : Perencanaan Wilayah; |
| 4. Magister Perencanaan Kota dan Daerah - UGM | : Perencanaan Wilayah; |
| 5. Magister Ilmu Administrasi - UNIBRAW | : Ilmu Administrasi. |

Bidang studi yang terdapat pada universitas-universitas di Jepang adalah:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. GRIPS | : Development Economics, Finance, Public Policy, Public Administration, City & Regional Planning; |
| 2. International University of Japan | : International Development Program, Economics, Development Economics, Public Policy, Urban & Regional Planning, Development Planning; |
| 3. Keio University | : Media & Governance, Public Administration; |
| 4. Kobe University | : Development Economics, Development Management Political Development, International Relations and Public Administration; |

- | | |
|---------------------------|---|
| 5. Ritsumeikan University | : Economics, International Relations, Policy Science, Environmental & Urban engineering, Accounting and Mangement; |
| 6. Takushoku University | : International Development Studies, Economics and Development Economics, Urban & Regional Planning, Development Planning, Public Administration; |
| 7. Hiroshima University | : Economics, Development Economic; |
| 8. Yokohama University | : Economics, Development Economic. |

Setiap calon peserta *Double Degree* yang namanya tercantum dalam lampiran diwajibkan untuk mengikuti program persiapan bahasa Inggris (EAP) selama kurang lebih 5 bulan terhitung tanggal 9 April 2007 di:

1. Jl. Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat 10320, telepon 021-31931481 dengan Bapak Sakti Nugroho (pagi) dan Bapak Arif Nugraha (sore), bagi peserta Double Degree antara MIE-UI dan Universitas Jepang;
2. UPT Pusat Bahasa ITB, Jl. Ganesha No. 10, Bandung, telepon 022-2505674 dengan Bapak Bambang, bagi peserta Double Degree antara MPWK-ITB dan Universitas Jepang;
3. Pusat Bahasa UGM, Jl. Kaliurang, Yogyakarta, telepon 0274-902550 dengan Bapak Adi Sutrisno, bagi peserta Double Degree antara (a) MPKD-UGM; (b) MEP-UGM dan Universitas Jepang;
4. Pusat Pelatihan MIA UNIBRAW, Jalan MT. Haryono 163, Malang, Telepon 0341-553737, 556703, 586477 dengan Ibu Siti Rochmah, bagi peserta Double Degree antara MIA Unibraw dan Universitas Jepang.

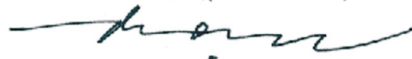
Perlu kami sampaikan lagi bahwa program EAP ini dilaksanakan secara *cost sharing* di mana selama EAP, Pusbindiklatren Bappenas hanya akan menanggung tuition fee, tunjangan biaya hidup (sesuai dengan standar Harga Satuan Umum), sedangkan (a) uang tiket pp di dalam negeri dari tempat asal peserta ke Jakarta (b) penempatan awal program dan (c) uang saku peserta ditanggung oleh instansi asal peserta. Mereka yang tidak lolos seleksi penempatan di universitas Jepang dapat meneruskan ke program S2 Dalam Negeri Reguler di perguruan tinggi yang sama dengan biaya paling lama 13 bulan untuk mereka yang nilai TOEFL nya < 550 dan biaya sesuai dengan jangka waktu program reguler masing-masing perguruan tinggi bagi mereka yang memiliki nilai TOEFL \geq 550; dan mendapat satu gelar dari perguruan tinggi tersebut.

Dalam rangka memenuhi kelengkapan administrasi, kami mohon agar mereka yang namanya tercantum dalam lampiran dapat melengkapi format-format surat terlampir dan dikembalikan kepada Pusbindiklatren Bappenas paling lambat tanggal 4 Mei 2007.

Akhirnya, kami mohon bantuan Saudara untuk segera menyampaikan informasi ini kepada calon peserta yang namanya tercantum dalam lampiran dan membantu pengurusan administrasi bagi yang bersangkutan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pusbindiklatren, Jl. Taman Suropati No.2, Jakarta Pusat 10310, telepon: (021) 310-3705, 31931-447; 31931-234 Fax nomor: (021) 319-31392 dan 314-9187.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan
dan Pelatihan Perencana,



Dr. Ir. Dida Heryadi Salya, MA
NIP: 350000388

Tembusan Yth.:

1. Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas;
2. Sekjen Departemen/Sestama LPND (daftar terlampir);
3. Sekretaris Daerah Propinsi/Kabupaten/kota (daftar terlampir);
4. Program Studi: MIE-UI, MPWK-ITB, MPKD-UGM, MEP-UGM, MIA-UNIBRAW;
5. Pusat Bahasa: ITB, UGM, UNIBRAW dan ELS, Jakarta;
6. PPK PSDMA Bappenas.



REPUBLIK INDONESIA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
 JALAN TAMAN SUROPATI 2, JAKARTA 10310
 TELEPON : 31936207 – 3905650

Nomor: 121 /P.01/04/2007 2 April 2007
 Lamp. : 1 (satu) berkas
 Perihal: Calon Penerima Beasiswa
 Program Gelar S2 Double Degree
 Indonesia - Belanda Tahun 2007

Kepada Yth.:

1. Para Kepala Biro Kepegawaian
Departemen/LPND
2. Para Kepala Pusdiklat
Departemen/LPND
3. Para Kepala BKD/Biro Kepegawaian
Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Para Kepala Bappeda
Provinsi/Kabupaten/Kota

di
Tempat

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan tes institusional TOEFL dan wawancara tertulis, pada tanggal 17 Maret 2007 di 8 lokasi, terlampir disampaikan daftar nama peserta yang memenuhi syarat untuk memperoleh beasiswa Pusbindiklatren tahun 2007 untuk program *S2 Double Degree* di UGM-IHS, ITB- RUG, UI-VU, Geography UGM-ITC dan ILM UNSRI-IHE. Nama-nama yang terpilih adalah mereka yang merupakan (a) calon peserta yang mengikuti seleksi nasional tahun 2007, maupun (b) calon peserta yang telah lolos seleksi tahun 2006 namun belum dapat ditempatkan karena satu dan lain hal; dan penempatan calon peserta didasarkan pada ketersediaan tempat dan dana.

Setiap calon peserta *Double Degree* yang namanya tercantum dalam lampiran diwajibkan untuk mengikuti program persiapan bahasa Inggris (EAP) selama 5 bulan terhitung tanggal 9 April 2007 di:

- (a) Jl. Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat 10320, bagi peserta *Double Degree* UI-VU, telepon 021-31931481 dengan Bapak Sakti Nugroho (pagi) & Arif Nugraha (sore);
- (b) UPT Pusat Bahasa ITB, Jl. Ganesha No. 10, Bandung, bagi peserta *Double Degree* ITB-RUG, telepon 022-2505674, dengan Bapak Bambang;
- (c) Pusat Pelatihan Bahasa UGM, Jl. Kaliurang, Yogyakarta, bagi peserta *Double Degree* UGM-IHS, telepon 0274-902550 dengan Bapak Adi Sutrisno;
- (d) Pusat Pelatihan Bahasa UNSRI, Jl. Padang Selasa, Bukit Besar, Palembang, bagi peserta *Double Degree* ILM UNSRI-IHE, telepon 0711-354222, Ext.120 dengan Bapak Muslih Hambali.

Perlu kami sampaikan bahwa selama mengikuti program persiapan Bahasa Inggris (EAP) Pusbindiklatren hanya akan menanggung tuition fee, tunjangan biaya hidup (sesuai dengan standar Harga Satuan Umum), sedangkan (a) uang tiket pp di dalam negeri ke dan dari Jakarta; (b) penempatan awal program; dan (c) uang saku ditanggung oleh instansi asal peserta. Tiket pp Jakarta-Belanda, tuition fee dan tunjangan biaya hidup selama di Belanda ditanggung oleh Pemerintah Belanda melalui beasiswa STUNED.

Penentuan peserta Program Double Degree yang dapat diberangkatkan ke Belanda didasarkan kepada hasil seleksi STUNED. Mereka yang tidak lolos seleksi STUNED dapat meneruskan ke program S2 Dalam Negeri Reguler di Universitas yang sama dengan biaya paling lama 13 bulan untuk mereka yang nilai TOEFL nya < 550 dan biaya sesuai dengan jangka waktu program reguler masing-masing bagi mereka yang memiliki nilai TOEFL \geq 550.

Dalam rangka memenuhi kelengkapan administrasi, kami mohon agar mereka yang namanya tercantum dalam lampiran dapat melengkapi format-format surat terlampir dan dikembalikan kepada Pusbindiklatren Bappenas paling lambat tanggal 4 Mei 2007.

Akhirnya, kami mohon bantuan Saudara untuk segera menyampaikan informasi ini kepada calon peserta yang namanya tercantum dalam lampiran dan membantu pengurusan administrasi bagi yang bersangkutan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pusbindiklatren, Jl. Taman Suropati No.2, Jakarta Pusat 10310, telepon: (021) 310-3705, 31931-447; 31931-234 dan Fax nomor: (021) 319-31392 dan 314-9187.

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ptt. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan
dan Pelatihan Perencana,



 Dr. Ir. Dida Heryadi Salya, MA
NIP: 350000388

Tembusan Yth.:

1. Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas;
2. Sekjen Departemen/Sestama LPND;
3. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Program Studi MPKD-UGM, MIE-UI, PPPWI-ITB, GEO UGM & ILM UNSRI;
5. Pusat Bahasa ITB, UGM, UNSRI dan ELS;
6. PPK PSDMA Bappenas.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
JALAN TAMAN SUROPATI 2, JAKARTA 10310
TELEPON : 31936207 – 3905650

Nomor: 1780 /P.01/04/2007
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal: Pemanggilan Peserta S2 DD
UNDIP-Perancis tahun 2008

3 April 2007

Kepada Yth:
1. Biro/Badan/Bag Kepegawaian Daerah
Propinsi/Kabupaten/Kota
2. Kepala Biro Kepegawaian
Departemen/LPND;
3. Pusklat Departemen/LPND
(daftar terlampir)

Sehubungan dengan telah selesainya seleksi tahap III, yaitu tes Institusional TOEFL tanggal 17 Maret 2007, dengan ini kami sampaikan bahwa staf Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran telah lolos seleksi calon penerima beasiswa S2 Double Degree UNDIP-Perancis tahun 2008.

Jadwal pelaksanaan persiapan bahasa dan S2 Double Degree UNDIP-Perancis adalah sebagai berikut:
1. Pelatihan Bahasa Inggris Dasar (BEAP) : Mei - Juni 2007
2. Wawancara oleh Kedutaan Perancis & UNDIP : Akhir Juni 2007
3. Persiapan Bhs Perancis di CCF, Jkt (jika lulus wawancara) : September 2007 - Juli 2008
4. Kuliah di UNDIP, jika lulus persyaratan Bhs. Perancis : Agustus 2008 s.d. Juli 2009;
5. Pemantapan Bahasa Perancis : Agustus - September 2009
6. Kuliah di Perancis : Oktober 2009 - Agustus 2010

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengharapkan agar Saudara dapat memberikan dukungan seperlunya kepada mereka untuk mengikuti proses persiapan dan seleksi di atas. Tempat pelaksanaan Pelatihan Bahasa Inggris (BEAP) adalah di Jl. Proklamasi No.70, Jakarta Pusat 10320, Telephone: 021-31931481, 3912624 dengan Bapak Sakti/Arif; sedangkan Persiapan Bahasa Perancis akan dilaksanakan di CCF Jakarta, Jl. Salemba Raya no. 25, Jakarta Pusat, Telephone: 021-3908580.

Pelaksanaan S2 Double Degree ini dilaksanakan antara Pusbindiklatren Bappenas, Instansi asal peserta dan Pemerintah Perancis, sebagaimana rincian terlampir. Selanjutnya, kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk menyampaikan ini kepada peserta yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan
dan Pelatihan Perencana,

Dr. Ir. Dida Heriyadi Salya, MA
NIP: 350000388

- Tembusan Yth.:
1. Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas;
 2. Sekjen Departemen/Sestama LPND (daftar terlampir);
 3. Sekretaris Daerah Propinsi/Kabupaten/kota (daftar terlampir);
 4. MPWK, Universitas Diponegoro;
 5. SCAC, Jakarta;
 6. CCF, Jakarta;
 7. PPK PSDMA tahun 2007;
 8. ELS, Jakarta;
 9. Yang bersangkutan.

DAFTAR NAMA PESERTA PROGRAM S2 DOUBLE DEGREE MPWK UNDIP - PARIS
BEASISWA PUSBINDIKLATREN - BAPPENAS
2007

No.	Nama	NIP	LP	Tgl Lrs	Nama Inst	Unit	Kota Inst	Prop Inst	KAT	IPK	TPA	TOEFL
1	ANA WIDIASTUTI	140331085	P	18-Mar-75	PEMKOT YOGYAKARTA	DIN KES	YOGYAKARTA	DIY	JW	3,510	861.03	473.00
2	DINER YUSRIZAL EKAPUTRA SARA	080113074	L	14-May-75	DEPTAN	PST PERIZINAN & INVESTASI	JAKSEL	DKI	PST	3,550	573.67	467.00
3	DRIE SARWEDI SUMPRIYATNO	460024635	L	14-Mar-73	PEMKAB TULANG BAWANG	KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN DAERAH		LAMPUNG	LJW	2,820	577.07	453.00
4	MUHAMMAD DARMAWAN	950007745	L	22-Apr-79	DEPKELPERIK	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI	JAKARTA PUSAT	DKI	PST	3,360	876.33	540.00
5	SIDDIQ PRATOMO	950000680	L	19-May-78	DEPKELPERIK	BIRO PERENCANAAN KLN	JAKARTA	DKI	PST	3,170	823.27	477.00
6	SYAMIDI	950001519	L	5-Jun-80	DEPKELPERIK	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK & BIOTEKNOLOGI	JAKARTA	DKI	PST	3,070	840.80	460.00

Pengalaman dan Manfaat Sekolah di Luar Negeri

Oleh: Ir. Harmi P. Marpaung, M.Eng



Harmi P. Marpaung no. 4 dari kiri bersama teman-teman Kampus Hiroshima University, Graduate School for International Development and Cooperation (IDEC)

Pendahuluan

Pada tahun 1997 ketika penulis bertugas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tingkat I Propinsi Timor Timur, berkesempatan untuk mengikuti Test Potensi Akademik (TPA) yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. Pesertanya berjumlah hampir 150 orang yang berasal dari berbagai instansi di Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Propinsi Timor Timur. Hasil TPA tersebut meluluskan 4 (empat) orang peserta yang seluruhnya berasal dari Propinsi Timor Timur, sehingga pelaksanaan TOEFL selanjutnya di selenggarakan di Dili, Propinsi Timor Timur. Peserta yang lulus TOEFL berjumlah 2 (dua) orang dan penulis yang berlatar belakang tugas di bidang perencanaan dipanggil untuk mengikuti tahapan selanjutnya di Jakarta.

Mei - Juni tahun 1998, penulis bergabung dengan peserta lainnya dari seluruh Indonesia untuk mengikuti English Akademik Purpose (EAP) I

di Program Pelayanan Bahasa Sastra Universitas Indonesia, Jakarta dan berhasil menyelesaikannya dengan baik. Selanjutnya persiapan sekolah ke Luar Negeri dilakukan di The British Institute (TBI) Jakarta untuk EAP II dan III selama 4 (empat) bulan sampai Oktober 1998 serta EAP IV pada bulan November – Desember 1998 di IALF Jakarta.

Setelah mengikuti EAP I sampai IV dan mencapai nilai TOEFL yang dipersyaratkan untuk mengikuti pendidikan di Jepang, maka calon peserta penerima beasiswa OTO Bappenas (Second Profesional Human Resource Development Project) dibekali pendidikan Bahasa Jepang di Japan Communication Club (JCC) Jakarta selama 2 bulan (Januari – Maret 1999).

Kehidupan Baru

Akhir September 1999, setelah referendum melahirkan Negara Timor Leste, penulis berangkat ke Jepang bersama Dail Umamil Asri (Bappenas), Restuardy Daud (Depdagri) dan Nikolas Torano (Pemprov Sulawesi Barat) dari Cengkareng via Denpasar ke Jepang. Setelah transfer dari Narita International Airport ke Haneda Airport di Tokyo, perjalanan dilanjutkan ke Hiroshima dengan menggunakan pesawat udara.

Setelah sampai di Hiroshima Airport, kami langsung menuju Kampus Hiroshima University, tepatnya Graduate School for International Development and Cooperation (IDEC) di 1-5-1 Kagamiyama, Higashi-Hiroshima (Saijo) dengan menggunakan taksi airport dan diterima para Senior Pelajar Indonesia disana. Mereka sangat membantu kami untuk mengurus persyaratan administrasi di kampus, sebagai warga baru di Kota Saijo dan mencari apartemen serta keperluan-keperluan mendasar untuk memulai kehidupan di tempat yang baru.

Kami akhirnya mendapatkan pondokan dan tinggal bersama di Rejidensu EiEi, 11454-55 Hara, Hachihonmatsu Cho yang letaknya tidak terlalu jauh dari kampus (kira-kira 15 menit naik sepeda). Perlahan-lahan kami mendapatkan semua peralatan yang diperlukan sehari-hari dengan bantuan senior kami, mulai dari sepeda, televisi, kulkas, mesin cuci, tilam, setrikaan dan lain-lainnya.

Setelah menyelesaikan persyaratan administrasi, penulis akhirnya tergabung dalam Transportation Study Group (TSG) dibawah bimbingan Sugie Yoriyasu Sensei dan Fujiwara Akimasa Sensei. Kegiatan perkuliahan di IDEC, Hiroshima University diselenggarakan dalam Bahasa Inggris dan sebagian bahasa Jepang, sehingga pada sore hari, setelah mengikuti perkuliahan reguler, kami tetap melanjutkan kursus Bahasa Jepang di Kampus.

Mengikuti perkuliahan di Hiroshima University memberikan banyak pengalaman baru bagi

kami. Kami benar-benar dituntut untuk belajar secara mandiri dan menentukan sendiri strategi belajar yang digunakan dalam mengikuti proses perkuliahan dari awal hingga penyusunan thesis. Setelah mengikuti perkuliahan formal di kelas, semua member study group kembali ke ruangan yang telah disediakan untuk belajar secara mandiri, dimana setiap orang memperoleh fasilitas belajar dan meja kerja masing-masing yang dapat dipergunakan selama 24 jam sehari.

Selama mengikuti pendidikan, para sensei dan teman-teman satu kelompok study sangat banyak membantu. Mereka tidak hanya membantu dalam hal study di kampus, tetapi juga dalam mengenal kehidupan masyarakat di Jepang dan menghadapi persoalan hidup sehari-hari, seperti: mengurus asuransi, pemeriksaan kesehatan dan berobat ke dokter, mengurus administrasi kependudukan, mengunjungi perpustakaan dan lain-lain.

Selain sensei, teman-teman perkuliahan di kampus dan teman-teman Pelajar Indonesia, kami juga mempunyai Host Family (Keluarga Jepang di Saijo) yang selalu siap setiap saat untuk mendampingi dan membantu kami dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial di Jepang. Mereka sering mengajak kami untuk mengunjungi kediamannya maupun membawa kami ke tempat-tempat tradisional Jepang untuk memperkenalkan budaya mereka.



Harmi P. Marpaung,
Mengisi Saat-saat
Liburan Bersama
Istri Tercinta di Negri
Sakura

Penutup

Sekolah di luar negeri merupakan pengalaman yang sangat menarik dan juga memberikan manfaat yang banyak dalam perjalanan karier saya sebagai seorang pegawai negeri sipil di daerah. Manfaat yang diperoleh bukan hanya dalam peningkatan jenjang pendidikan dan pola berpikir saja, tetapi juga pergaulan dengan teman-teman yang bersama-sama menimba ilmu di Negeri Sakura, baik sesama pelajar Indonesia, maupun pelajar dari manca negara.

Dalam masa persiapannya saja (EAP), saya telah mengenal banyak teman dari berbagai instansi, begitu pula selama sekolah di Jepang. Saya bergaul dengan banyak mahasiswa dari berbagai negara, terutama mahasiswa Indonesia yang merasa senasib sepenanggungan. Hubungan tersebut tetap terpelihara dengan baik hingga saat ini, ketika kami telah kembali ke tempat kerja atau instansi masing-masing. Banyak hal yang dapat kami kerjasamakan, saling membantu dan saling tukar menukar informasi yang sangat bermanfaat dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari dan peningkatan jenjang karier.

Selain manfaat tersebut di atas, sekolah di luar negeri, khususnya Jepang, juga memberikan pengalaman dan wawasan yang baru tentang kehidupan masyarakat di negara maju. Kita menemukan banyak contoh-contoh yang sangat baik untuk dijadikan teladan bagi masyarakat kita

di Indonesia.

Demikianlah pengalaman dan manfaat yang dirasakan oleh penulis dalam mengikuti pendidikan di Luar Negeri sebagai penerima Bea Siswa OTO - Bappenas (Second Profesional Human Resource Development Project). Semoga tulisan yang singkat ini bermanfaat bagi para pembaca dan rekan-rekan di daerah yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di Luar Negeri.



Harmi P. Marpaung,
Mengisi Saat-saat Liburan Bersama Istri Tercinta di Negeri Sakura

Perilaku Profesional Dosen Pegawai Negeri Sipil Indonesia



Oleh : Guspika, SE., MBA
Perencana Madya

ABSTRACT

The civil-servant lecturer professional behavior model was designed based on the social cognitive theory of Bandura (1991, 1989, 2001), theory of planned behavior (Ajzen, 1988, 2005), moral development stages of Kohlberg and ethical decision making model (Jones, 1991; Weber & Gillespie, 1998). The structural equation analysis result shows a fit and goodness of the model with the empirical data i.e: Chi-square is only 14.384. probability equal to 0.21, RMSEA is 0.009, GFI is 0.990, AGFI is 0.969, and CMIN/DF is 1.027

The model and empirical data explain that professional behavior of civil-servant lecturer in Indonesia at this time is determined by interaction dynamics of: (1) personal factors, i.e. intention to behave professionally, occupational commitment, and organizational commitment; and (2) situational factor, i.e. lecturer's response to organizational design. Only around 9.57% of respondents have been successful to demonstrate professional behavior and able to reach "engage in moral behavior".

Tingginya tuntutan masyarakat terhadap profesionalitas dosen saat ini lebih banyak ditujukan kepada dosen yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan sering diasosiasikan dengan citra negative dan rendahnya kinerja sebagian besar PNS lainnya. Menurut Lipsky (1980), profesi dosen PNS adalah birokrasi pelayanan terdepan (street level bureaucracy) karena pekerjaannya berinteraksi langsung dengan masyarakat. Berbagai literatur masih memperdebatkan ketidakjelasan definisi pengertian profesi dan professional

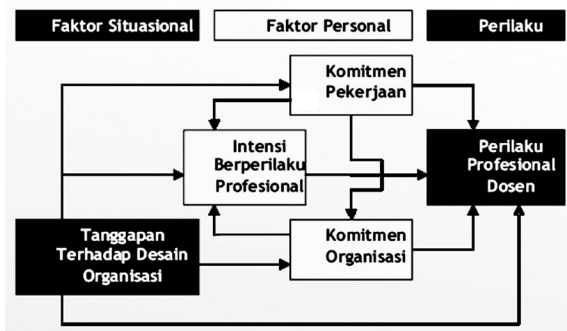
di dalam organisasi birokrasi. Jadi bagi dosen PNS, yang menjadi pertanyaan adalah: apakah label " profesional " lebih tepat dilekatkan kepada pekerjaannya sebagai dosen? atau kepada statusnya sebagai PNS?

Studi pustaka penelitian memberikan suatu kerangka teoritis bahwa perilaku seseorang selalu di pengaruhi oleh factor personal dan situasional. Hasil penelitian sebelumnya mengungkapkan data-data yang mencerminkan kelemahan personal seperti kemampuan mengajar lemah, pengalaman penelitian kurang memadai dan produktifitas rendah. Menurut Sunuharyo (1995) rendahnya produktifitas dosen bukan hanya masalah personal, tapi juga tergantung factor situasional, misalnya kurangnya dukungan kebijakan pimpinan, ketersediaan dana dan fasilitas yang dimiliki organisasi Perguruan Tinggi.

Untuk itu, diperlukan penelitian tentang penyusunan model perilaku profesional dosen PNS di Indonesia, yang mampu menjelaskan kriteria dan faktor-faktor pengaruhnya. Sebagai subjek penelitian dipilih dosen dengan status PNS yang bertugas di PTN BHMN, PTN Non BHMN, dan PTS.

Model perilaku profesional dosen disusun berlandaskan teori kognitif social (Bandura, 1991, 1989, 2001), teori perilaku terencana (Ajzen, 1988, 2005), teori perkembangan moral Kohlberg dan keputusan etis (Jones, 1991; Weber dan Gillespie, 1998). Model tersebut menjelaskan terjadinya inkonsistensi hubungan antara intensi dan perilaku profesional, tapi dapat di konsistensikan oleh dinamika interaksi diantara komitmen pekerjaan,

komitmen organisasi dan tanggapan dosen terhadap desain organisasinya



GAMBAR 1. Kerangka Penelitian Perilaku Profesional Dosen

Sebanyak 1020 kuesioner disebarikan kepada 640 responden di PTN (62,75%) dan 380 di PTS (37,25%). Lokasi koresponden berada di 17 PT di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Sampai dengan tanggal batas akhir pengumpulan, hanya 326 yang terisi lengkap (return-rate = 32%).

Hasil analisa persamaan struktural menunjukan kecocokan model dengan data empiris, yaitu Kai -kuadrat = 14, 384, probaditas = 0,421, RMSEA = 0,009, GFI = 0,990, AGFI = 0,969, dan CMIN/DF = 1,027. Hipotesis mayor diterima, sehingga model perilaku profesional dosen tersebut menjelaskan perilaku profesional dosen PNS di Indonesia saat ini.

Data empiris perilaku menjelaskan derajat perilaku profesional dosen PNS di Indonesia di pengaruhi oleh dinamika interaksi antar factor personal (intensi berperilaku profesional, komitmen pekerjaan, komitmen organisasi) dan factor situasional (tanggapan terhadap desain organisasinya). Hanya 9,57% responden yang telah menunjukan perilaku profesional dan mencapai tahap "engage in moral behavior". Mereka memiliki ciri-ciri dosen dengan jabatan akademis lebih tinggi, bertipe kosmopolitan, tingkat pendidikan lebih tinggi, lulusan luar negeri, usia lebih tinggi dan masa kerja lebih lama

Penelitian ini menyimpulkan antara lain : (1) dosen PNS di Indonesia masih berorientasi kepada keamanan status dan kejelasan karir, serta menggantungkan diri kepada program studi dan kejelasan karir, serta menggantungkan diri kepada program studi, jurusan atau fakultas di PT sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas perkembangan karirnya, (2) tuntutan peningkatan profesionalitas dosen di tanggapi sebaliknya yaitu bahwa yang terlebih dahulu harus ditingkatkan adalah aspek organisasi PT-nya, bukan hanya dosennya saja. Hal ini merupakan "social concensus" di antara para dosen, (3) perilaku profesional yang telah di demonstrasikan, lebih di pengaruhi oleh minat dan tanggung jawab moral yang tercermin dari tingginya komitmen pekerjaan, dan secara signifikan berpengaruh terhadap perilaku profesional.

Implikasi praktis peningkatan profesionalitas dosen antara lain: (1) menyempurnakan mekanisme seleksi dosen dengan memasukan aspek penilaian minat, orientasi moral dan etika profesi dosen, (2) meningkatkan dukungan organisasi di setiap PT terhadap otonomi akademis dosen. (3) menyusun sistem penilaian kinerja dosen obyektif, (4) membangun jaring kerjasama antar dosen melalui joint-research dan penerbitan jurnal, serta (5) mendorong terbentuknya asosiasi profesi dosen.

Penelitian selanjutnya tentang profesionalitas dosen dan perubahan status PT BHMN, perlu menunggu pelaksanaan UU14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Hal ini dimaksudkan agar tersedia data tentang dosen profesional dan situasi terakhir desain organisasi PTN setelah perubahan status. Diperlukan pula data dan hasil analisis masalah dan solusi terhadap berbagai hambatan pelaksanaan PT BHMN, seperti kontroversi kenaikan biaya SPP karena berkurangnya subsidi dana pemerintah bagi PT BHMN, mekanisme sertifikasi dosen, atau sistem penerimaan mahasiswa baru.

Pola Klaster Dalam Pengembangan Jaringan Usaha IKM



Oleh
Drs. I Nyoman Sunata, M.Pd

A. Pendahuluan

Provinsi Bali memiliki luas wilayah seluas 5.636,66 km atau 0,29% dari total luas Indonesia. Berdasarkan proyeksi Penduduk tahun 2006 jumlah penduduk Bali sebanyak 3.431.585 jiwa dengan kepadatan 609 jiwa/km². Rata-rata laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 2000-2006 sebesar 1,45% per tahun.

Secara geografis Provinsi Bali terletak pada posisi antara 80-03'-40" _ 80-50'-48" LS dan 1140-25'-53" _ 1150-42'-40" BT. Bentang alam Bali terdiri atas rangkaian pegunungan dari barat ke timur. Ada dua gunung api yaitu Gunung Agung (3.140 m) dan Gunung Batur (1.717m). Permukaan bumi Pulau Bali memiliki perbedaan yang mencolok antara Bali Utara dengan Bali Selatan. Bali Utara terdiri atas dataran rendah yang sangat sempit serta berbukit-bukit. Bali Selatan terdiri atas dataran rendah yang cukup luas dan sebagian kecil berbukit.

Provinsi Bali memiliki 4 buah danau yaitu Danau Beratan, Danau Buyan, Danau Tamblingan dan Danau Batur. Secara klimatologi, Bali memiliki iklim laut tropis yang dipengaruhi oleh angin musim

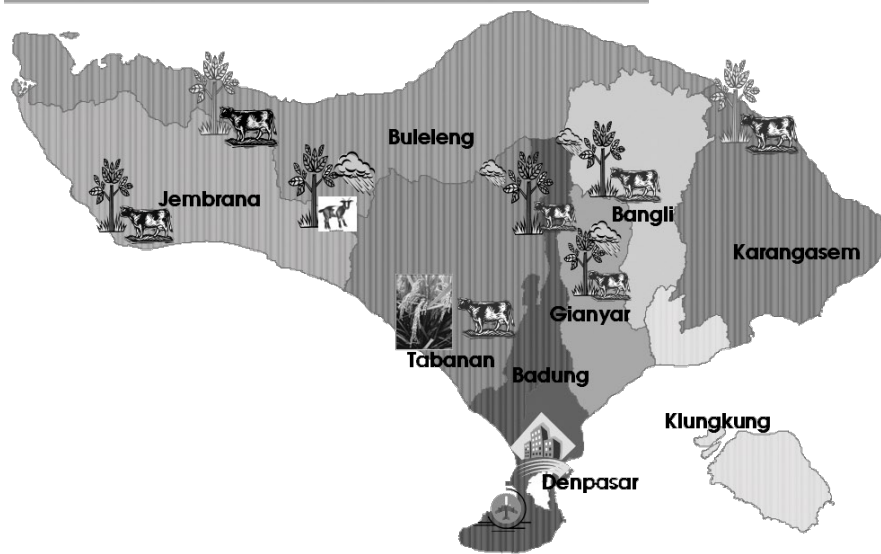
*)Drs. I Nyoman Sunata, M.Pd
Perencana Madya
(Pembina Utama Muda/IVc)
pada Bappeda Kab Jembrana
Allumni TOT Penjenjangan Perencana
LPEM-UI dan Bappenas Tahun 2004
Salah seorang deklaratör Assosiasi
Perencana Pemerintah Indonesia (APPI)
Bappenas
Narasumber dalam berbagai seminar
nasional, seperti: Urgensi Penguatan
Keuangan Daerah di Bappenas, JFP
Jabatan alternatif Karier PNS di Bappenas,
Menggerakkan Investasi Daerah di Dirjen
Bina Bangda Denpdagri dll



yang membentuk dua musim utama yaitu musim kemarau dan musim hujan. Suhu rata-rata berkisar antara 280-300C namun bervariasi sesuai dengan ketinggian tempat. Kelembaban udara berkisar 90%, pada musim hujan bisa mencapai 100% dan musim kering mencapai 60%.

Jenis tanah Pulau Bali meliputi jenis Regosol peka terhadap erosi. Jenis Regosol terdapat di bagian timur dari Amlapura hingga Culik. Jenis tanah ini juga terdapat di Singaraja sampai Seririt, Bubunan, Kekeeran sekitar Danau Tamblingan, Danau Buyan, Danau Beratan, sebagian Hutan Batukaru, sebagian Desa Kusamba, Sanur, Bena dan Kuta. Secara keseluruhan Jenis Regosol kurang lebih 39,93% dari luas Pulau Bali. Di samping Tanah Regosol, Bali juga memiliki jenis tanah Andosol. Tanah Andosol terdapat di sekitar Baturiti Candikuning, Banyuatis, Gobleg, Pupuan dan sebagian Hutan Batuakaru. Jenis tanah berikutnya adalah tanah Mediteran yang kurang peka terhadap erosi. Tanah Mediteran terdapat di jazirah Bukit Nusa Penida dan kepulauannya, Bukit Kuta dan Prapat Agung. Jenis tanah berikutnya adalah tanah Alluvial. Alluvial tidak peka terhadap erosi terdapat di dataran Negara, Sumber Kelompok, Manggis dan Angantelu. Ketiga jenis tanah ini yaitu andosol, Mediteran dan Alluvial meliputi sekitar 15,49% dari luas Pulau Bali.

Potensi IKM Provinsi Bali



Bali didukung oleh Kawasan hutan yang terletak di daerah pegunungan membentang dari barat hingga ke timur seluas 22,54% dari Luas Pulau Bali. Dengan karakteristik yang beraneka ragam. Bali memiliki Taman Nasional Bali barat dengan burung Jalak Bali (*Leucopsar rochthildi*) Meskipun sebagai daerah agraris, penduduk Bali tidak hanya tergantung dari sektor pertanian. Sektor-sektor andalan Bali adalah Perindustrian, Perdagangan, pariwisata dan jasa. Dilihat dari struktur yang memberikan kontribusi PDRB Bali Tahun 2006, perekonomian Bali masih didominasi oleh sektor perdagangan. Hotel dan restoran kontribusi sebesar 28,88%, Pertanian sebesar 19,96% dan jasa sebesar 16,22%.

Perekonomian Bali sangat unik, sektor pariwisata berkembang secara maksimal pada Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar. Ketiga daerah ini telah mampu mandiri dengan Pendapatan Asli Daerah yang cukup baik. Enam kabupaten lainnya, masih mengandalkan pertanian. Dalam kerangka ajeg Bali, maka Kabupaten lainnya diharapkan mengembangkan sektor-sektor yang mendukung pariwisata dengan konsep Sporting Tourism. Pariwisata Bali tidak bisa dilepaskan dari kontribusi budaya, perdagangan, kerajinan maupun pertanian. Kondisi IKM Dalam mendukung ajeg Bali maka pembinaan Program Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) melalui Pola Jaringan Usaha Pengembangan Klaster Komoditas sangat dibutuhkan.

B. Perkembangan IKM di Bali

Sehubungan dengan pengembangan konsep sporting tourism pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Bali sangat diperlukan. Menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, maka batasan Industri Kecil didefinisikan sebagai berikut :

“Industri kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah-tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, dan mempunyai nilai penjualan per tahun sebesar Rp. 1 milyar atau kurang.” Sementara itu menurut BPS, yaitu berdasarkan kriteria jumlah tenaga kerja, mulai dicobakan di lingkungan Diperindag, yaitu :

Industri dan dagang mikro (ID-Mikro) :1 – 4 orang

Industri dan dagang kecil (ID-Kecil) :5 – 15 orang

Industri dan dagang menengah (ID-Menengah) : 20 – 99 orang

Industri dan dagang besar (ID-Besar) :100 orang ke atas

Sampai dengan tahun 2006 kondisi IKM di Bali telah berkembang dengan pesat, menurut data Bali Membangun Tahun 2006 Jumlah sentra ,Unit Usaha, Tenaga Kerja, Nilai Investasi dan Nilai Produksi

Tabel 01.
Jumlah sentra ,unit usaha, tenaga kerja, nilai investasi dan nilai produksi industri kecil dan menengah provinsi bali sampai dengan tahun 2006

NO.	KABUPATEN/ KOTA	SENTRA (BUAH)	FORMAL DAN NON FORMAL			
			UNIT USAHA	TENAGA USAHA	NILAI (RP JUTA)	
					INVESTASI	PRODUKSI
1	2	3	4	5	6	7
1	JEMBRANA	42	4.848	10.696	40.555.799	147.863.860
2	TABANAN	53	4.843	21.281	65.685.816	189.962.321
3	BADUNG	148	3.788	16.856	77.034.555	957.243.046
4	DENPASAR	26	2.901	29.198	117.791.774	688.561.319
5	GHANYAR	115	21.881.	64.809	46.312.467	1.409.439.485
6	KLUNGKUNG	53	5.195	15.292	10.872.923	213.147.398
7	BANGLI	122	12.128	25.594	8.584.249	78.110.619
8	BULELENG	80	3.930	9.472	6.011.544	25.271.724
9	KARANGASEM	266	14.420	26.285	15.889.947	71.969.150
	JUMLAH :	905	73.754	219.483	388.739.074	3.781.571.922

Industri Kecil dan Menengah Provinsi Bali Sampai Dengan tahun 2006 dapat dilihat pada tabel 01.

C. Permasalahan yang Dihadapi Dalam Pengembangan IKM di Bali

Dalam pelaksanaan pengembangan IKM selama ini telah dialami sukses dan kegagalan, pengalaman ini sangat berharga sebagai pelajaran untuk perbaikan langkah pengembangan ke depan. Beberapa masalah yang dihadapi adalah :

a. Masih sering ditemui inkonsistensi di kalangan pembuat kebijakan, yaitu antara komitmen politik untuk

mengembangkan UKM/IKM dengan langkah nyata di tataran program operasional dari berbagai pihak/ otoritas terkait antara lain : dukungan sumber daya, prasarana/sarana penunjang, bantuan teknik, insentif, perlakuan kemudahan (fasilitasi), dsb.

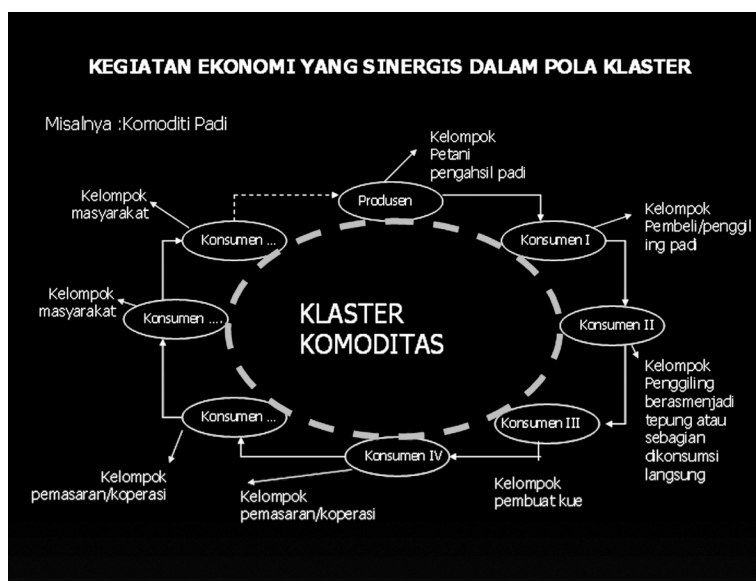
b. Banyak pola-pola bantuan teknik yang kurang efektif, antara lain karena penerapan pola umum tersebut secara atas-bawah (top-down) kurang mempertimbangkan aspek kelayakannya menurut kondisi spesifik objek binaan di lapangan, serta kurang konsistennya dukungan sumberdaya dan lemahnya manajemen.

- c. Kurangnya pendekatan pemecahan masalah pengembangan secara komprehensif, dengan konsekuensi pentingnya keterpaduan dalam pelaksanaan.
- d. Belum efektifnya mekanisme bawah-atas (bottom-up) di lapangan.
- e. Banyak program pemberdayaan, khususnya kegiatan pendidikan dan pelatihan banyak yang kurang memenuhi kebutuhan nyata dari objek binaan di lapangan.
- f. Intervensi pemerintah, termasuk sistem insentif yang ada sering kali kurang menyentuh kebutuhan sektor riil. Pengembangan sistem insentif baru sering terkendala oleh cara pandang sempit dan kepentingan jangka pendek, serta kekhawatiran akan penyalahgunaan karena lemahnya aspek pengawasan.
- g. Masih adanya keengganan di sebagian masyarakat IKM untuk melakukan perubahan yang bersifat modernisasi dikarenakan oleh hambatan kultural di tingkat pendidikan.
- h. Sering terlupakannya cara pendekatan rekayasa sosial (social engineering) dalam melakukan kegiatan transformasi sosial terhadap objek binaan (IKM) di daerah.
- i. Kurangnya pola pikir konseptual-komprehensif dalam penyusunan program maupun pemecahan masalah sehingga banyak langkah pembinaan kurang berhasil-guna.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka perlu dilakukan pengembangan jaringan usaha IKM melalui pola Klaster.

ditetapkan 8 (delapan) prioritas pembangunan tahun 2008 yaitu :

1. Peningkatan investasi, ekspor, dan kesempatan kerja;
2. Revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan perdesaan;
3. Percepatan pembangunan



D. Pengembangan Pola Klaster Dalam IKM

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang berlangsung dari tanggal 2 s/d 6 Mei 2007 disepakati bahwa untuk mewujudkan 3 agenda pembangunan tersebut di atas, pada tahun 2008 ditetapkan tema pembangunan nasional : “ Percepatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mengurangi Pengangguran dan Kemiskinan ”

Untuk mewujudkan tema pembangunan tersebut di atas

- infrastruktur dan pengelolaan energi;
- 4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
- 5. Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan;
- 6. Pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 7. Penguatan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan dalam negeri;
- 8. Penanganan bencana untuk mengurangi resiko

bencana, dan peningkatan pemberantasan penyakit menular.

Sementara itu pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Bali yang berlangsung dari tanggal 2 s/d 6 April 2007 menetapkan Tema Pembangunan Provinsi Bali adalah : " Meningkatkan Pembangunan Sosial Ekonomi untuk Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran " untuk mewujudkan tema pembangunan tersebut ditetapkan 6 (enam) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pemberdayaan masyarakat;
2. Peningkatan akses serta kualitas pendidikan dan kesehatan;
3. Peningkatan pembangunan pertanian dan pengembangan dunia usaha;
4. Pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah;
5. Peningkatan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup;
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik serta ketertarikan dan ketertiban.

Pengembangan ekonomi lokal merupakan suatu konsep pembangunan ekonomi berdasarkan pendayagunaan sumberdaya lokal yang ada pada masyarakat (SDM, SDA dan SDK), oleh masyarakat itu sendiri, melalui pemerintah maupun kelompok kelembagaan berbasis masyarakat. Ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan

ekonomi lokal termasuk pola klaster yaitu : Berbasis peluang pasar, Penghubung produsen dengan pengusaha dan Kesatuan masyarakat dan dunia usaha.

Pendekatan yang dilakukan dalam pengembangan ekonomi lokal yaitu :Berorientasi pada pasar (market driven), Pemuatan cluster aktivitas ekonomi dengan komoditas ekspor, Kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat, Memobilisasi sumber daya dan dana serta Kerjasama produsen skala kecil dengan perusahaan skala besar.

Bali memiliki berbagai keunikan dalam mengembangkan perekonomian. Masing-masing Kabupaten/kota di Bali memiliki karakteristik kondisi dan potensi sumber daya yang berbeda. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan tingkat persaingan pasar yang tinggi, tentunya karakteristik sumber daya yang menjadi kekhasan daerah, (local characteristic) tersebut harus mampu didayagunakan secara optimal, sehingga menjadi keunggulan komparatif yang dapat membangun keunggulan kompetitif dengan produk-produk yang beredar di pasar global.

Program Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) merupakan program pembangunan di daerah yang bertumpu pada pengembangan suatu sektor yang menjadi prioritas yang dikembangkan. Pengembangan sektor tersebut dalam KPEL dilakukan melalui

pengembangan klaster komoditas (pertanian / peternakan / perkebunan/perikanan/industri kecil/lainnya) yang dilakukan dalam aktivitas ekonomi lokal.

Klaster merupakan kumpulan kegiatan ekonomi yang ditentukan berdasarkan : (1) kedekatan geografis yang mencakup kegiatan lintas komoditas dan lintas sektoral, (2) kesatuan sektor industri yang meliputi kegiatan lintas daerah dan komoditas, (3) kesamaan komoditas yang meliputi kegiatan lintas daerah. KPEL lebih berfokus pada klaster komoditas.

Program KPEL dimulai pada tahun 1998 oleh pemerintah Indonesia (BAPPENAS) dengan UNDP dan UN-Habitat. Diawali dengan pelaksanaan pilot project di 19 kabupaten/kota di 6 propinsi, KPEL direplikasikan pada tahun 2001 oleh BAPPENAS di 32 kabupaten/kota di 10 provinsi di Indonesia. Sampai saat ini sudah terdapat ±29 klaster komoditas terbentuk di daerah replikasi tersebut, baik komoditas pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan kerajinan rakyat. Sebagai salah satu upaya untuk memfasilitasi pengembangan klaster komoditas, khususnya dalam upaya pengembangan dan perluasan pasar komoditas yang dikembangkan dalam KPEL, dilakukan beberapa upaya diantaranya melalui pelaksanaan Promosi Klaster Komoditas pada tahun 2002 dan 2003 yang dilakukan oleh

BAPPENAS, serta pelaksanaan Workshop Donor pada tahun 2003 yang dilakukan oleh Lembaga Jaringan Kemitraan bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (LJKPEL) di tingkat nasional. Dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, dirasa perlu untuk menyusun database perusahaan-perusahaan ataupun lembaga-lembaga yang terkait dengan jaringan pasar komoditas sebagai acuan bagi produsen ataupun pihak lainnya yang berkepentingan untuk melakukan transaksi dan kerjasama.

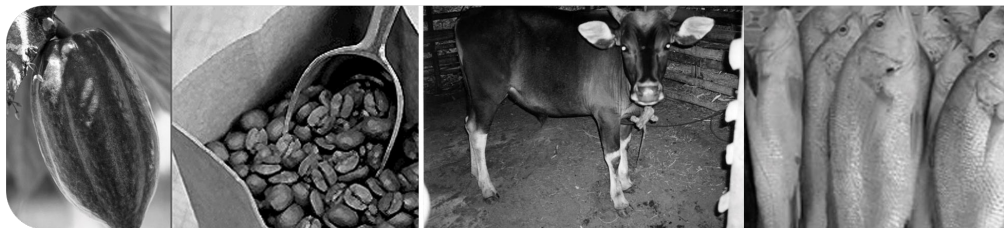
Peluang Pengembangan klaster di Bali

Pola klaster dalam IKM di Bali sangat memungkinkan dikembangkan.

Adapun komoditas yang dapat dikembangkan dalam pola klaster antara lain :

1. Industri Kecil dan Kerajinan
2. Pertanian
3. Peternakan
4. Perikanan

Dalam memilih jenis komoditas klaster, maka disesuaikan dengan potensi Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Dapat mungkin diupayakan setiap kabupaten/kota memiliki komoditas unggulan yang digarap dalam pola klaster.



E. Jenis Komoditas

Komoditas yang telah dikembangkan dengan Pola Klaster adalah : Komoditas pertanian, Komoditas Perkebunan, Komoditas Hasil Laut dan Perikanan, Komoditas Peternakan, dan Industri Kerajinan. Untuk Provinsi Bali telah tercatat di Sekretariat Nasional Program Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) terdiri atas Komoditas Perkebunan, Komoditas Hasil Laut dan Perikanan, dan Komoditas Peternakan. Bila kita ingin memantapkan ajeg Bali dengan tumpuan sektor perdagangan dan pariwisata yang didukung oleh sektor pertanian dalam arti luas, maka masing-masing Kabupaten/Kota dapat mengembangkan Pola Klaster baik pada pertanian dalam arti luas, perdagangan, IKM, dan kerajinan.

Berikut ini adalah gambaran mengenai komoditas yang telah dikembangkan oleh kabupaten/kota di Provinsi Bali sejak pelaksanaan replika program KPEL sejak tahun 2001.

1. Komoditas Perkebunan

- a. Kabupaten Jembrana
Produk yang dikembangkan di Kabupaten Jembrana adalah biji kakao yang

akan menjadi bahan baku bagi produk lanjutan. Sentra produksi kakao kering terdapat di Desa Candikusma Kecamatan Melaya. Desa Candikusma letaknya kurang lebih 15 Km dari Pelabuhan Laut Gilimanuk, 10 Km dari Kota Negara dan 110 Km dari Kota Denpasar. Luas lahan yang diusahakan 2.847 Ha melibatkan 7064 KK. Produksi Kakao sekitar 2.329,792 Ton/tahun. Sisa potensi lahan masih 1.399 ha. Kini di Kecamatan Melaya telah berdiri pusat pengolahan kakao melalui Konsep Kawasan Cepat Tumbuh Berbasis Kakao.

- b. Kabupaten Bangli
Komoditas potensial yang dikembangkan adalah kopi Arabika. Sentra produksi kopi arabika terletak di desa Belantik, Kecamatan Kintamandi. Desa Belantik berjarak kurang lebih 35 Km dari Kota Bangli. Luas lahan usaha seluas 3.663,74 Ha yang dikelola oleh 9 kelompok dengan anggota 6.781 KK. Kapasitas produksi 1 ton/ha setiap panen.



c. Kabupaten Tabanan
Komoditas potensial yang dikembangkan adalah kopi Robusta. Lokasi pengembangan di Kecamatan Pupuan dengan luas lahan ±10.570 Ha, 107 Ha diantaranya dikelola oleh Perusahaan daerah. Produksinya mencapai 7660 ton pertahun

2. Komoditas Hasil Laut dan Perikanan

a. Kabupaten Buleleng
Komoditas yang dikembangkan adalah nener bandeng. Lokasi pengembangan nener bandeng adalah Desa Musi, Desa Sangalangit, Desa Penyabangan semuanya terletak di Kecamatan Gerogak. Jumlah KK dalam tiga desa tersebut sebanyak 3.000 KK, rata-rata produksinya 20 juta/hari. Rata-rata lahan yang diusahakan seluar 0,5Ha.

3. Komoditas Peternakan

a. Kabupaten Gianyar
Komoditas yang dikembangkan adalah sapi potong. Lokasi pengembangan sapi potong terletak di desa Samplangan Kecamatan Gianyar. Frekuensi panen ekor/petani dengan bobot 2 ton

Sebagai bahan perbandingan bandingan diuraikan secara singkat komoditas klaster di luar Provinsi Bali sebagai berikut:

1. Komoditas Pertanian

a. Kabupaten Agam (Prop. Sumbar)
Komoditas sayuran dikembangkan di Kabupaten Agam. Sentra produksi sayur berada di Kecamatan Matur, IV Koto, Banu Hampu, IV Anggrek, Baso, Sungai Puar dan Cadung dengan luas areal mencapai 4.750 Ha.

b. Kabupaten Serang (Prop. Banten)
Kabupaten serang mengembangkan klaster komoditas kacang tanah. Sentra produksi klaster kacang tanah diusahakan oleh Kelompok Tani Harapan Jaya I, II dan III yang berada di Desa Umbul Tengah dan Desa Pancur Kec. Taktakan yang berjarak ± 8 km dari ibu kota kabupaten. Kapasitas produksi petani ± 5 ton/tahun (2 kali panen) dengan luas areal produksi di kabupaten ini 3.000 Ha.

c. Kota Cilegon (Prop. Banten)
Klaster kacang tanah juga dikembangkan di Kota Cilegon tepatnya di Desa Citangkil, Kecamatan Citangkil. Jumlah rumah tangga petani kacang di desa ini adalah 420 KK dengan rata-rata lahan yang di-

usahakan untuk pengembangan klaster ini adalah kurang dari 1 hektar dengan status lebih banyak milik sendiri. Usaha tani kacang tanah adalah pekerjaan utama dengan tingkat produksi total di desa ini sebesar 8 ton.

d. Kabupaten Garut (Prop. Jawa Barat)
Kabupaten Garut melalui program KPEL mengembangkan komoditas beras dengan lokasi sentra di 6 kecamatan yaitu : Kecamatan Tarogong Kaler, Cilawu, Samarang, Tarogong Kidul, Banyongbong dan Kadungora. Jumlah KK yang mengusahakan usaha tani beras sarinah sebanyak 370 KK. Rata-rata luas lahan yang diusahakan oleh petani kurang dari 0,5 Ha. Teknologi produksi yang digunakan masih sederhana, dengan tingkat produksi perpanennya kurang dari 5 ton/hektar.

e. Kabupaten Sumbawa (Prop. NTB)
Kedelai merupakan salah satu komoditas potensial yang dikembangkan oleh Kab. Sumbawa melalui program KPEL. Sentra produksi kedelai diusahakan oleh kelompok usaha tani yang berada di Desa Jorok dan Desa Kerato di Kecamatan Sumbawa, Desa



Sapugara-Breedi Kecamatan Brang-Rea, dan Desa Lebin Kecamatan Ropang.

Kapasitas produksi kedelai di kabupaten ini rata-rata 22.648 ton per tahun dengan luas areal sekitar 10.712 Ha. Sedangkan, petani dalam kelompok dapat memproduksi antara 250-2.000 kg/tahun. Luas areal yang berpotensi untuk lahan kedelai seluas 44.000 ha. Selama ini produk dipasarkan ke Pulau Lombok, Surabaya dan Jakarta. Volume ekspor keluar Kabupaten Sumbawa setiap tahun sebesar ± 15.000 ton. Produk turunan yang dihasilkan adalah tahu dan tempe.

2. Komoditas Perkebunan

a. Kabupaten Indragiri Hilir (Prop. Riau)

Sekitar 70% dari jumlah penduduk Kab. Indragiri Hilir bermata pencaharian dari berkebun kelapa. Sebagai sentra produksi kelapa adalah Kelompok Tani Harapan Jaya, Karya Jaya dan Padaidik yang berada di Desa Pusaran, Kecamatan Enok yang jaraknya sekitar 1 jam perjalanan dengan speedboat dari ibu kota Tembilahan.

Produksi petani rata-rata 10 – 30 ton per tahun. Produk turunan yang dihasilkan adalah kopra, arang tempurung, sabut dan gula

kelapa. Selama ini, kelompok petani mensuplai kebutuhan kopra ke 7 pabrik pengolah kelapa yang berada di Kab. Indragiri Hilir.

b. Kabupaten Lampung

Selatan (Prop. Lampung)

Salah satu kelompok yang mengembangkan klaster gula merah sebagai produk potensial Kab. Lampung Selatan berada di desa Sukaraja, Kecamatan Palas. Jumlah perajin gula merah di desa ini adalah 190 KK dengan tingkat produksi per harinya rata-rata 20 kg dalam bentuk gula asalan (BS).

c. Kabupaten Lebak

(Prop. Banten)

Bahan baku komoditas gula aren yang dikembangkan oleh Kab. Lebak berasal dari pohon aren. Sentra produksi gula aren berada di Desa Hariang dan Desa Sobang yang semuanya berada di Kec. Muncang.

Kapasitas produksi gula aren di kabupaten ini adalah 157 ton/bulan, senilai 314 juta rupiah. Volume ekspor (penjualan ke luar kabupaten) berkisar 126,6 ton/bulan. Produk turunan dari komoditas ini adalah gula semut dan kolang kaling.

3. Industri Kerajinan

a. Kabupaten Sukabumi

Komoditas yang diusahakan

adalah pengolahan logam terleak di Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat. Perajin memanfaatkan rumah tinggal sebagai bengkel usaha. Produksi kurang lebih 5.000 unit per tahunnya.

b. Kabupaten Klaten

Komoditas yang diusahakan adalah keramik. Terdapat 171 perajin keramik. Produksinya 600 buah/perajin setahun dengan total produksi sekitar 1.152.000 buah pertahun

E. Penutup

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan tentang Pola Klaster Dalam Pengembangan Jaringan Usaha IKM, mudah-mudahan apa yang sederhana ini dapat dipakai sebagai bahan penantar diskusi pengembangan klaster di Kabupaten/Kota se- Bali.



Ketika Ronald Reagan menjadi presiden. Setumpuk persoalan ekonomi yang berat menghadang. Semua itu diwariskan Jimmy Carter. Barangkali dari sinilah prestasi Reagan berawal. Potret muram prestasi ekonomi selama era Carter lantas dianalisis secara cermat, hati-hati, dan tuntas. Jawaban dan solusinya cuma satu, Liberalisasi ekonomi. Bak seorang ekonom. Reagan pun lantas mengurangi keterlibatan pemerintah dalam perekonomian. Kalau bisa seminim mungkin. Pemerintah hanyalah sekedar "watchdog". Yang tak boleh ikut-ikutan bermain. Karena pemerintah tak mampu menyelesaikan masalah yang ada. Malahan pemerintah telah menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Pemerintah berikut birokrasinya malah menjadi "bottle neck". Karenanya harus dipotong agar perekonomian pulih kembali. Dari sinilah kemudian dunia mengenal "Reaganomics" yang terbukti ampuh menciptakan "booming" ekonomi Amerika Serikat hingga delapan tahun lamanya. Kebijakan Reagan pada saat yang sama pun diadopsi Margareth Thatcher. Dan eloknya, Thatcher pun

juga sukses. Serta merta, dunia mengenal pula "Thatcherism" yang memakmurkan Inggris pada periode yang hampir sama. Rekayasa itulah kata kuncinya. Reagan dan Thatcher secara cerdas mampu melakukan "bureaucratic engineering". Rekayasa dilakukan demi menyelamatkan diri dari jebakan krisis ekonomi yang lebih parah. Efektivitas birokrasi pada akhirnya mendorong tumbuhnya efisiensi ekonomi. Demikian inti keyakinannya. Dan dengan indahnyanya pula, Osborne dan Gaebler pun menuliskannya dalam "Reinventing Government".

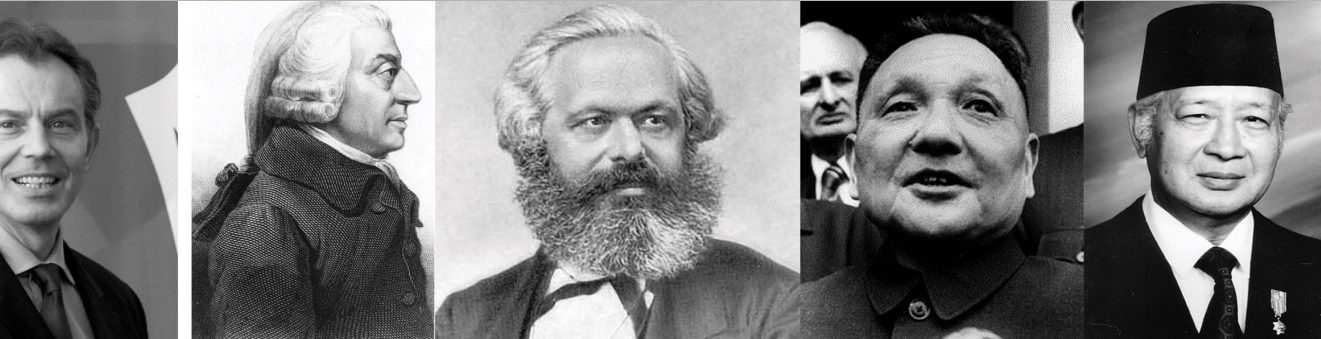
Dalam zaman yang berbeda. Bahkan lewat partai yang berbeda. Rekayasa dijalankan pula oleh Bill Clinton dan Tony Blair. Berbeda dengan pendahulunya. Clinton menolak untuk meyakini ideologi kaum demokrat secara membabi buta. Demikian pula. Blair pun tak mau mentah-mentah mengunyah paradigma partai buruh. Clinton dan Blair pun melakukan rekayasa yang sangat pintar, tepat sekaligus aman. Semuanya terjadi berkat pemikiran seorang Giddens lewat "the Third Way".

Sebuah "the alternative way" yang mampu menjadi medium rekonsiliasi antara kepentingan tradisional partai dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Terbukti Clinton dan Blair berikut Partai Demokrat dan Partai Buruh pun mampu memuaskan para konstituennya. Sekaligus menumbuhkan perekonomian pada saat bersamaan.

Jauh sebelumnya. Tepatnya, periode 1930-an. Rekayasa kebijakan yang tepat ternyata menjadi obat mujarab bagi penyelamatan perekonomian Amerika Serikat. Depresi ekonomi besar yang terjadi di seluruh dunia pada waktu itu telah membangkrutkan perekonomian. Sekaligus melunturkan keyakinan terhadap kapitalisme. Beruntunglah dunia saat itu punya seorang John Maynard Keynes. Untungnya pula Amerika Serikat mau mendengarnya. Pemerintah lantas mengalokasikan anggaran secara besar-besaran untuk menggerakkan "demand" masyarakat. Anggaran pemerintah yang tersisa kemudian dialokasikan kedalam proyek mega infrastruktur. Salah satunya melalui pembangunan

Rekayasa

Oleh : Agus Manshur, SE, MA
Perencana Pertama
Direktorat Perekonomian Daerah



" interstate highway " yang menghubungkan pantai timur dan pantai barat. Secara ekonomis hasilnya luar biasa. Pembangunan jalan tersebut mampu menjadi "multiplier effect" yang sangat besar bagi pulih dan tumbuhnya kegiatan ekonomi di masyarakat. New York dan Los Angeles pun terhubung secara fisik. Sekaligus secara ekonomis. Mobilitas penduduk antar negara bagian meningkat. Peluang ekonomi baru tercipta. Pasar-pasar baru bermunculan. Harapan masyarakat pun kembali memuncak. Dalam waktu relatif singkat sektor riel telah pulih. Hingga secara bertahap mampu menggerakkan sektor moneter. Selanjutnya, pertumbuhan sektor riel pun semakin tinggi. Demikian seterusnya. Hingga akhirnya teorema Keynes dianggap sebagai sebuah " panacea " yang ampuh. Yang mampu menjadi " the middle way " yang aman sekaligus bisa menyembuhkan penyakit kronis perekonomian dalam jangka pendek. Keynes dianggap berhasil menjinakkan " the Great Depression " dan merubahnya menjadi " the Great Expectation ".

Moral cerita dari semuanya sangat sederhana. Betapa dengan rekayasa kebijakan yang tepat, cermat, berani, tuntas, sekaligus konsisten, negara-negara kapitalis barat mampu mengatasi masalah yang ada. Rekayasa pula yang terbukti mampu merubah " masalah " menjadi " tantangan ". Dan kemudian melahirkan " peluang ". Inilah barangkali yang dimaksudkan oleh Schumpeter sebagai " inovasi kapitalis ". Atau yang disebut Berger sebagai " revolusi kapitalis ". Yang suka atau tidak. Telah terbukti kebenarannya hingga saat ini.

Dalam bentuk yang lain. Bahkan lewat ideologi yang berbeda. Deng Xiao Ping melakukan revolusi pemikiran yang genial, original, dan dahsyat. Deng bahkan mampu mengawinkan kebebasan ala kapitalisme dan kekakuan versosialismemenjadi senyawa baru yang bernama sosialisme pasar. Tak seperti Mao yang teramat kaku dan ortodoks. Bagi Deng tak peduli kucing hitam atau kucing putih yang penting bisa menangkap tikus. Pada gilirannya, rekayasa ala Deng tidak saja menghadirkan mukjizat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun juga

berlangsung stabil dan lama. Hasil dari " perjalanan ke selatan " di suatu musim dingin telah menyadarkan Deng bahwa sudah saatnya membangunkan " crouching tiger and hidden dragon " dari tidur panjangnya. Cina lantas berganti wajah menjadi " harimau " sekaligus " naga " ekonomi baru. Yang mampu mencabik-cabik dan membelit perekonomian global. Sekarang, Eropa, Amerika Serikat, Jepang, bahkan negara mana saja akan selalu was-was ketika berhadapan dengan kekuatan ekonomi Cina. Dari dalam kuburnya mungkin Deng bisa mengetawai Adam Smith dan Karl Marx sekaligus.

Di negeri ini rekayasa pernah dilakukan seorang Soeharto. Karenanya, hanya Soeharto lah yang disebut "bapak pembangunan ". Sampai dengan akhir 80-an, Soeharto telah berhasil mengangkat derajat Indonesia menjadi bagian dari kelompok negara industri baru di Asia. Maka tak heran bila Bank Dunia pun memuji kekuatan ekonomi kita waktu itu. Tak aneh pula bila kita pun sempat dibaptis sebagai bagian

dari "the Asian Miracle" yang kelewat ajaib. Setelah itu semuanya berubah. Memasuki periode 90-an, kebijakan ekonomi kita tak lagi "right on the track". Semuanya melenceng. Semuanya menyeleweng. Semuanya seperti tak lagi menginjak bumi. Kebijakan (wisdom) "daripada" Soeharto mulai menggantikan kebijakan (policy) negara yang semestinya. Peraturan kemudian berarti "aku lah yang mengatur". Lantas, "rule of law" berganti menjadi "rule of man". Soeharto pun mengulang kesalahan sejarah para diktaktor. Negara adalah saya. Dan hanya sayalah yang berhak mengatur negara ini. Sama seperti nasib dinasti Louis yang tergilas revolusi Perancis. Soeharto pun tumbang digoyang badai krisis. Setelah itu rekayasa pun pelan-pelan menghilang dari negeri ini.

Kini. Hampir sepuluh tahun lamanya sejak Soeharto lengser kita masih saja berada dalam masa "transisi" yang berkelanjutan. Habibie, Gus Dur, Mega, hingga SBY masih belum sepenuhnya berhasil menjinakkan keliaran euforia "reformasi" menjadi "formasi" negara yang mampu memberikan kejelasan, keamanan, sekaligus kesejahteraan bagi segenap warganya. Kita lelah karena negara ini "pause" terus menerus. Rakyat mulai khawatir negara ini akan mengalami "menopause". Pakar pun melihat gejala munculnya benih-benih "statelessness". Ketika tsunami tiba-tiba merubah "Serambi Mekkah" menjadi "Serambi

Hibah" yang berkepanjangan. Ketika semburan lumpur panas merubah Porong menjadi "Kuala Lumpur" yang penuh keterpaksaan. Ketika banjir besar merubah Jakarta menjadi "Venesia" yang memilukan. Ketika flu burung, demam berdarah, chikungunya, dan busung lapar merubah "kejadian luar biasa" menjadi hanya peristiwa yang "biasa-biasa saja". Ketika "nasi aking" merubah sebuah "fenomena" yang memalukan menjadi "realita" keseharian yang wajar. Ketika kapal tenggelam, pesawat jatuh, dan tabrakan kereta api merubah "moda transportasi" yang seharusnya aman menjadi "media aksidensi" yang berulang-ulang. Ketika itu pula kita mencatat adanya kegagalan negara (the failure of the state). Kita mencatat bahwa negara telah mengalami "disfungsi institusional" sekaligus "kelumpuhan administratif". Kita mencatat bahwa negara perlahan-lahan mulai menjadi tidak berdaya (powerlessness). Bila ini semua terus terjadi maka bisa disimpulkan pada akhirnya akan terjadi fenomena ketiadaan negara (the absence of the state).

Persoalannya kemudian apakah segenap problematika diatas akan memberikan kesadaran sekaligus

menumbuhkan inspirasi bagi para pemimpin kita untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Reagan, Thatcher, Clinton, Blair, bahkan Deng telah memberikan lebih dari sekedar contoh. Selebihnya, marilah kita tunggu bersama apakah negeri ini akan "direkayasa" secara benar-benar ataukah memang negeri ini akan terus menerus diurus dan dikelola secara apa adanya (business as usual). Seolah-olah memang seperti tidak terjadi apa-apa. Wallahualam bissawab.



Bangga Menjadi Suporter Tim Merah Putih Pada Piala Asia 2007



Perhelatan akbar Piala Asia sudah berakhir, hiruk pikuk supporter dari masing-masing kesebelasan sudah tidak tampak lagi, lagu penyemangat juga sudah tidak terdengar. Dengan bangga rakyat Irak berpesta menyambut kemenangan pertama Timnas mereka ajang Piala Asia disaat negara mereka sedang tercerai berai oleh perang saudara, mereka mampu menunjukan pada dunia bahwa dalam sepak bola tidak ada perbedaan apapun yang ada hanyalah kebersamaan dan semangat juang. Dari event Piala Asia, yang tersisa kini hanyalah kenangan manis bagi para pecinta sepak bola Indonesia dan PSSI yang diberikan kepercayaan oleh badan tertinggi Sepak Bola Asia AFC untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan event yang peringkatnya satu level di bawah Piala Dunia serta menjadi tempat Pertandingan Final dan Penutupan event Piala Asia tersebut.

Cukup lama PSSI melakukan persiapan dan perencanaan yang matang guna menjadi tuan rumah. Dari merenovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Jaka Baring Palembang yang dijadikan tempat pertandingan

grup D serta mempersiapkan Timnas yang akan berlaga pada kejuaraan tersebut, semua dilakukan dengan perencanaan yang cukup matang dan terukur. Dengan merubah stadion yang tadinya tidak layak sebagai tempat pertandingan berlevel internasional sampai akhirnya menjadi stadion yang layak dijadikan tempat pertandingan bertaraf internasional, melan dana milyaran rupiah serta perencanaan yang matang maka Indonesia dianggap sukses menjadi penyelenggara event Pentas piala Asia, walaupun masih terjadi insiden yang sedikit memalukan dimana lampu stadion padam selama 20 menit saat pertandingan Korea Selatan dengan Arab Saudi.

Disamping mempersiapkan stadion dan sarana prasarana lainnya PSSI juga menyiapkan timnas yang tangguh guna mengikuti kejuaraan Piala Asia ini, dengan perencanaan dan persiapan yang minim timnas dibentuk di bawah asuhan pelatih asing asal Bulgaria Ivan Kolev yang sudah malang melintang di dunia sepak bola tanah air, hanya melakukan pelatnas 2 bulan di daerah-daerah dan melakukan

serangkaian uji coba dengan klub lokal dan pertandingan persahabatan dengan sejumlah Negara Asia dan Afrika, dengan maksud untuk memperbaiki kinerja timnas dan menambah pengalaman bagi para pemain. Dalam pemusatan latihan ini para pemain di gembeng oleh teknik bermain dan peningkatan stamina yang menjadi kendala serius di persepak bolaan tanah air.

Setelah pembukaan dilakukan di Negara Thailand, Timnas Indonesia memulai pertandingan pertamanya di Stadion Gelora Bung Karno Melawan Bahrain, banyak kalangan meragukan Timnas Indonesia yang saat itu akan bertanding, para suportepun tidaklah memadati stadion, hanya sebatas untuk memberikan dukungan melalui layar televisi yang kebetulan disiarkan langsung oleh salah satu stasiun televisi swasta, stadion Gelora Bung Karno terasa sangat besar untuk menampung supporter Indonesia yang hanya sebagian kecil hadir pada pertandingan pertama Timnas merah Putih, masih segar dalam ingatan kita saat dua kali penyelenggaraan Piala Tiger

Timnas kita hanya menempati posisi runner-up, padahal saat itu Indonesia menjadi tuan rumah dan di dukung puluhan ribu supporter fanatiknya yang langsung datang ke stadion Gelora

Bung Karno, dari pengalaman pahit itulah supporter Indonesia mungkin ingin melihat dulu hasil dari pelatnas yang hanya 2 bulan .

Dengan semangat dan dukungan supporter yang belum maksimal Timnas Indonesia melakukan pertandingan pertamanya dengan semangat juang yang tinggi tanpa mengenal lelah, para pemain menerapkan taktik dan strategi yang di instruksikan oleh pelatih Ivan Kolev, hingga peluit akhir ditiup skor pertandingan 2-1 untuk kemenangan Indonesia. kemenangan pertama Timnas disambut suka cita oleh para pemain, official Tim dan puluhan ribu supporter Tim Merah Putih. Kemenangan Timnas Indonesia menjadi berita yang sangat menarik dan menjadi pengantar obrolan santai masyarakat di seluruh lapisan tanpa terkecuali pejabat, artis, tokoh masyarakat dan masyarakat awam sekalipun. Kemenangan melawan Bahrain ternyata memotifasi masyarakat Indonesia untuk ambil bagian menjadi supporter Timnas Merah Putih, tidak hanya para supporter dari Jakarta saja supporter dari daerah berduyunduyun datang ke Stadion Gelora Bung Karno untuk memberikan semangat kepada Timnas Merah Putih. Semua kalangan dari para Pejabat, artis, anak-anak beserta

orang tua mereka bahkan para kelompok wanita pun tidak mau ketinggalan untuk hadir di stadion kebanggaan rakyat Indonesia dengan menggunakan atribut-atribut lengkap berwarna merah putih, bahkan ada yang rela mewarnai anggota tubuhnya untuk di gambar serta mencukur rambutnya, membuat tulisan di spanduk yang berisikan kalimat dukungan, membentangkan bendera merah putih berukuran besar, bahkan ada yang membentangkan spanduk bergambar pelatih Ivan Kolev yang dianggap telah berjasa meningkatkan peforma tim Indonesia.

Pada pertandingan kedua melawan tim Arab Saudi dan pertandingan terakhir melawan Tim Korea Selatan, timnas memang mengalami kekalahan yang menyakitkan. Melawan Arab Saudi Timnas kalah dengan skor 1-2, gol kemenangan Arab Saudi di dapat pada menit-menit akhir babak kedua saat injuri time. Melawan Korea Selatan Timnas kalah dengan skor 0-1 melalui pertandingan yang menegangkan, dimana para punggawa Timnas tanpa kenal lelah memberikan perlawanan sampai pluit panjang di bunyikan. Bukan hanya para pemain yang melakukan perlawanan dengan semangat yang tinggi, tapi ribuan supporter yang hadir langsung di Stadion tanpa kenal lelah memberikan dukungan kepada Timnas kita, sepanjang pertandingan para supporter menyanyikan lagu kebangsaan serta yel-yel untuk

memompa semangat Timnas. Timnas Indonesia memang kalah, namun para supporter tetap bangga terhadap permainan Bambang Pamungkas dkk, yang mereka anggap sudah berkelas Internasional. Standing aplaus dari penonton di berikan kepada Timnas Merah Putih di akhir pertandingan, diluar stadionpun para supporter juga menerikan yel-yel buat Timnas Indonesia. Mereka tidak peduli hasil akhir yang diraih oleh Timnas tapi mereka bangga dengan Timnas Merah Putih yang mereka anggap sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan dapat di banggakan.

Antusias penonton untuk menyaksikan pertandingan secara langsung tidak mampu terbendung, kapasitas stadion tidak mampu menampung jumlah supporter yang hadir, sehingga para supporterpun harus rela menyaksikan pertandingan dari luar stadion menggunakan layar berukuran besar yang disediakan oleh panitia. Para supporter saling bahu membahu mendukung Timnas Merah Putih kesayangan mereka. Yang paling membanggakan dari supporter Indonesia adalah, mereka mendukung Timnas dengan sportifitas yang tinggi tanpa ada kekerasan atau kerusakan di saat tim kesayangannya dikalahkan oleh tim lawan yang secara teknik dan kemampuan diatas Timnas Merah Putih, di dalam stadion tidak ada adegan saling lempar benda keras, bakar bakaran bangku stadion atau apapun yang dapat menyulut

terjadinya kerusuhan, supporter lawanpun dengan leluasa mendukung timnya tanpa ada rasa ketakutan. Bahkan disaat Tim Arab Saudi dan Korea Selatan keluar dari stadion menuju penginapan, supporter Indonesia memberikan aplaus dan sambutan hangat kepada mereka, terlebih saat bus yang ditumpangi oleh para pemain dan Official Timnas Merah Putih keluar dari stadion menuju penginapan sambutan meriah dari para supporter tiada hentinya mengelu-elukan para pemain Timnas Merah Putih. Mungkin sekarang ini supporter Indonesia sudah lebih dewasa dan matang dalam memberikan dukungan kepada Timnas, hasil akhir tidak menjadi target utama tetapi lebih melihat dari sisi permainan yang disuguhkan oleh Timnas. Situasi seperti inilah yang harus tetap dijaga oleh supporter Indonesia untuk terus meningkatkan dan memajukan persepakbolaan tanah air dan memberidukung kepada PSSI untuk menciptakan Timnas yang tangguh dan disegani di pentas Dunia dengan persiapan dan perencanaan yang matang. Banyak sekali

pengalaman berharga yang dapat diambil bagi bangsa Indonesia dari event sebesar Piala Asia ini, tapi yang paling terpenting adalah kita semua bangga terhadap Suporter Indonesia... ..(DPA)

BRAVO TIMNAS INDONESIA BRAVO SUPORTER INDONESIA BRAVO PERSEPAKBOLAAN INDONESIA



Berita Duka



Segenap
Pimpinan
dan Seluruh Staf
Pusbindiklatren-Bappenas

Turut Berdukacita

Atas Meninggalnya
Drs. H. Indra Tjahaja, MA
(Perencana Madya-IV/b)

Semoga
Segala Amal dan Ibadah Almarhum
Diterima Di sisi-Nya

107

behind the scene



ALL CREW SIMPUL PERENCANA



1870 = 26° C
NOW
!!!
32° C

**GLOBAL
WARMING
IS YOUR
FAULT**

Suhu di Jakarta ada tahun 1870 adalah 26 derajat celsius. Namun, dalam kurun waktu satu abad suhu meningkat 1,4 derajat celsius.

Dengan kata lain, hingga tahun 2000 suhu Jakarta telah melonjak hingga rata-rata 27,82 derajat celsius

warning

global warming

Iklan Layanan Masyarakat ini di Persembahkan Oleh Majalah Simpul Perencana